



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2024 (LKPJ)

Disusun oleh:

BAPPERIDA KOTA BONTANG

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Pemerintah Kota Bontang



bapelitbang.bontangkota.go.id 

[ppidbapperidabontang](#) 

[Ppid Bapperida-btg](#) 

[Bapelitbang Bontang](#) 

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kami sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 yang merupakan akhir masa jabaran Wali Kota Bontang. Laporan akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang dalam Rapat Paripurna.

Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan ini merupakan wujud dari akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan amanat Pembangunan di Daerah. Secara khusus, LKPJ menjadi komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam mengevaluasi dengan obyektif setiap proses Pembangunan, serta sebagai landasan untuk perencanaan selanjutnya. Dokumen LKPJ ini disusun sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah.

LKPJ tahun 2024 merupakan hasil kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang pada Tahun Anggaran 2024, yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Periode 2021-2026. Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada tahun 2024 adalah hasil kerja keras semua pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Kota Bontang, termasuk Pemerintah Daerah, DPRD Kota Bontang, dan Masyarakat Kota Bontang.

Selama masa jabatan kami telah menghadapi berbagai tantangan, namun dengan semangat dan dukungan dari semua pihak, kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang belum tercapai, namun kami berharap LKPJ ini menjadi dasar bagi pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan Pembangunan Kota Bontang yang lebih baik. Dan kami berharap LKPJ ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah di Kota Bontang pada masa yang akan datang. Terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Bontang dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKPJ ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

Bontang, Maret 2025

Wali Kota Bontang

NENI MOERNIAENI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Hukum	3
1.2 Visi Dan Misi Kepala Daerah	4
1.2.1 Visi	5
1.2.2 Misi	6
1.3 Data Umum Daerah	9
1.3.1 Data Geografis Wilayah.....	9
1.3.2 Jumlah penduduk	18
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk.....	25
1.3.4 Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara	26
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	31
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	32
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	35
2.1 Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah.....	36
2.1.1 Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Asli Daerah.....	38
2.1.2 Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Transfer.....	40
2.1.3 Perubahan Penjabaran Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	42
2.2 Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Daerah	44
2.2.1 Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Operasi	45
2.2.2 Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Modal.....	47
2.2.3 Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Tidak Terduga	50
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	51
3.1 Evaluasi capaian tujuan dan sasaran pembangunan 2024.....	52
3.2 Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan	61

3.2.1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	63
3.2.2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	114
3.2.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	199
3.2.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	222
3.2.5	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan.....	234
3.2.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	259
3.2.7	Urusan Kewilayahan dan Urusan Pemerintahan.....	263
3.2.8	Unsur Pemerintahan Umum	278
3.3	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan.....	282
3.4	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	283
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN		297
4.1	Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan.....	298
4.1.1	Identifikasi Tugas Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Daerah Atasnya	298
4.1.2	Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan PemerinXtahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintah Di Bawahnya	298
4.1.3	Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Upaya Penyelesaian	299
4.2	Pelaksanaan Kegiatan Oleh Provinsi dan Pusat Di Kota Bontang.....	299
4.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	300
BAB V KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA DAN PRESTASI/ PENGHARGAAN		304
5.1	Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga	305
5.2	Penghargaan/Prestasi Kota Bontang Tahun 2024	321
PENUTUP		329

BAB I PENDAHULUAN

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja akan menjadi acuan perbaikan pembangunan di tahun mendatang.



Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai kinerja Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran. Hal ini ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang merupakan Peraturan Menteri pengganti dari Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2020. Pada Peraturan Menteri ini mengatur ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang terdiri dari hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasaan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini menyajikan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023, sebagai bahan evaluasi dan atau koreksi serta bahan masukan untuk dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Selain itu, LKPJ juga harus mencakup analisis mengenai permasalahan yang dihadapi selama satu tahun anggaran dan Upaya penyelesaiannya, serta tindak lanjut dari rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bontang Tahun 2021-2026, bahwa tahun 2024 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 2021-2026, tahun 2024 ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2021-2026 karena adanya Pemilihan Umum serentak untuk Bupati dan Wali Kota. Untuk Pelaksanaan Pembangunan tahun 2024 di Kota Bontang mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang meliputi Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Yang Berdaya Saing Dan Sejahtera, Penguatan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Berbasis pada Ekonomi Lokal Dan Keragaman Sosial Budaya Masyarakat, Penataan Infrastruktur Perkotaan dan lingkungan hidup Yang Mendorong Daya Saing Daerah, Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani.

Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LKPJ Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan dAerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang;
 14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026;
 15. Peraturan Derah Nomor 6 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024;
 16. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 17. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.2 Visi Dan Misi Kepala Daerah

Aspek pembangunan yang menjadi sasaran utama dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 mencakup aspek pembangunan tata kelola pemerintahan, aspek pembangunan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan, aspek pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan pada masing-masing aspek pembangunan akan memperbesar harapan terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

Berdasarkan perspektif aspek utama pembangunan yang merupakan hasil penelaahan terhadap kerangka kebijakan pembangunan jangka panjang, serta isu pembangunan Kota Bontang, maka dengan tujuan untuk memajukan pembanguna Kota Bontang ke depan, melalui proses penelaahan terhadap visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263, dinyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah maka selanjutnya ditetapkan visi misi RPJMD periode 2021-2026 sebagai berikut

1.2.1 Visi

Visi Kota Bontang yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

“Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab”

Visi pembangunan tersebut pada esensinya adalah cita-cita bersama untuk mewujudkan Kota Bontang lebih berkembang pada seluruh aspek pembangunan yang dilaksanakan, sehingga hasil – hasil pembangunan lebih dapat dirasakan dampak dan manfaatnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang.

Kota Bontang yang Lebih Hebat merupakan suatu harapan dan cita-cita bahwa Kota Bontang dapat menjadi Kota yang lebih meningkat kualitas tata kelola pemerintahannya, lebih meningkat kualitas penataan sarana dan prasarana kotanya, lebih meningkat perekonomian, kehidupan sosial dan budaya kotanya, lebih berkelanjutan daya dukung lingkungannya, lebih unggul SDM-nya dan lebih sejahtera masyarakatnya. Harmonisasi dari pencapaian seluruh cita-cita pembangunan tersebut pada esensinya merupakan tekad untuk mewujudkan Kota Bontang yang Hebat Pemerintahannya, Hebat Kotanya dan Hebat Masyarakatnya. **Hebat Pemerintahannya** merupakan komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Keinginan ini akan diwujudkan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, peningkatan dan pengembangan berbagai inovasi untuk mengoptimalkan

penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. **Hebat Kotanya** ditujukan untuk mewujudkan Kota Bontang dengan penataan sarana dan prasarana kota yang mantap dan berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan seluruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kota Bontang yang hebat akan mendorong peningkatan produktivitas kota dan warganya secara berkelanjutan. **Hebat Masyarakatnya** dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Kota Bontang yang harmoni dengan keberagamannya, masyarakat yang aktif dan peduli terhadap pembangunan kotanya, dan masyarakat dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kota Bontang yang Beradab merupakan perwujudan kota dengan masyarakat yang **Beradab**, yaitu ‘maju tingkat penghidupannya’ pada seluruh aspek kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu mewujudkan Kota Bontang yang Beradab akan sangat berkaitan dengan membangun karakter dan budaya masyarakat yang produktif dan berakhlak mulia sebagai pondasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan Pancasila. **HEBAT** dan **BERADAB** dalam visi di atas merupakan akronim dari kata **H**armoni, **bE**rkelanjutan, **B**erdaya **sA**ing, **BE**rsih, **AD**il, **A**manah dan **B**ertanggung jawab yang merupakan nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat memberi warna bagi pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Selanjutnya Visi dijabarkan menjadi misi Kota Bonang 2021-2026.

1.2.2 Misi

Dalam kerangka untuk mewujudkan Visi Pembangunan “Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab”, maka agenda pembangunan lima tahun mendatang dirumuskan dalam penetapan tiga Misi Pembangunan Kota Bontang sebagai berikut:

- a. Kota Bontang yang **HARMONI** melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan.
- b. Kota Bontang yang **BERKELANJUTAN** yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.

- c. Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah diarahkan ke dalam Visi Pembangunan Daerah, maka dalam rangka pelaksanaannya misi pembangunan sebagai arahan strategik pencapaian visi, harus dapat dipersepsikan secara tepat untuk mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami setiap butir misi pembangunan tersebut. Oleh karena itu, maka penjabaran masing-masing Misi dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1 : Kota Bontang yang HARMONI Melalui Pemantapan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan.

Arahan strategik dari agenda pembangunan yang menjadi fokus utama misi pembangunan ini adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang diharapkan menjadi **“lebih hebat dan beradab”**. Agenda pembangunan ini harus dapat memastikan kelangsungan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan filosofisnya yakni ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu upaya yang progresif melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang **harmoni**. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan harus mampu secara harmonis, selaras dan serasi mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha untuk memperkuat sinergi menyatukan potensi dan peran pembangunan serta mempromosikan kolaborasi atau kerjasama agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam lingkup internal pemerintahan, harmoni dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan elemen penting untuk menyinergikan dan mengharmonisasikan potensi dan peran pemerintahan daerah selaku eksekutif, legislatif dan bersama instansi vertikal sehingga sasaran dan target kinerja pembangunan daerah dapat dicapai secara lebih efektif, efisien dan akuntabel. Semangat dan tekad untuk membangun harmoni dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan dan peluang pembangunan ke depan dalam rangka melaksanakan amanah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yakni Pemerintahan yang Bersih, Adil, Amanah dan Bertanggung jawab sebagai bagian dari

indikator terwujudnya Kota Bontang yang Hebat Pemerintahannya.

Misi 2: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.

Arahan strategik dari agenda Misi pembangunan ini adalah bahwa dalam rangka pencapaian Visi, fokus pembangunan juga perlu diarahkan pada upaya untuk wujudnya Kota Bontang yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan Kota Bontang yang lebih hebat ke depan dilaksanakan dalam koridor keseimbangan dan keselarasan antara pentingnya mendorong kemajuan dan pertumbuhan kota dengan tetap menjaga keberlanjutan daya dukung lingkungan.

Untuk menuju pada perwujudan Kota Bontang yang Lebih Hebat, agenda pembangunan diarahkan melalui pemantapan pembangunan ekonomi yang merata, pemantapan potensi sosial dan budaya masyarakat yang produktif, pembangunan infrastruktur yang semakin mantap dan pemantapan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Melalui pemantapan bidang-bidang utama pembangunan tersebut diharapkan Kota Bontang yang berkelanjutan, layak huni, cerdas, dan berwawasan lingkungan dapat diwujudkan.

Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Arahan strategik agenda Misi pembangunan ini dalam mendukung pencapaian Visi adalah dengan mengarahkan fokus pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih berdaya saing dan unggul. Keberhasilan membangun SDM berdaya saing dan unggul akan menjadi akselerator bagi Kota Bontang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam rangka mewujudkan Kota Bontang yang Berdaya Saing dan Sejahtera, peningkatan kualitas SDM sebagai fokus utama pembangunan akan diintervensi melalui bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ketahanan pangan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pariwisata, bidang ketenagakerjaan, bidang perlindungan dan

kesejahteraan sosial. SDM yang berdaya saing dan unggul akan dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, SDM tenaga kerja mendapatkan akses pembinaan dan pelatihan yang tepat sehingga kompetensi tenaga kerja meningkat dan mendapatkan pekerjaan yang layak, serta masyarakat yang rentan dan kurang mampu mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Implementasi kebijakan dan program yang tepat pada masing-masing bidang intervensi tersebut akan menjadi sarana utama untuk mewujudkan Kota Bontang yang **Hebat Masyarakatnya**.

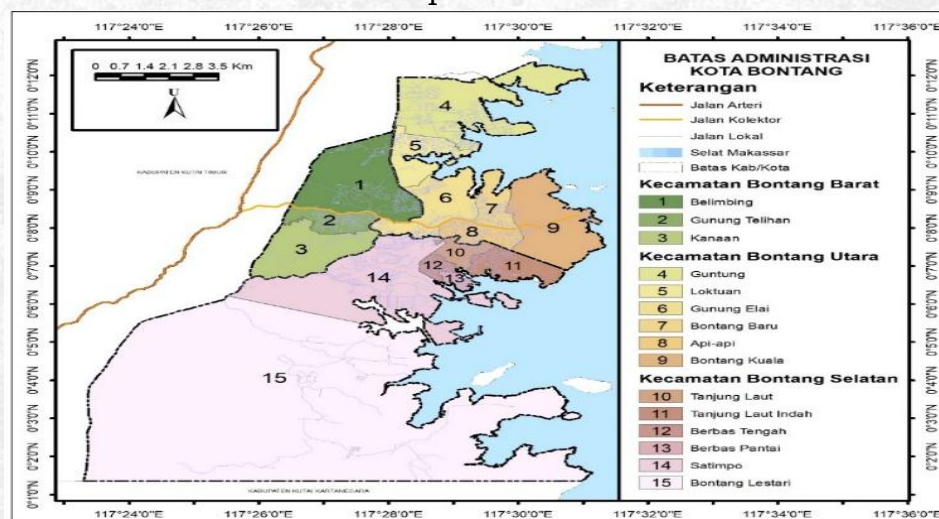
1.3 Data Umum Daerah

1.3.1 Data Geografis Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Bontang merupakan kota dengan luas wilayah paling kecil di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah darat ± 16.188 ha, adapun batas wilayah Kota Bontang meliputi:

- Sebelah utara : Kabupaten Kutai Timur
- Sebelah timur : Selat Makassar
- Sebelah selatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sebelah barat : Kabupaten Kutai Timur



Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 – 2039

Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Kota Bontang

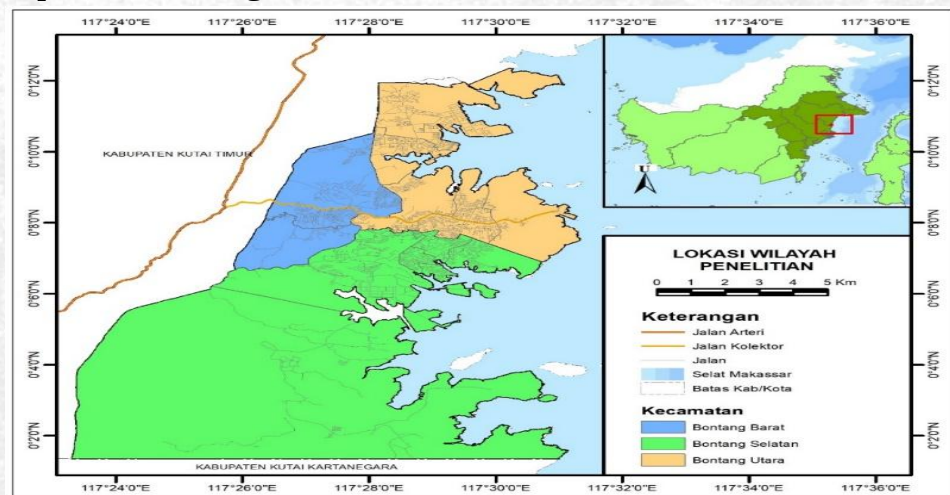
Pada awalnya Kota Bontang merupakan kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang No. 47

Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17 tahun 2002 Kota Bontang terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat, yang meliputi 15 (lima belas) kelurahan dan 499 Rukun Tetangga (RT).

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Bontang secara geografis terletak diantara 0°01' Lintang Utara - 0°12' Lintang Utara dan 117°23' Bujur Timur - 117°38' Bujur Timur. Kota Bontang berada pada lokasi yang strategis, dilewati jalan poros trans-kalimantan dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. PT. Badak NGL dan PT. Pupuk Kalimantan Timur dibangun di Kota Bontang karena faktor lokasi tersebut dan menjadi salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan dan perkembangan Kota Bontang.

Kota Bontang juga memiliki beberapa pulau-pulau kecil, seperti Pulau Beras Basah yang menjadi salah satu objek daya tarik wisata, Pulau Gusung yang terdapat permukiman di atasnya, pulau mangrove yang tersebar dari utara hingga selatan, juga terdapat permukiman di atas laut seperti Melahing dan Tihi-Tihi.



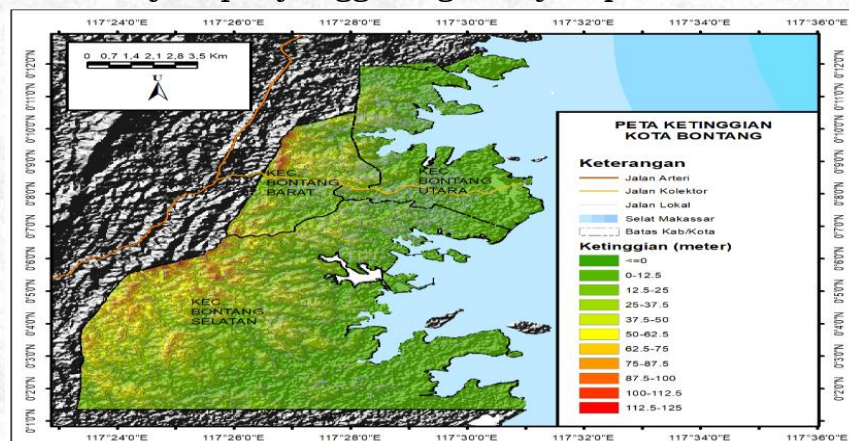
Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 – 2039

Gambar 1.2 Peta Orientasi Lokasi Kota Bontang

c. Topologi

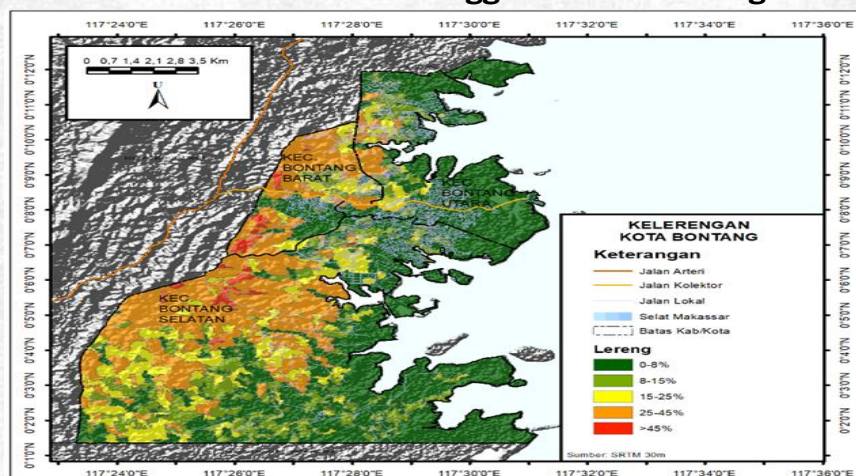
Secara topografis Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah yang datar, landai dan sedikit berbukit dengan ketinggian antara 0 – 125 m diatas permukaan laut. Mayoritas wilayah (64%) menempati kawasan pinggir pantai yang relatif datar, sehingga relief Kota Bontang terlihat mendatar khususnya di wilayah pantai dan bergerak membukit dan bergelombang dari bagian selatan ke barat. Sebaran ketinggian dan kelerengan dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Gambar 2.4.

Daerah barat merupakan daerah tertinggi, berbukit dan perlahan melandai kearah timur yang merupakan daerah pesisir. Kawasan perbukitan di daerah barat ini pula yang memiliki kelerengan relatif curam dibanding daerah timur. Karena itu daerah barat memang memiliki keterbatasan dan idealnya menjadi kawasan yang perlu dijaga dan dihijaukan karena menjadi penyangga bagi wilayah perkotaan.



Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 – 2039

Gambar 1. 3 Peta Ketinggian Kota Bontang



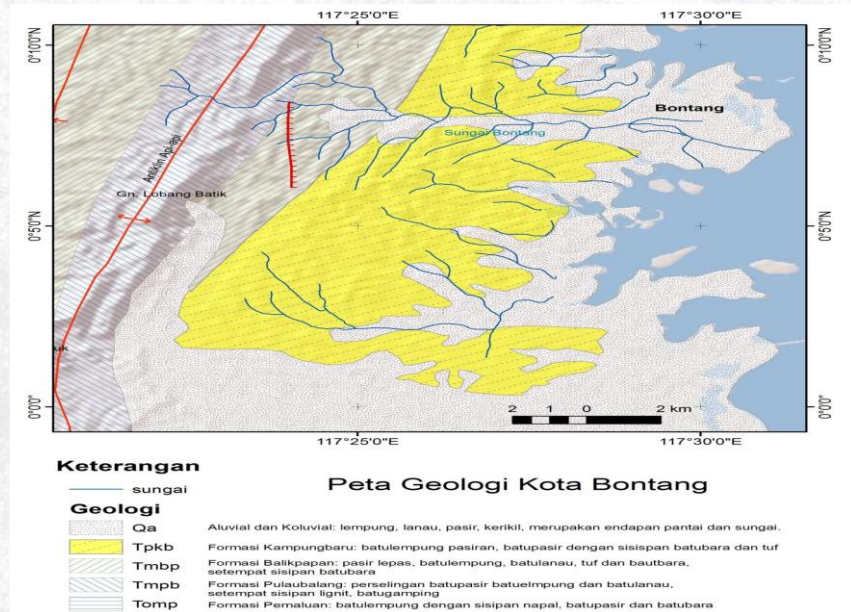
Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 – 2039

Gambar 1.4 Peta Kelerengan Kota Bontang

d. Struktur Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, Kota Bontang termasuk dalam sub bagian cekungan kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah perbukitan sebelah timur Gunung Lobang Batik dan sebelah utara Sungai Temputuk. Dari aspek litologi, formasi batuan di Kota Bontang terdiri dari enam formasi batuan, yaitu:

- 1) Endapan Alluvium, yang tersusun oleh kerakal, kerikil, lempung dan lumpur sebagai endapan sungai, rawa, pantai dan delta.
- 2) Formasi Kampungbaru, yang tersusun atas batu pasir kuarsa dengan sisipan lempung, lanau dan serpih dengan sifat lunak dan mudah hancur. Formasi ini memiliki akuifer potensial di daerah Bontang dengan jenis batuan yang bertindak sebagai akuifer berupa kerikil, pasir kuarsa yang bersifat lepas, batu pasir dan pasir lempung. Formasi ini menindih selaras dan setempat tidak selaras terhadap Formasi Balikpapan.
- 3) Formasi Balikpapan, yang terdiri atas perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung lanauan dan serpih dengan sisipan napal, batu gamping dan batubara. Formasi Balikpapan merupakan formasi terbesar di Kawasan Pesisir Bontang dengan arah utara-selatan.
- 4) Formasi Pulaubalang. Merupakan perselingan batu pasir kuarsa, batu pasir dan batu lempung dengan sisipan batubara.
- 5) Formasi Bebulu. Merupakan formasi batuan terkecil di Kawasan Pesisir Bontang yang tersusun atas batu gamping dengan sisipan lempung lanauan dan sedikit napal.
- 6) Formasi Pamaluan. Tersusun atas batu lempung dan serpih dengan sedikit napal, batu pasir dan batu gamping.
- 7) Jenis tanah didominasi oleh podsolik merah kuning, aluvial dan kompleks latosol. Jenis tanah ini memiliki lapisan kuning (top soil) yang tipis, peka erosi dan miskin unsur hara. Untuk pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan dibutuhkan pengolahan awal berupa perbaikan tanah (soil stabilization) dan pengamanan hutan, sehingga kestabilan tanah dan persediaan air tanah tetap terjaga.



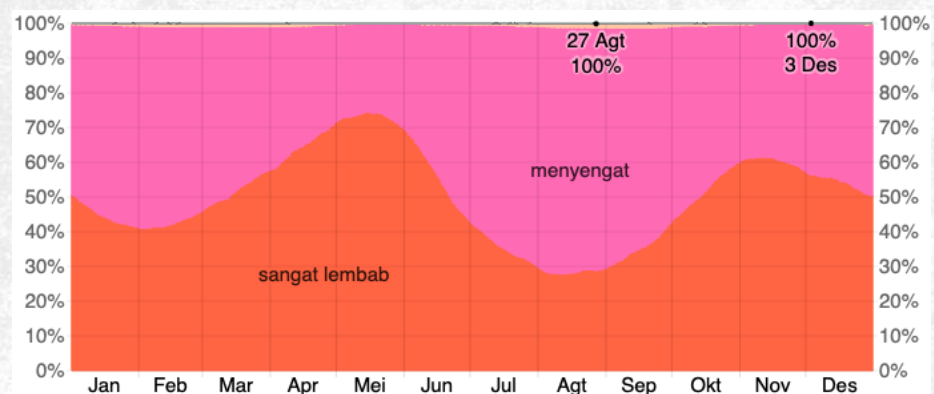
Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 – 2039

Gambar 1.5 Peta Geologi Kota Bontang

e. Kondisi Klimatologi

Proses pergantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfer dalam jangka waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim. Iklim merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfer yang meliputi panas, kelembaban, dan gerakan udara. Kota Bontang berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis sehingga mengalami dua musim, yaitu: musim kemarau dan musim penghujan. Kedua musim ini dipengaruhi oleh angin muson, yaitu: angin Muson Barat pada bulan November-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober.

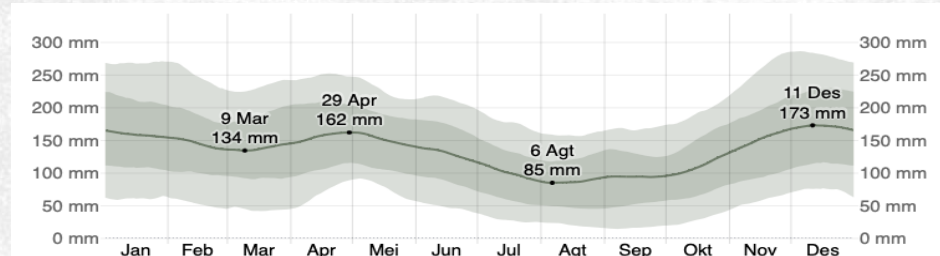
Suhu udara rata-rata tertinggi di Kota Bontang sebesar 27,52°C pada bulan Februari dan terendahnya 24,36°C pada bulan November. Kelembaban udara tertinggi 100% pada bulan Juni, terendahnya 63,75% pada bulan September.



Sumber: id.weatherspark.com, 2024

Gambar 1.6 Tingkat Kelembaban di Kota Bontang

Terdapat empat stasiun pengamatan cuaca di Bontang, yaitu Stasiun Pengamatan Bontang Lestari, Tanjung Laut, Gunung Elai, dan Gunung Telihan. Bulan Desember merupakan bulan dengan rata-rata curat hujan terbanyak yaitu 173 milimeter. Sedangkan bulan Agustus merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan paling sedikit, yaitu 86 milimeter.



Sumber : id.weatherspark.com, 2024

Gambar 1.7 Rata-rata Curah Hujan Bulanan Kota Bontang

f. Hidrologi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2015 Tahun 2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, wilayah Kota Bontang terdiri atas 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu:

1. DAS Tanjung

DAS Tanjung seluas ± 415 hektar terletak di wilayah utara Kelurahan Guntung. DAS ini dilewati oleh Sungai Guntung sepanjang ± 4 km dengan lebar antara 2 – 10 meter dan kedalaman rata-rata 1 – 2 meter. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah ± 1 meter, sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah $\pm 3,5$ meter.

2. DAS Lempake

DAS Lempake seluas ± 2.726 hektar terletak di sebagian Kelurahan Guntung, Kelurahan Loktuan, Kelurahan Belimbing, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Bontang Baru, dan sebagian Kelurahan Bontang Kuala. DAS ini dilewati oleh Sungai Kanibungan sepanjang ± 2 km dan sebagian kecil dari Sungai Guntung. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah ± 1 meter, sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah $\pm 3,5$ meter.

3. DAS Bontang

DAS Bontang seluas ± 2.284 hektar terletak di wilayah tengah Kota Bontang yang mencakup 6 (enam)

kelurahan, yaitu: sebagian kecil Kelurahan Belimbing, Kelurahan Kanaan, sebagian Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Api-API, sebagian Kelurahan Bontang Kuala, dan sebagian Kelurahan Tanjung Laut Indah. DAS ini dilewati oleh aliran Sungai Bontang yang membentang sepanjang ± 18 km dan lebar antara 4 – 10 meter dengan kedalaman rata-rata 1 – 2,5 meter. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah 1 meter, sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah 3,5 meter.

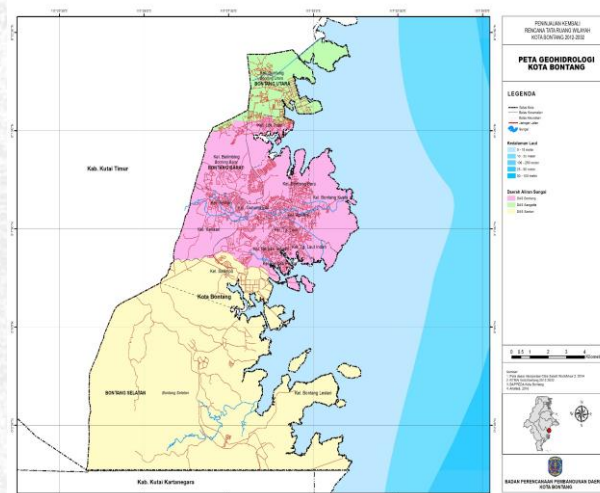
4. DAS Nyerakat

DAS Nyerakat seluas ± 8.051 hektar terletak di bawah DAS Bontang yang meliputi 6 (enam) kelurahan, yaitu: sebagian Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Berbas Pantai, Kelurahan Berebas Tengah, Kelurahan Satimpo, dan Kelurahan Bontang Lestari. Pada DAS ini terdapat Sungai Nyerakat dengan panjang aliran ± 17 km dan lebar sungai antara 3 – 10 meter dengan kedalaman rata-rata 1 – 2 meter.

5. DAS Santan

DAS Santan seluas 2.471 hektar terletak di bawah DAS Nyerakat yang meliputi sebagian Kelurahan Bontang Lestari.

Kelima DAS di atas merupakan bagian dari Wilayah Sungai Karangan yang semuanya bermuara di Selat Makassar. Sungai-sungai tersebut juga mengalirkan air yang berasal dari mata air, terutama air yang keluar dari batuan pasir halus, pasir kasar, dan lempung pasir yang berasal dari formasi Balikpapan.



Sumber: Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2015, Tahun 2015

Gambar 1.8 Peta Daerah Aliran Sungai Kota Bontang

Ditinjau dari aspek geohidrologi, cekungan air tanah Kota Bontang termasuk dalam sub bagian cekungan Kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah barat Gunung Lobang Batik dan sebelah utara Sungai Temputek.

Bagian barat Bontang ke arah perbukitan Gunung Lobang Batik merupakan daerah utama untuk peresapan air tanah tertekan. Air hujan di daerah ini meresap pada batuan formasi Kampungbaru yang didominasi oleh pasir, di bagian paling barat berbatasan dengan formasi Balikpapan, yang terletak memanjang dari utara ke selatan sejajar dengan penyebaran batuan formasi Balikpapan yang menempati sayap antiklin bagian timur, untuk itu perlu untuk menjaga daerah tersebut demi keberlanjutan air tanah dalam yang menjadi air baku utama dan satu-satunya di Kota Bontang.

Secara umum aliran air tanah mengikuti kemiringan lapisan batuan dengan keadaan kemiringan yang lebih tua dari formasi Kampungbaru serta kemiringannya yang lebih terjal (dapat mencapai 400 makin dekat ke arah sumbu antiklin) tidak dapat memberikan imbuhan kepada batuan Formasi Kampungbaru, karena di samping mengalir air pada bidang sendiri juga ada bidang pemisah yaitu *unconformity* (ketidakselarasan). Bidang kontak tersebut dapat dijumpai sekitar jalur pemipaan PT. Pupuk Kaltim. Maka sebagai batas bawah (lantai dasar) cekungan potensial Bontang adalah dialasi oleh Formasi batuan Balikpapan.

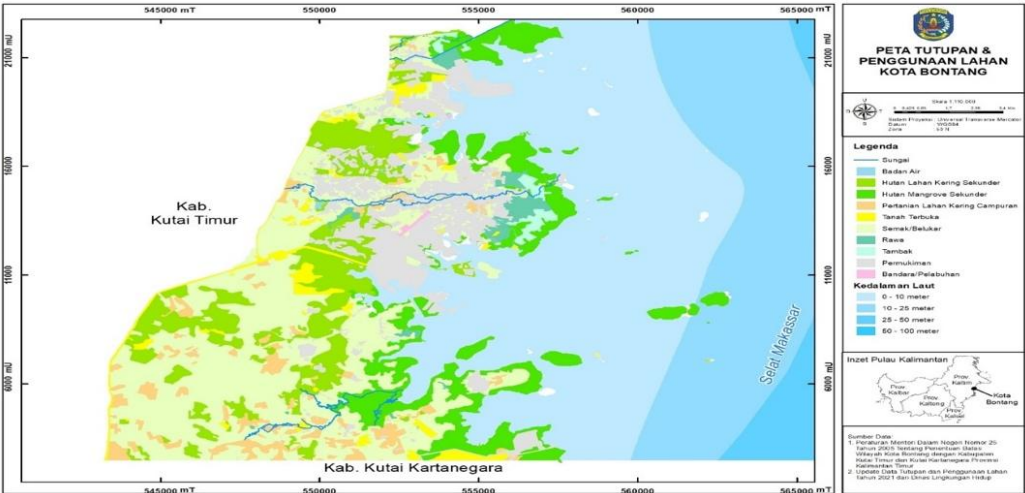
g. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan dan tutupan lahan di Kota Bontang pada tahun 2019 secara umum didominasi oleh lima jenis penggunaan, dengan urutan dari yang terluas adalah penggunaan lahan semak, hutan mangrove, hutan lahan rendah, bangunan permukiman kota, serta bangunan industri, perdagangan dan perkantoran. Penggunaan lahan di Kota Bontang didominasi oleh kawasan non terbangun yang mencapai sekitar 82 persen. Hal tersebut menunjukkan potensi Bontang untuk berkembang masih sangat tinggi tentunya dengan memperhatikan keberadaan kawasan kehutanan.

Tabel 1.1 Luasan penggunaan lahan tahun 2021

JENIS TUTUPAN LAHAN/ PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (HEKTAR)	PERSENTASE (%)
Kawasan Non-Terbangun	13.305	82,19
Badan Air	64	0,40
Hutan Lahan Kering Sekunder	2.395	14,79
Hutan Mangrove Sekunder	2.608	16,11
Pertanian Lahan Kering Campuran	1.006	6,21
Tanah Terbuka	615	3,80
Semak/Belukar	6.103	37,70
Rawa	322	1,99
Tambak	192	1,19
Kawasan Terbangun	2.883	17,81
Permukiman	2.859	17,66
Bandara/Pelabuhan	23	0,14
TOTAL	16.188	100

Sumber : Data Penggunaan Lahan Kota Bontang, Tahun 2021



Sumber: Update Data Tutupan dan Penggunaan Lahan Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

Gambar 1.9 Peta Tutupan dan Penggunaan Lahan Tahun 2021

1.3.2 Jumlah penduduk

Penduduk memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu wilayah. Penduduk merupakan objek dan subjek pembangunan. Penduduk merupakan objek pembangunan karena mereka adalah pihak yang menjadi penerima manfaat dari berbagai kebijakan dan program pembangunan. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk. Penduduk juga berperan sebagai objek pembangunan karena mereka dapat menjadi partisipan aktif dan pelaku dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pelaksanaan program pembangunan adalah kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Peran penduduk sebagai objek dan subjek pembangunan saling terkait dan saling mendukung. Secara umum penduduk Kota Bontang didominasi oleh kelompok produktif. Kondisi ini merupakan hal yang baik dalam kontribusi pembangunan melalui partisipasi dalam kegiatan ekonomi baik di sektor formal maupun informal. Berikut kami sajikan gambaran komposisi penduduk Kota Bontang menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2024:

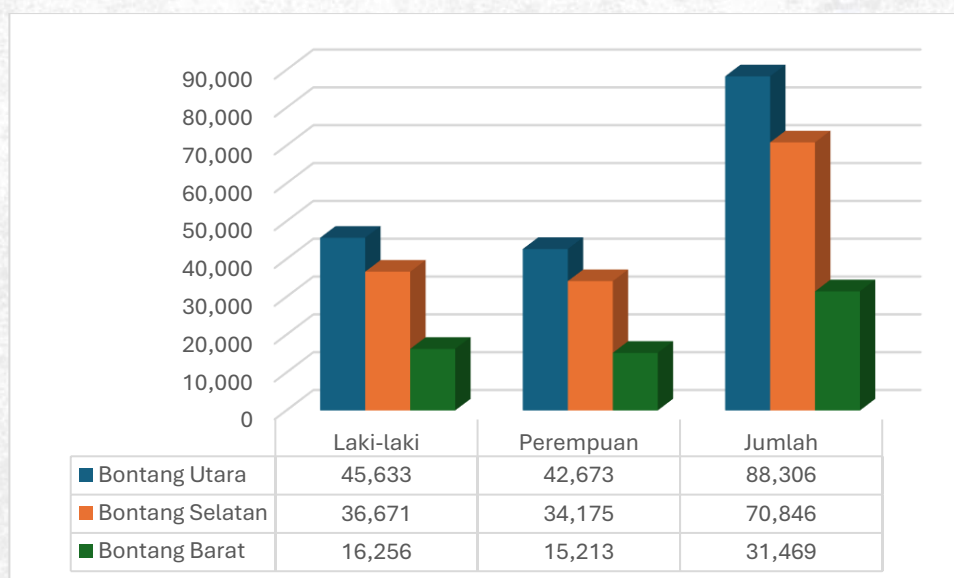
a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kota Bontang pada tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin meliputi penduduk laki sebanyak 98.560 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 92.061 jiwa dengan total keseluruhan sebanyak 190.621 jiwa. Sedangkan komposisi jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bontang Utara yaitu 88.306 jiwa, dan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Bontang Barat sebanyak 31.469 jiwa. Berikut kami sajikan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin per wilayah:

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	KK		L		P		L+P	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	Bontang Utara	28.589	46	45.633	46	42.673	46	88.306	46
2	Bontang Selatan	23.100	37	36.671	37	34.175	37	70.846	37
3	Bontang Barat	10.202	16	16.256	16	15.213	17	31.469	17
Jumlah		61.891	100	98.560	100	92.061	100	190.621	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, tahun 2024



Gambar 1.10 Jumlah Penduduk Kota Bontang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

b. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia

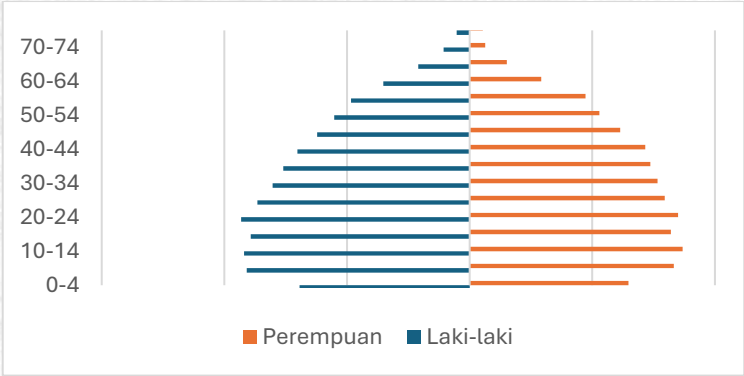
Komposisi penduduk Kota Bontang pada tahun 2024 berdasarkan kelompok usia didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu kelompok usia 15 sampai dengan 65 tahun memiliki jumlah terbesar yaitu 135.549 jiwa atau 71,10 persen, sedangkan kelompok penduduk usia kurang dari 15 tahun adalah sebanyak 48.699 jiwa atau 25,54 persen dan kelompok usia 65 tahun keatas sebanyak 6.373 jiwa atau 3,34 persen. Bagan piramida penduduk berdasarkan kelompok usia sebagaimana gambar di bawah, menggambarkan bentuk piramida penduduk dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bontang pertumbuhan penduduknya kecil disebabkan angka kelahiran dan kematian hampir mendekati seimbang.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Tahun 2024

NO	KELOMPOK USIA	L		P		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	0-4	6.938	7,04	6.469	7,03	13.407	7,03
2	5-9	9.089	9,22	8.323	9,04	17.412	9,13
3	10-14	9.197	9,33	8.683	9,43	17.880	9,38
4	15-19	8.929	9,06	8.201	8,91	17.130	8,99
5	20-24	9.318	9,45	8.498	9,23	17.816	9,35
6	25-29	8.655	8,78	7.954	8,64	16.609	8,71
7	30-34	8.038	8,16	7.657	8,32	15.695	8,23
8	35-39	7.594	7,70	7.367	8,00	14.961	7,85
9	40-44	7.021	7,12	7.157	7,77	14.178	7,44
10	45-49	6.214	6,30	6.135	6,66	12.349	6,48
11	50-54	5.525	5,61	5.291	5,75	10.816	5,67

12	55-59	4.836	4,91	4.724	5,13	9.560	5,02
13	60-64	3.521	3,57	2.914	3,17	6.435	3,38
14	65-69	2.100	2,13	1.516	1,65	3.616	1,90
15	70-74	1.058	1,07	639	0,69	1.697	0,89
16	>75	527	0,53	533	0,58	1.060	0,56
Jumlah		98.560	100,00	92.061	100,00	190.621	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tahun 2024



Gambar 1.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024

c. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok pendidikan

Pada tahun 2024, data jumlah penduduk Kota Bontang menurut jenjang pendidikan menunjukkan variasi yang cukup besar antara laku-laki dan perempuan di setiap tingkat pendidikan. Dengan total jumlah penduduk Kota Bontang sebesar 190.621 jiwa, yang terdiri dari 98.560 jiwa laki-laki dan perempuan. Berikut adalah rician distribusi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut:

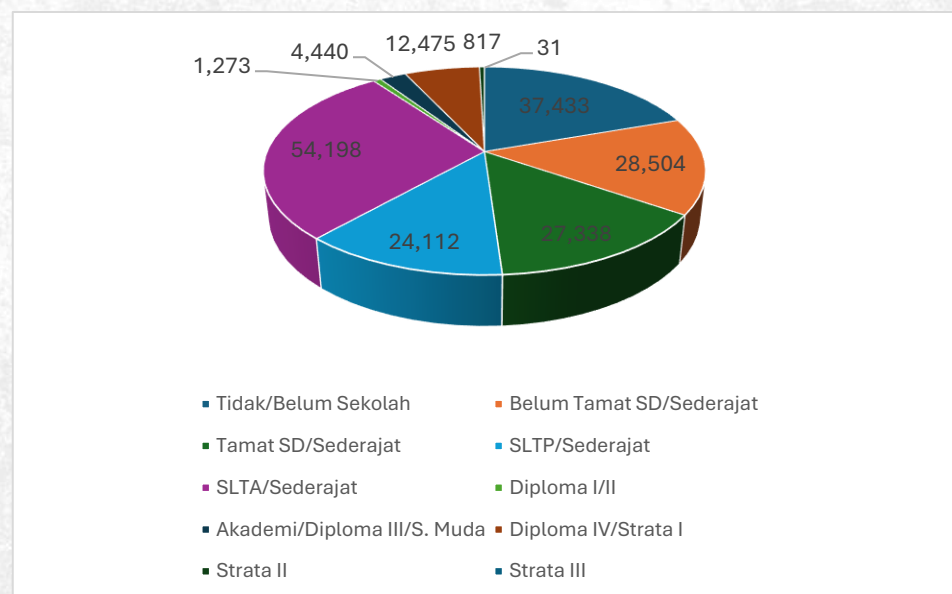
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2024

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	Tidak/Belum Sekolah	19.559	20	17.874	19	37.433	20
2	Belum Tamat SD/Sederajat	14.703	15	13.801	15	28.504	15
3	Tamat SD/Sederajat	13.104	13	14.234	15	27.338	14
4	SLTP/Sederajat	11.854	12	12.258	13	24.112	13
5	SLTA/Sederajat	30.909	31	23.289	25	54.198	28
6	Diploma I/II	494	1	779	1	1.273	0,66
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	1.931	2	2.509	3	4.440	2,3

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
8	Diploma IV/Strata I	5.536	6	6.939	8	12.475	6,5
9	Strata II	448	0	369	0	817	0,4
10	Strata III	22	0	9	0	31	0,01
Jumlah		98.560	100	92.061	100	190.621	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kota Bontang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan SLTA atau sederajat mencakup hampir 30% dari total penduduk, sedangkan pendidikan tinggi (Diploma, Strata I dan seterusnya) masih tercatat dalam jumlah yang lebih kecil. Meskipun terdapat kesenjangan dalam jumlah antara laki-laki dan perempuan pada beberapa jenjang, secara umum distribusi pendidikan di Kota Bontang menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan lebih lanjut terutama pada jenjang pendidikan tinggi dan pascasarjana.



Gambar 1.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berdasarkan catatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, mayoritas penduduk Kota Bontang menggantungkan hidup mereka pada mata pencaharian yang berada di sektor swasta. Hal ini memungkinkan terciptanya lapangan kerja baru jika produktivitas usaha meningkat. Komposisi penduduk Kota Bontang menurut jenis pekerjaan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2024

NO	PEKERJAAN	L		P		L+P	
		n	%	n	%	n	%
1	Belum/Tidak Bekerja	26.240	27	20.555	22	46.795	25
2	Mengurus Rumah Tangga	8	0	35.886	39	35.894	19
3	Pelajar/Mahasiswa	25.749	26	23.142	25	48.891	26
4	Pensiunan	740	1	64	0	804	0
5	Pegawai Negeri Sipil	1.569	2	1.812	2	3.381	2
6	Tentara Nasional Indonesia	323	0	3	0	326	0
7	Kepolisian Ri	364	0	26	0	390	0
8	Perdagangan	751	1	343	0	1.094	1
9	Petani/Pekebun	1.329	1	179	0	1.508	1
10	Peternak	27	0	2	0	29	0
11	Nelayan/Perikanan	2.269	2	38	0	2.307	1
12	Industri	43	0	5	0	48	0
13	Konstruksi	55	0	4	0	59	0
14	Transportasi	90	0	1	0	91	0
15	Karyawan Swasta	23.300	24	4.925	5	28.225	15
16	Karyawan Bumh	2.070	2	249	0	2.319	1
17	Karyawan Bumda	83	0	48	0	131	0
18	Karyawan Honorer	682	1	632	1	1.314	1
19	Buruh Harian Lepas	2.522	3	56	0	2.578	1
20	Buruh Tani/Perkebunan	304	0	28	0	332	0
21	Buruh Nelayan/Perikanan	194	0	11	0	205	0
22	Buruh Peternakan	7	0	2	0	9	0
23	Pembantu Rumah Tangga	1	0	119	0	120	0
24	Tukang Cukur	18	0	0	0	18	0
25	Tukang Listrik	31	0	0	0	31	0
26	Tukang Batu	258	0	0	0	258	0
27	Tukang Kayu	142	0	0	0	142	0
28	Tukang Sol Sepatu	5	0	0	0	5	0
29	Tukang Las/Pandai Besi	41	0	0	0	41	0
30	Tukang Jahit	61	0	33	0	94	0
31	Tukang Gigi	1	0	1	0	2	0
32	Penata Rias	5	0	13	0	18	0
33	Penata Busana	0	0	4	0	4	0

NO	PEKERJAAN	L		P		L+P	
		n	%	n	%	n	%
34	Penata Rambut	5	0	13	0	18	0
35	Mekanik	178	0	0	0	178	0
36	Seniman	24	0	1	0	25	0
37	Tabib	3	0	1	0	4	0
38	Paraji	2	0	0	0	2	0
39	Perancang Busana	0	0	3	0	3	0
40	Penterjemah	1	0	1	0	2	0
41	Imam Mesjid	18	0	0	0	18	0
42	Pendeta	44	0	10	0	54	0
43	Pastor	1	0	0	0	1	0
44	Wartawan	20	0	5	0	25	0
45	Ustadz/Mubaligh	48	0	8	0	56	0
46	Juru Masak	8	0	8	0	16	0
47	Promotor Acara	2	0	0	0	2	0
48	Anggota Dpr-Ri	0	0	0	0	0	0
49	Anggota Dpd	0	0	0	0	0	0
50	Anggota Bpk	0	0	0	0	0	0
51	Presiden	0	0	0	0	0	0
52	Wakil Presiden	0	0	0	0	0	0
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0	0	0	0
54	Anggota Kabinet/Kementerian	0	0	0	0	0	0
55	Duta Besar	0	0	0	0	0	0
56	Gubernur	0	0	0	0	0	0
57	Wakil Gubernur	0	0	0	0	0	0
58	Bupati	0	0	0	0	0	0
59	Wakil Bupati	0	0	0	0	0	0
60	Walikota	1	0	0	0	1	0
61	Wakil Walikota	0	0	1	0	1	0
62	Anggota Dprd Provinsi	0	0	0	0	0	0
63	Anggota Dprd Kabupaten/Kota	13	0	2	0	15	0
64	Dosen	31	0	14	0	45	0
65	Guru	447	0	1.143	1	1.590	1
66	Pilot	3	0	0	0	3	0
67	Pengacara	10	0	0	0	10	0
68	Notaris	2	0	11	0	13	0
69	Arsitek	4	0	2	0	6	0
70	Akuntan	3	0	5	0	8	0
71	Konsultan	18	0	2	0	20	0
72	Dokter	71	0	182	0	253	0
73	Bidan	0	0	140	0	140	0
74	Perawat	58	0	274	0	332	0
75	Apoteker	7	0	38	0	45	0
76	Psikiater/Psikolog	0	0	6	0	6	0
77	Penyiar Televisi	0	0	0	0	0	0
78	Penyiar Radio	3	0	1	0	4	0
79	Pelaut	51	0	0	0	51	0
80	Peneliti	2	0	0	0	2	0
81	Sopir	427	0	1	0	428	0
82	Pialang	1	0	0	0	1	0
83	Paranormal	0	0	0	0	0	0
84	Pedagang	460	0	201	0	661	0
85	Perangkat Desa	1	0	1	0	2	0
86	Kepala Desa	0	0	0	0	0	0

NO	PEKERJAAN	L		P		L+P	
		n	%	n	%	n	%
87	Biarawati	0	0	0	0	0	0
88	Wiraswasta	7.273	7	1.770	2	9.043	5
89	Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	29	0	32	0	61	0
90	Artis	0	0	0	0	0	0
91	Atlit	1	0	0	0	1	0
92	Cheff	0	0	0	0	0	0
93	Manajer	1	0	0	0	1	0
94	Tenaga Tata Usaha	0	0	0	0	0	0
95	Operator	0	0	0	0	0	0
96	Pekerja Pengolahan Kerajinan	0	0	0	0	0	0
97	Teknisi	0	0	0	0	0	0
98	Asisten Ahli	0	0	0	0	0	0
99	Pekerjaan Lainnya	7	0	4	0	11	0
Jumlah		98.560	100	92.061	100	190.621	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

e. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Secara keseluruhan, Kota Bontang memiliki jumlah penduduk 190.621 jiwa, dengan 98.560 jiwa laki-laki dan 92.061 jiwa perempuan. Agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut, diikuti oleh Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, sementara Konghuchu dan Aliran Kepercayaan tidak tercatat dalam komposisi agama di kota ini.

Berdasarkan analisis di bawah, dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Bontang mayoritas memeluk agama Islam mencakup 90% dari total populasi. Agama Kristen dan Katolik menyusul dengan jumlah yang lebih kecil namun tetap signifikan. Agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, Konghuchu, dan Aliran Kepercayaan memiliki jumlah pemeluk yang sangat terbatas, meskipun tetap memberikan kontribusi terhadap keragaman agama di kota ini.

Keberagaman agama ini mencerminkan pluralitas yang ada di Kota Bontang. Meskipun Islam mendominasi, komunitas-komunitas agama lainnya tetap hidup berdampingan dan turut berperan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Untuk itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat Kota Bontang untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, mengedepankan toleransi, dan memastikan semua kelompok agama dapat berkembang dalam harmoni.

Secara keseluruhan, distribusi agama di Kota Bontang menunjukkan tingkat homogenitas yang tinggi dalam hal agama mayoritas, namun tetap ada ruang untuk penguatan

nilai-nilai keberagaman dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2024

NO	AGAMA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	Islam	88.415	90	82.766	90	171.181	90
2	Kristen	8.133	8	7.513	8	15.646	8
3	Katholik	1.787	2	1.598	2	3.385	2
4	Hindu	154	0	127	0	281	0
5	Budha	71	0	57	0	128	0
6	Konghuchu	0	0	0	0	0	0
7	Aliran Kepercayaan	0	0	0	0	0	0
Jumlah		98.560	100	92.061	100	190.621	100

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Kota Bontang mengalami perubahan yang signifikan dalam laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Berdasarkan data dari BPS Kota Bontang, jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2021 tercatat 180,8 ribu jiwa dan meningkat terus sampai dengan tahun 2022 menjadi 183,2 ribu jiwa, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan positif yang cukup stabil.

Di tahun 2023 jumlah penduduk Kota Bontang mencapai 190,0 ribu jiwa, dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 2,06% pertahun, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2024 pada jumlah penduduk mengalami penurunan menjadi 188,3 ribu jiwa, namun laju pertumbuhannya tetap positif, meskipun mengalami perlambatan menjadi 1,37%. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain karena adanya mobilitasi penduduk dan perubahan dalam pola migrasi.

Kepadatan penduduk di Kota Bontang menunjukkan angka yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, kepadatan penduduk tercatat sebesar 1.117 jiwa per km². Angka ini terus naik pada tahun 2022 menjadi 1.131 jiwa per km², dan pada tahun 2023 mencapai 1.174 jiwa per km². Pada tahun 2024, meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk, kepadatan tetap relatif tinggi di angka 1.171 jiwa per km². Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kota Bontang semakin padat dengan penduduk, meskipun ada sedikit penurunan jumlah penduduk pada tahun 2024.

Rasio jenis kelamin penduduk Kota Bontang tetap menunjukkan angka yang hampir konsisten sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2021, rasio jenis kelamin adalah 107,8 laki-laki per 100 perempuan.

Angka ini sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 107,4, dan berlanjut turun menjadi 107,1 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, rasio ini kembali sedikit meningkat menjadi 107,3. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi kecil, proporsi laki-laki tetap lebih besar dibandingkan perempuan di Kota Bontang dalam periode tersebut.

Secara keseluruhan, Kota Bontang mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif stabil, meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2024. Laju pertumbuhan yang bervariasi dan perubahan kepadatan penduduk mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti urbanisasi, migrasi, dan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya dan pembangunan infrastruktur.

Perlu dicatat bahwa data pada tahun 2024 masih bersifat sementara, dengan tanda bintang (*) menunjukkan bahwa angka tersebut belum final dan dapat mengalami perubahan seiring waktu

Tabel 1.7 Perkembangan Penduduk Kota Bontang Tahun 2021-2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk (ribu)	180,8	183,2	190,0	188,3*
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun	0,81	1,28	2,06	1,37*
3.	Persentase Penduduk	100	100	100	100
4.	Kepadatan Penduduk per km persegi (km ²)	1.117	1.131	1.174	1.171*
5.	Rasio Jenis Kelamin penduduk	107,8	107,4	107,1	107,3*

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang dan BPS Kaltim

1.3.4 Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta dapat melayani masyarakat Kota Bontang. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggerakkan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bontang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2024 sebanyak 2.691 orang dan PPPK

sebanyak 854 orang. berdasarkan jumlah tersebut berikut uraian kondisi yang lebih rinci PNS Pemerintah Kota Bontang berdasarkan tingkat pendidikan, golongan dan jabatan.

a. PNS dan PPPK Kota Bontang Menurut Tingkat Pendidikan

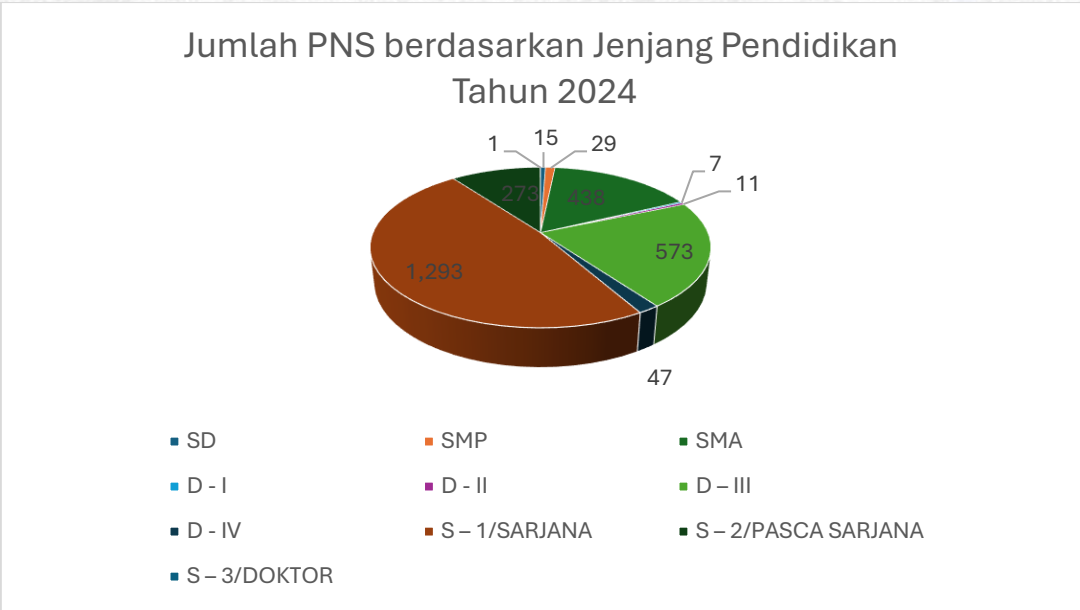
Secara keseluruhan, komposisi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bontang menunjukkan adanya keberagaman yang cukup besar dalam hal tingkat pendidikan, baik untuk PNS maupun PPPK. PNS dengan tingkat pendidikan Sarjana (S-1) merupakan kelompok terbesar, mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memiliki tenaga kerja dengan kompetensi yang lebih tinggi dalam menjalankan berbagai tugas pemerintahan. Sementara itu, PPPK yang juga memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi, lebih banyak diisi oleh mereka yang memiliki pendidikan Sarjana dan Diploma, menggambarkan pentingnya keberadaan tenaga kontrak dengan keterampilan teknis tertentu dalam menunjang pelayanan publik.

Keberagaman tingkat pendidikan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bontang berusaha menciptakan komposisi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Pembagian ini juga menjadi dasar untuk merancang kebijakan pengembangan karier dan pelatihan bagi PNS dan PPPK, guna meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. Data tersebut dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 1.8 Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang periode 31 Desember 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD	15
2	SMP	29
3	SMA	438
4	D - I	7
5	D - II	11
6	D - III	573
7	D - IV	47
8	S - 1/SARJANA	1.293
9	S - 2/PASCA SARJANA	273
10	S - 3/DOKTOR	1
Total		2.691

Sumber : BKPSDM Kota Bontang, 2024

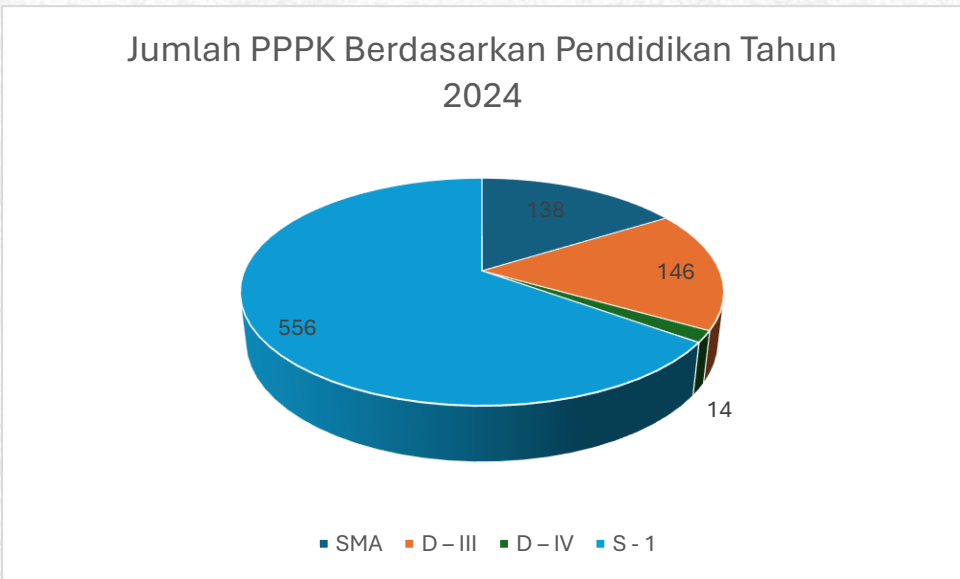


Gambar 1.13 Jumlah PNS Kota Bontang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

Tabel 1.8 Data PPPK Berdasarkan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang periode 31 Desember 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SMA	138
2	D – III	146
3	D – IV	14
4	S - 1	556
Total		854

Sumber : BKPSDM Kota Bontang, 2024



Gambar 1.14 Jumlah PPPK Kota Bontang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

b. PNS Kota Bontang Berdasarkan Jenis Jabatan

Jumlah total Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang mencapai 2.691 orang. Jumlah ini terbagi ke dalam tiga jenis jabatan utama, yaitu:

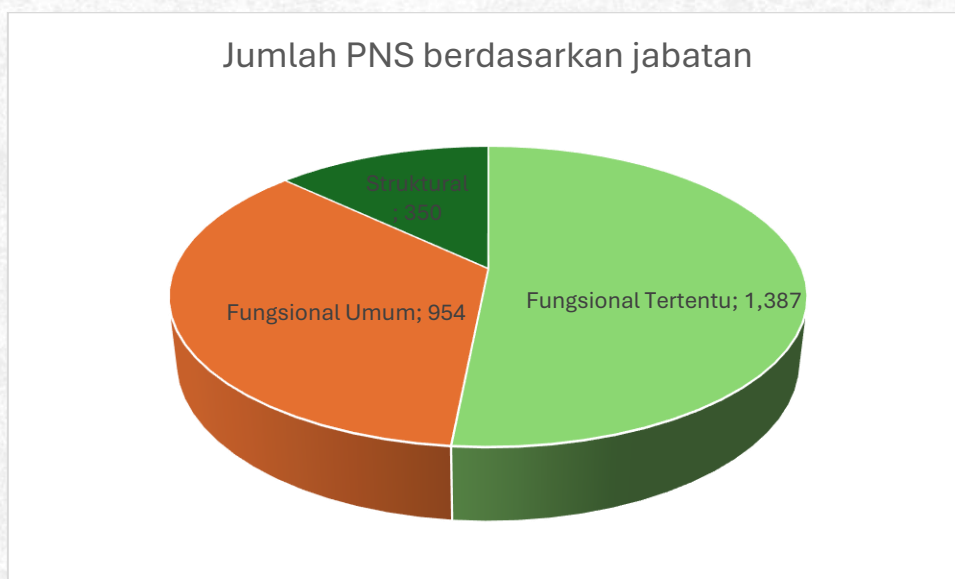
1. Jabatan Fungsional Tertentu yang memiliki jumlah terbanyak, yaitu 1.387 orang.
2. Jabatan Fungsional Umum dengan jumlah 954 orang.
3. Jabatan Struktural, yang merupakan kelompok terkecil yaitu sebanyak 350 orang.

Dengan distribusi PNS yang beragam berdasarkan jenis jabatan, Pemerintah Kota Bontang memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan administratif, pengelolaan, dan keahlian khusus dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.9 PNS Berdasarkan Jenis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang periode 31 Desember 2024

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Fungsional Tertentu	1.387
2	Fungsional Umum	954
3	Struktural	350
Total		2.691

Sumber : BKPSDM Kota Bontang, 2024



Gambar 1.15 Jumlah PNS Kota Bontang Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

c. PNS Kota Bontang Berdasarkan Golongan

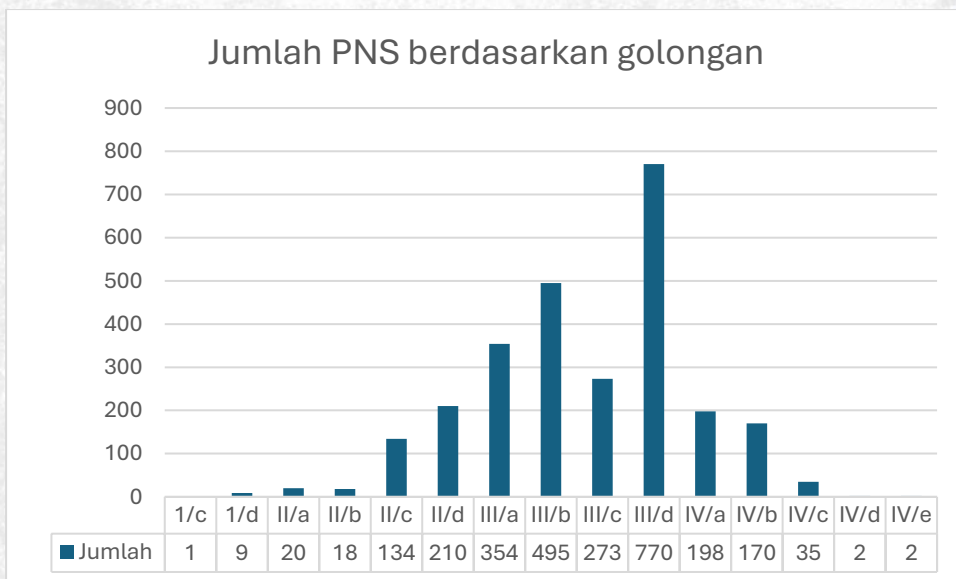
PNS berdasarkan golongan ini mencerminkan keragaman jenjang karier dan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bontang. Dengan kombinasi dari setiap golongan, pemerintah dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara efektif, baik yang bersifat teknis, administratif, maupun pengambilan kebijakan strategis.

Dari data dibawah ini, dapat dilihat bahwa mayoritas PNS berada pada golongan III, yang menunjukkan dominasi pegawai berpendidikan sarjana dengan tanggung jawab profesional yang lebih besar. Sementara itu, golongan IV yang berisi pejabat senior memberikan dukungan pada pengambilan keputusan strategis dalam pemerintahan. Kombinasi dari setiap golongan ini memberikan keseimbangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di Kota Bontang secara optimal.

Tabel 1.10 PNS Berdasarkan Golongan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang periode 31 Desember 2024

No	Golongan	Jumlah
1	1/c	1
2	1/d	9
3	II/a	20
4	II/b	18
5	II/c	134
6	II/d	210
7	III/a	354
8	III/b	495
9	III/c	273
10	III/d	770
11	IV/a	198
12	IV/b	170
13	IV/c	35
14	IV/d	2
15	IV/e	2
Total		2.691

Sumber : BKPSDM Kota Bontang, 2024



Gambar 1.16 Jumlah PNS Kota Bontang Berdasarkan Golongan Tahun 2024

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Kota Bontang di tahun anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp. 2.780.738.111.584,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 2.775.765.014.283,12 atau 99,82%. Pendapatan Daerah Kota Bontang berasal dari 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Pendapatan Transfer; 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	LEBIH / KURANG
4	PENDAPATAN DAERAH	2.780.738.111.584,00	2.775.765.014.283,12	99,82	(4.973.097.300,88
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	296.329.967.393,00	283.791.959.740,74	95,77	(12.538.007.652,26
4.1.01	Pajak Daerah	148.640.154.163,00	135.853.652.224,86	91,40	(12.786.501.938,14
4.1.02	Retribusi Daerah	126.512.187.027,00	107.784.349.844,03	85,20	(18.727.837.182,97
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.075.813.311,00	4.137.180.321,93	101,51	61.367.010,93
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.101.812.892,00	36.016.777.349,92	210,60	18.914.964.457,92
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	296.329.967.393,00	283.791.959.740,74	95,77	(12.538.007.652,26
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.456.035.969.439,00	2.423.828.810.020,00	98,69	(32.207.159.419,00

4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.084.178.499.439,00	2.062.508.727.856,00	98,96	(21.669.771.583,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	371.857.470.000,00	361.320.082.164,00	97,17	(10.537.387.836,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.456.035.969.439,00	2.423.828.810.020,00	95,77	(32.207.159.419,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.372.174.752,00	68.144.244.522,38	240,18	39.772.069.770,38
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.684.139.648,00	2.296.338.156,60	136,35	612.198.508,60
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.688.035.104,00	65.847.906.365,78	246,73	39.159.871.261,78
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.372.174.752,00	68.144.244.522,38	240,18	39.772.069.770,38
	JUMLAH PENDAPATAN	2.780.738.111.584,00	2.775.765.014.283,12	99,82	(4.973.097.300,88

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024 (unaudited)

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah Kota Bontang di tahun anggaran 2024 yang dialokasi sebesar Rp3.360.937.408.720,00 dapat teralisasi sebesar Rp3.085.127.625..667,71 atau 91,79%. Dalam rangka merealisasikan arah kebijakan belanja yang telah dirumuskan dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 secara garis besar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	LEBIH / KURANG
5	BELANJA DAERAH	3.360.937.408.720,00	3.085.127.625.667,71	91,79	(275.809.783.052,29
5.1	BELANJA OPERASI	2.198.094.265.669,42	2.035.815.357.640,71	92,62	(162.278.908.028,71
5.1.01	Belanja Pegawai	736.620.252.973,00	710.612.568.431,00	96,47	(26.007.684.542,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.360.664.529.582,42	1.244.094.229.313,71	91,43	(116.570.300.268,71
5.1.05	Belanja Hibah	99.609.483.114,00	79.908.959.896,00	80,22	(19.700.523.218,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.200.000.000,00	1.199.600.000,00	99,97	(400.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.198.094.265.669,42	2.035.815.357.640,71	92,62	(162.278.908.028,71
5.2	BELANJA MODAL	1.159.209.326.694,58	1.048.710.369.969,00	90,47	(110.498.956.725,58

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	LEBIH / KURANG
5.2.01	Belanja Modal Tanah	62.331.818.000,00	5.263.015.170,00	8,44	(57.068.802.830,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	254.043.471.610,58	241.446.564.347,00	95,04	(12.596.907.263,58
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	272.933.938.254,00	259.014.974.742,00	94,90	(13.918.963.512,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	562.627.007.183,00	537.704.265.369,00	95,57	(24.922.741.814,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.335.933.187,00	3.681.426.525,00	68,99	(1.654.506.662,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.937.158.460,00	1.600.123.816,00	82,60	(337.034.644,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.159.209.326.694,58	1.048.710.369.969,00	90,47	(110.498.956.725,58
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.633.816.356,00	601.898.058,00	16,56	(3.031.918.298,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.633.816.356,00	601.898.058,00	16,56	(3.031.918.298,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	3.633.816.356,00	601.898.058,00	16,56	(3.031.918.298,00
	JUMLAH BELANJA	3.360.937.408.720,00	3.085.127.625.667,71	91,79	(275.809.783.052,29

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024 (unaudited)

1.3.7 Realisasi Pembiayaan menurut jenis pembiayaan

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah.

Pembiayaan daerah Kota Bontang di tahun anggaran 2024 berupa Penerimaan Pembiayaan Daerah dialokasi sebesar Rp580.260.697.136,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp(25.000.000.000) atau (4,31)%. Pencapaian kinerja keuangan terkait dengan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.13 Realisasi Pemkomingbiayaan Daerah Kota Bontang

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	580.260.697.136,00	(25.000.000.000,00)	(4,31)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	605.260.697.136,00	0,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	605.260.697.136,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	605.260.697.136,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	580.260.697.136,00	(25.000.000.000,00)	(4,31)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	61.400.000,00	(334.362.611.384,59)	

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024 (unaudited)

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.



Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah harus dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien serta dilaksanakan melalui keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Manajemen keuangan daerah merupakan aspek penting dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Oleh karena itu, proyeksi keuangan daerah yang akurat dan cermat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Kebijakan yang dihasilkan harus akurat, cermat, dan tepat sasaran. Sukses atau kegagalan pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik.

Perubahan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.

Berdasarkan beberapa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal pada penganggaran dan belanja Kota Bontang tahun 2024, maka perlu dilakukan perubahan dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan.

2.1 Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sebagaimana tahun sebelumnya masih diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatn daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan pendapatan transfer termasuk pendapatan transfer pemerintah pusat. Demikian juga dengan upaya optimalisasi pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan

berusaha untuk mendapatkan dana hibah, bantuan keuangan dan lain-lain dari pusat maupun provinsi.

Dalam menganggarkan rencana pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disusun secara nasional dengan mempertimbangkan kekayaan daerah yang disertakan serta memperhatikan fungsi penyertaan modal. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu mengupayakan pendayagunaan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dari apa yang telah ditetapkan pada APBD tahun 2024. Dibeberapa sumber penerimaan pendapatan daerah terjadi penambahan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yaitu berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan akan ditekankan pada pengoptimalan pencapaian target yang sudah ditetapkan sebelumnya yang dituangkan dalam APBD tahun 2024.

Kebijakan umum dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
 - a. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi;
 - b. Melakukan kajian terhadap potensi pendapatan asli daerah yang belum optimal
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas dan pengembangan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
 - d. Pembenahan manajemen penerimaan PAD terutama fokus pada pembenahan data wajib pajak dan objek pajak, kemudahan pembayaran pajak, peningkatan SDM terutama pemeriksa pajak dan appraisal/penilai objek pajak;
 - e. Meningkatkan potensi penerimaan PBB dan BPHTB melalui pendataan ulang objek pajak dan penilaian nilai NJOP;
 - f. Optimalisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai kewenangan yang diatur di dalamnya;
 - g. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

2. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah;
3. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil laba deviden terutama dari PDAM, Perusda AUJ, dan PT BME, serta Bank KaltimTara;
4. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah (Pemerintah Provinsi).

Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, terutama melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2024, sebagaimana dalam APBD sebelum perubahan berjumlah sebesar Rp2.379.581.074.122,00 Setelah mengalami perubahan jumlah pendapatan Daerah Kota Bontang berubah menjadi Rp2.780.738.111.584,00 jumlah tersebut bertambah sebesar Rp401.157.037.462,00. Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.1 Rincian Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2024

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	245.000.000.000	296.329.967.393	51.329.967.393
2	Pendapatan Transfer	2.124.425.955.595	2.456.035.969.439	331.610.013.844
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.155.118.527	28.372.174.752	18.217.056.225
Total		2.379.581.074.122	2.780.738.111.584	401.157.037.462

Sumber: BPKAD, LRA per 31 Desember 2024 (unaudited)

2.1.1 Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2024 ini, Kota Bontang mengalami perubahan signifikan dalam Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang tercatat dalam tabel 2.2 perubahan ini mencakup berbagai komponen pendapatan daerah yang mengalami peningkatan baik dalam hal nominal maupun proporsi total PAD. Berdasarkan data yang disajikan, total PAD Kota Bontang mengalami penambahan sebesar Rp51.329.967.393, dari sebelumnya Rp245.000.000.000 menjadi Rp296.329.967.393, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak Daerah, yang merupakan salah satu sumber utama PAD, mengalami kenaikan sebesar Rp1.794.865.997, dari Rp146.845.288.166 menjadi Rp148.640.154.163. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan dalam sektor perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan Daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah mencatat peningkatan yang signifikan, yakni sebesar Rp40.014.332.459. Sebelumnya, anggaran retribusi daerah berada pada angka Rp 86.497.854.568, dan setelah perubahan, meningkat menjadi Rp126.512.187.027. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya yang lebih besar dalam memaksimalkan potensi retribusi daerah yang diterima dari berbagai sektor pelayanan publik dan pengelolaan fasilitas daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada komponen ini, tidak terjadi perubahan. Anggaran untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap sebesar Rp4.075.813.311, yang tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Ini menunjukkan stabilitas dalam pengelolaan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang tetap dapat memberikan kontribusi yang konsisten terhadap pendapatan asli daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mencatatkan kenaikan terbesar, yakni Rp9.520.768.937, dari Rp7.581.043.955 menjadi Rp17.101.812.892. Peningkatan yang signifikan ini mencerminkan adanya sumber pendapatan baru atau peningkatan dalam penerimaan dari sumber lain yang sah, yang memberi dampak positif terhadap total pendapatan daerah.

Dengan total perubahan sebesar Rp51.329.967.393, perubahan anggaran ini mencerminkan adanya upaya optimasi dan perbaikan dalam pengelolaan sumber daya pendapatan daerah. Peningkatan yang tercatat di sektor retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah memberikan gambaran bahwa Kota Bontang sedang berusaha untuk memaksimalkan potensi PAD-nya untuk mendukung Pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rician perubahan

anggaran pendapatan asli Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2024

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	Pendapatan Pajak Daerah	146.845.288.166	148.640.154.163	1.794.865.997
2	Retribusi Daerah	86.497.854.568	126.512.187.027	40.014.332.459
3	Hasil PengelolaanKekeyaan Daerah yang Dipisahkan	4.075.813.311	4.075.813.311	0
4	Lain-lain pendaptan asli Daerah yang sah	7.581.043.955	17.101.812.892	9.520.768.937
Total		245.000.000.000	296.329.967.393	51.329.967.393

Sumber: BPKAD, LRA per 31 Desember 2024 (unaudited)

2.1.2 Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Transfer

Kota Bontang mengalami perubahan yang cukup besar dalam anggaran pendapatan transfer, yang terdiri dari dua komponen utama: pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian dan perencanaan ulang untuk memastikan bahwa sumber daya yang diterima daerah dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan kota.

Pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami kenaikan yang cukup besar, yakni sebesar Rp331.610.013.844, sedangkan pagu sebelumnya Rp1.752.568.485.595 menjadi Rp2.084.178.499.439. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan alokasi dana dari pusat, yang dapat berasal dari beberapa sumber, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), atau transfer lain yang ditujukan untuk mendukung pembangunan daerah. Penambahan anggaran ini sangat penting bagi Kota Bontang karena memberikan ruang lebih besar untuk melaksanakan program-program prioritas yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah, baik dalam hal infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun sektor-sektor penting lainnya.

Pada komponen pendapatan transfer antar daerah, tidak terjadi perubahan. Anggaran tetap sebesar Rp371.857.470.000, yang menunjukkan stabilitas dalam alokasi dana antar daerah.

Pendapatan transfer antar daerah ini, yang umumnya berupa dana bagi hasil atau bantuan antar pemerintah daerah, tetap menjadi sumber yang penting untuk mendukung kerjasama regional dan pengembangan potensi bersama antar daerah yang saling terkait. Total Perubahan Anggaran Pendapatan Transfer Secara keseluruhan, total anggaran pendapatan transfer pada Kota Bontang mengalami peningkatan yang cukup besar yakni Rp331.610.013.844, dari Rp2.124.425.955.595 menjadi Rp2.456.035.969.439. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung daerah dalam melaksanakan pembangunan yang merata dan inklusif. Dana yang lebih besar ini memberikan fleksibilitas lebih bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dampak dari Perubahan Anggaran Pendapatan Transfer Penambahan anggaran pendapatan transfer, khususnya yang berasal dari pemerintah pusat, memberikan dampak positif bagi pemerintah Kota Bontang. Dengan adanya tambahan dana tersebut, Kota Bontang dapat meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mendesak dan strategis, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta program-program sosial yang langsung berdampak pada kesejahteraan Masyarakat.

Perubahan anggaran pendapatan transfer ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan Kota Bontang. Penambahan alokasi dana ini diharapkan dapat memperkuat upaya daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan rincian perubahan anggaran pendapatan transfer berikut.

Tabel 2.3 Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Transfer Kota Bontang Tahun 2024

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.752.568.485.595	2.084.178.499.439	331.610.013.844
2	Pendapatan Transfer	371.857.470.000	371.857.470.000	0

	Antar Daerah			
	Total	2.124.425.955.595	2.456.035.969.439	331.610.013.844

Sumber: BPKAD, LRA per 31 Desember 2024 (unaudited)

2.1.3 Perubahan Penjabaran Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada perubahan anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah Kota Bontang di tahun 2024 ini mengalami perubahan yang cukup besar, hal ini mencerminkan bahwa langkah strategis Kota Bontang dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatan Daerah. Hal ini diharapkan akan menciptakan Pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta dapat memberikan manfaat langsung bagi Masyarakat. Pada lain-lain pendapatan yang sah Kota Bontang di peroleh dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data tabel dibawah ini yang mengalami penambahan pendapatn di lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp18.217.056.225,00 dari sebelumnya Rp10.155.118.527 menjadi Rp28.372.174.752 sedangkan untuk pendapatan hibah tidak ada mengalami perubahan anggaran, masih dengan anggaran sebesar Rp1.684.139.648.

Pada pendapatan hibah, tidak terjadi perubahan. Anggaran tetap berada pada angka Rp1.684.139.648, yang menunjukkan bahwa Kota Bontang tetap menerima hibah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hibah ini bisa berasal dari lembaga non-pemerintah, pihak swasta, maupun pemerintah yang bertujuan untuk mendukung berbagai program pembangunan di Kota Bontang. Stabilitas pada komponen ini menunjukkan bahwa Kota Bontang berhasil menjaga sumber pendapatan hibah yang terjaga dan tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Pada lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengalami penambahan yang cukup besar, yakni sebesar Rp18.217.056.225, dengan pagu penambahan sebesar Rp8.470.978.879 menjadi Rp26.688.035.104.

Peningkatan yang besar ini mencerminkan adanya sumber pendapatan baru atau peningkatan dalam penerimaan dari sumber-sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan tersebut bisa berasal dari berbagai sektor, seperti

hasil pengelolaan kekayaan daerah, pendapatan dari kewajiban peraturan daerah, atau kontribusi dari sektor lain yang belum tergali secara optimal pada periode sebelumnya.

Total Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Secara keseluruhan, total perubahan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp18.217.056.225, dari pagu anggaran sebesar Rp10.155.118.527 menjadi Rp28.372.174.752. Penambahan pagu anggaran ini berkontribusi besar terhadap total pendapatan daerah Kota Bontang dan memberikan tambahan anggaran yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan, sosial, dan pelayanan publik.

Dampak dari Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Peningkatan pada komponen ini memberikan dampak positif yang besar bagi keuangan daerah. Dengan adanya penambahan anggaran yang cukup signifikan, pemerintah Kota Bontang dapat memperluas ruang gerak dalam melaksanakan pembangunan dan program-program yang lebih beragam. Pendapatan tambahan ini juga memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam menggali potensi sumber pendapatan lain yang sah, serta memperkuat daya saing daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, perubahan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ini mencerminkan langkah strategis Kota Bontang dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah. Dengan adanya tambahan yang cukup besar dalam pos ini, diharapkan akan tercipta pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Bontang. Berikut kami sajikan rincian perubahan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Tabel 2.4 Rincian Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bontang Tahun 2024

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	Pendapatan Hibah	1.684.139.648	1.684.139.648	0
2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	8.470.978.879	26.688.035.104	18.217.056.225
Total		10.155.118.527	28.372.174.752	18.217.056.225

Sumber: BPKAD, LRA per 31 Desember 2024 (unaudited)

2.2 Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non dasar, pilihan serta penunjang yang ditetapkan dengan perundangan-undangan. Dengan berpedomanan pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan penganggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Dengan penyelarasan prioritas dan sasaran kebijakan nasional, serta prioritas pembangunan daerah Kota Bontang, maka dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun 2024, sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola sesuai dengan anggaran berbasis kinerja dalam rangka mendukung capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026;
2. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan tahun 2024 yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (*sustained*), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif;
3. Kebijakan belanja pada APBD Kota Bontang digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program prioritas sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2024 secara efektif dan efisien;
4. Belanja Daerah harus mampu memenuhi program-program yang diarahkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah.

Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2024, Sebagaimana dalam APBD sebelum perubahan berjumlah sebesar Rp2.840.317.411.456. Setelah mengalami perubahan jumlah Belanja Daerah Kota Bontang berubah menjadi Rp3.360.937.408.720. Jumlah bertambah sebesar

Rp520.619.997.264. Rincian Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Daerah dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5 Rincian Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2024

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	Belanja Operasi	1.875.645.227.283	2.198.094.265.669,42	322.449.038.386,42
2	Belanja Modal	958.172.184.173	1.159.209.326.694,58	201.037.142.521,58
3	Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000	3.633.816.356	(2.866.183.644)
Total		2.840.317.411.456	3.360.937.408.720	520.619.997.264

Sumber: BPKAD, LRA per 31 Desember 2024 (unaudited)

2.2.1 Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Operasi

Kota Bontang mengalami perubahan yang signifikan dalam penjabaran anggaran belanja operasi. Penyesuaian anggaran ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan daerah. Secara keseluruhan, total belanja operasi Kota Bontang mengalami peningkatan sebesar Rp322.449.038.386,42, dari sebelumnya Rp1.875.645.227.283 menjadi Rp2.198.094.265.669,42 .

1. Belanja pegawai

Pada Belanja Pegawai terjadi penurunan anggaran sebesar Rp40.661.857.506,00 dari pagu sebelum perubahan dari Rp777.282.110.479,00 menjadi Rp736.620.252.973,00 Penurunan ini mencerminkan adanya efisiensi dalam pengelolaan belanja pegawai, yang mungkin disebabkan oleh adanya kebijakan pengurangan jumlah pegawai atau penyesuaian terhadap kebutuhan pengeluaran untuk gaji dan tunjangan. Meskipun terdapat penurunan, belanja pegawai tetap menjadi bagian yang penting dalam anggaran operasi, mengingat peran vital aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan berbagai fungsi dan pelayanan publik.

2. Belanja barang dan jasa

Belanja Barang dan Jasa bertambah sebesar Rp349.982.562.075,42, dari Rp1.010.681.967.507 menjadi Rp1.360.664.529.582,42. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja pada sektor yang langsung berhubungan dengan pelayanan publik, seperti pengadaan barang, perawatan fasilitas, serta pembelian barang dan jasa untuk mendukung program-program pembangunan. Peningkatan anggaran pada pos ini menunjukkan prioritas yang lebih besar terhadap kualitas

layanan publik, seperti pengadaan peralatan medis, infrastruktur dasar, dan kebutuhan operasional lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi kinerja pemerintahan.

3. Belanja Hibah

Pada komponen belanja hibah, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp12.928.333.817,00 dari pagu anggaran Rp86.681.149.297,00 menjadi Rp99.609.483.114,00. Hibah ini umumnya diberikan kepada lembaga atau organisasi non-pemerintah yang melaksanakan program-program sosial dan pembangunan, atau kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah Kota Bontang dalam mendukung kegiatan sosial yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup.

4. Belanja Bantuan Sosial

Pada belanja bantuan sosial ada kenaikan sebesar Rp200.000.000,00 dari Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp1.200.000.000,00. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan dukungan terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam bentuk bantuan untuk kesejahteraan sosial. Alokasi lebih besar pada sektor ini berpotensi untuk membantu lebih banyak masyarakat yang terdampak oleh ketidakmampuan ekonomi, bencana, atau kondisi darurat lainnya.

Dampak Positif dari Perubahan Belanja anggaran belanja operasi ini bertujuan untuk memberikan dampak positif dalam berbagai aspek pelayanan dan pembangunan daerah. Peningkatan pada belanja barang dan jasa, hibah, dan bantuan sosial menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bontang berfokus pada kebutuhan mendesak masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Kenaikan anggaran untuk barang dan jasa akan memperbaiki kualitas dan jangkauan layanan publik, sementara tambahan hibah dan bantuan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Dengan penyesuaian anggaran ini, diharapkan pemerintahan Kota Bontang dapat memberikan layanan yang lebih baik, efisien, dan tepat sasaran, serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, perubahan ini mencerminkan langkah strategis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan anggaran untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan warganya.

Tabel 2.6 Rincian Penjabaran Belanja Operasi Kota Bontang Tahun 2024

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	Belanja Pegawai	777.282.110.479	736.620.252.973	(40.661.857.506)
2	Belanja Barang dan Jasa	1.010.681.967.507	1.360.664.529.582,42	349.982.562.075,42
3	Belanja Hibah	86.681.149.297	99.609.483.114	12.928.333.817
4	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000	1.200.000.000	200.000.000
Total		1.875.645.227.283	2.198.094.265.669,42	322.449.038.386,42

Sumber: BPKAD, LRA per 31 Desember 2024 (unaudited)

2.2.2 Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Modal

Pada tahun 2024 Kota Bontang mengalami perubahan dalam penjabaran anggaran belanja modal, yang mencakup pengeluaran untuk investasi jangka panjang dalam bentuk aset tetap dan pembangunan infrastruktur. Penambahan anggaran belanja modal sebesar Rp201.037.142.521,58, dari anggaran murni menjadi sebesar Rp958.172.184.173,00 menjadi Rp1.159.209.326.694,58, maka mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah rinciannya:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp24.848.916.000,00, dari Rp37.482.902.000,00 menjadi Rp 62.331.818.000,00. Peningkatan ini bertujuan untuk memperluas pengadaan lahan yang diperlukan dalam mendukung pembangunan berbagai proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan jalan, gedung, atau fasilitas publik lainnya. Belanja tanah ini merupakan bagian penting dalam menciptakan ruang untuk pengembangan wilayah dan mendukung berbagai kegiatan pembangunan jangka panjang.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Komponen belanja modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp94.170.203.788,58 dari Rp159.873.267.822,00 menjadi Rp254.043.471.610,58. Peningkatan ini mencerminkan alokasi yang lebih besar untuk pembelian dan pengadaan peralatan serta mesin yang dibutuhkan untuk mendukung operasional pemerintahan dan pembangunan. Peralatan dan mesin ini dapat mencakup berbagai jenis alat berat, kendaraan operasional, hingga teknologi informasi yang akan

meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik serta mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada pos belanja modal gedung dan bangunan, terdapat penambahan sebesar Rp 9.876.142.058,00, dari Rp 263.057.796.196,00 menjadi Rp 272.933.938.254,00. Peningkatan anggaran ini digunakan untuk pembangunan dan perawatan gedung-gedung pemerintahan, fasilitas umum, serta bangunan yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial di daerah. Belanja ini juga mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas gedung-gedung yang sudah ada agar lebih layak dan efisien digunakan.

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp 69.444.547.485,00, dari Rp 493.182.459.698,00 menjadi Rp 562.627.007.183,00. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bontang mengutamakan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi dan jaringan air, yang sangat vital untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang, serta keberlanjutan sektor pertanian melalui irigasi yang lebih baik. Pembangunan jalan dan jaringan ini akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mengurangi kemacetan dan kerusakan jalan.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya, terjadi penambahan sebesar Rp 2.316.696.202,00, dari Rp 3.019.236.985,00 menjadi Rp 5.335.933.187,00. Belanja ini digunakan untuk pengadaan aset tetap lainnya yang tidak termasuk dalam kategori tanah, bangunan, atau peralatan, seperti sarana transportasi, fasilitas olahraga, dan lainnya yang mendukung kegiatan pemerintahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Di kategori belanja modal aset lainnya, anggaran juga meningkat sebesar Rp 380.636.988,00, dari Rp 1.556.521.472,00 menjadi Rp 1.937.158.460,00. Alokasi ini digunakan untuk pengadaan aset lain yang dibutuhkan untuk mendukung operasional pemerintahan daerah. Meskipun nominalnya lebih kecil dibandingkan dengan komponen lainnya, namun belanja modal untuk aset ini

tetap memiliki peran penting dalam memperkuat infrastruktur pendukung pemerintah daerah.

Total pada Perubahan Belanja Modal Secara keseluruhan, total anggaran belanja modal mengalami peningkatan sebesar Rp201.037.142.521,58, dan pagu murni Rp958.172.184.173,00 menjadi Rp1.159.209.326.694,58. Penambahan ini memberikan ruang lebih besar bagi Kota Bontang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dampak Positif dari Perubahan Belanja Modal Peningkatan anggaran belanja modal ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan infrastruktur di Kota Bontang. Dengan alokasi yang lebih besar pada pembangunan jalan, gedung, peralatan, dan mesin, diharapkan dapat tercipta infrastruktur yang lebih baik dan lebih mendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur ini akan mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan daya saing ekonomi, serta membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perubahan dalam anggaran belanja modal ini mencerminkan strategi pemerintah Kota Bontang untuk mempercepat proses pembangunan dan memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, serta dapat menunjang kegiatan perekonomian yang lebih berkelanjutan di masa depan.

**Tabel 2.7 Rincian Penjabaran Belanja Modal
Kota Bontang Tahun 2024**

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	Belanja Modal Tanah	37.482.902.000,00	62.331.818.000,00	24.848.916.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.873.267.822,00	254.043.471.610,58	94.170.203.788,58
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	263.057.796.196,00	272.933.938.254,00	9.876.142.058,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	493.182.459.698,00	562.627.007.183,00	69.444.547.485,00

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.019.236.985,00	5.335.933.187,00	2.316.696.202,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.556.521.472,00	1.937.158.460,00	380.636.988,00
Total		958.172.184.173,00	1.159.209.326.694,58	201.037.142.521,58

Sumber: BPKAD, LRA per 31 Desember 2024 (unaudited)

2.2.3 Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga sebelumnya dianggarkan sebesar Rp6.500.000.000,00. Namun dalam perubahan anggaran, nilai alokasi ini mengalami penyesuaian menjadi Rp3.633.816.356,00. Penyesuaian tersebut mencerminkan penurunan anggaran sebesar Rp2.866.183.644,00. Penurunan ini dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran serta prioritas kebutuhan yang lebih mendesak dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bontang tahun 2024 diukur dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta dari pencapaian kinerja masing-masing kegiatan pada setiap urusan.



Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah melahirkan desentralisasi yang mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan dengan pemerintah daerah. Makna yang terkandung dalam asas desentralisasi bahwa penyelenggaraan urusan umum pemerintahan oleh pemerintah daerah terkait otonomi mengatur dan otonomi mengurus urusan pemerintahan.

Pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bontang tahun 2024 diukur dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta dari pencapaian kinerja masing-masing kegiatan pada setiap urusan. Urusan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah atau yang disebut dengan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

3.1 Evaluasi capaian tujuan dan sasaran pembangunan 2024

Evaluasi capaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang Tahun 2024 digunakan sebagai refleksi dan pengukur sejauh mana keberhasilan atau capaian dari program yang tertuang pada RPJMD 2021-2026. Adapun hasil capaian RPJMD tahun 2024 masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian tujuan dan sasaran Kota Bontang Tahun 2024

TUJUAN		INDIKATOR	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Realisasi			2024			
							2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT CAPAIAN
Misi 1: Kota Bontang yang HARMONI Melalui Pemantapan SInergi dan Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pembangunan													
T.1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah				Indeks	N/A	N/A	N/A	82	NA	N/A	N/A
			S.1	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	66,2	65,38	71,21	BB (72,41)	80,74	111,50%	Tercapai
					Nilai LPPD	Predikat	3,8607	Sedang (3,370)	Sedang (3,379)	Tinggi (4,00)	3,379*	84,48%	Tidak Tercapai
					Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00%	Tercapai
		S.2	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Jumlah konflik	Kasus	N/A	6	7	6	5	120,00%	Tercapai	
				Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	Persen	N/A	100	100	100	100	100,00%	Tercapai	
Misi 2: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.													
T.2	Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)				Indeks	64,47	66,96	65,49	71,03	68,09	95,87%	Tidak Tercapai
			S.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh	Indeks Kualitas Perkotaan	Indeks	N/A	67,41	64,16	72,98	68,47	94%	Tidak Tercapai
			S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69,19	67,96	66,81	66,82	67,71	101,33%	Tidak Tercapai
T.3	Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan	Indeks Gini				Indeks	0,34	0,324	0,299	0,3	0,33	90,91%	Tidak Tercapai

TUJUAN		INDIKATOR	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Realisasi			2024			
							2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT CAPAIAN
	ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat		S.5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Non Migas	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	Persen	4,4	5,36	4,41	5,3	9,4	177,36%	Tercapai
Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia													
T.4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				Indeks	80,59	80,59	81,63	81,7	82,49	100,97%	Tercapai
			S.6	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,17	13,18	13,43	13,54	13,73	101,40%	Tercapai
					Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,8	10,81	10,92	11,64	10,97	94,24%	Tidak Tercapai
					Usia harapan hidup	Tahun	74,55	74,57	74,81	74,85	75,03	100,24%	Tercapai
			S.7	Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,92	7,81	7,74	7,35	7,06	127,83%	Tercapai
			S.8	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Angka kemiskinan	Persen	4,62	4,45	4,11	3,9	3,74	104,28%	Tercapai

*) angka sementara

Terdapat 8 (delapan) sasaran daerah yang tertuang didalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026 yang dijabarkan kedalam program-program utama sasaran daerah. Keberhasilan sasaran daerah tidak terlepas dari keberhasilan program-program yang mendukung ketercapaian sasaran daerah tersebut. Dengan demikian pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026 tergantung dari pencapaian program-program daerah tersebut. Berikut penjelasan indikator kinerja utama sasaran daerah sampai dengan tahun 2024:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif

Pada sasaran tersebut terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bontang untuk tahun 2024 adalah sebesar 80,74 meningkat 8,33 poin dari tahun sebelumnya. Secara garis besar, capaian indeks reformasi birokrasi Kota Bontang dapat dikatakan sangat baik sehingga mengalami peningkatan predikat menjadi A, namun masih perlu upaya untuk menjaga keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah konsistensi implementasi kebijakan, mengembangkan layanan pemerintah secara digital paling terkini dan inovatif, dukungan pengembangan kapasitas SDM aparatur, dan memperkuat koordinasi antar Perangkat Daerah agar seluruh program reformasi birokrasi terintegrasi dan berjalan sesuai rencana.

b. Penilaian LPPD

Hingga laporan ini dibuat, Pemerintah Kota Bontang masih menunggu penilaian LPPD dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga nilai LPPD masih menggunakan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 84,48%. Berdasarkan hasil capaian LPPD tahun 2021-2023 menunjukkan kecenderungan Kota Bontang tidak mampu mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD. Berdasarkan hasil penilaian LPPD Kota Bontang dari 130 (seratus tiga puluh) Indikator kinerja kunci yang terdiri dari 6 IKK makro dan 124 IKK outcome, terdapat 10 IKK yang capaian kinerjanya rendah, 17 IKK yang tidak lengkap data dukungannya. Dengan demikian, Kota Bontang perlu melakukan review terhadap target yang ditetapkan dan melakukan perbaikan kinerja untuk meningkatkan capaian IKK tersebut. Sebagai upaya perbaikan, Pemerintah Kota Bontang akan melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan, pelaksanaan program, dan pelaporan kinerja seperti penguatan perencanaan dan penganggaran untuk program-program prioritas yang mendukung capaian indikator

LPPD, penguatan tata kelola pemerintahan dengan cara memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pengumpulan data, analisis, dan pelaporan indikator LPPD agar sistem informasi pemerintahan yang lebih baik.

c. Opini BPK

Selama 10 tahun berturut-turut Kota Bontang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan akuntabel. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memerlukan penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh perangkat daerah mematuhi standar pengelolaan keuangan yang ditetapkan serta pengawasan yang konsisten dan efektif. Selain itu, penyempurnaan sistem pengelolaan aset dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dapat dilakukan melalui pelatihan reguler. Dengan demikian, opini WTP tidak hanya sekadar dipertahankan, tetapi juga mencerminkan pengelolaan keuangan yang semakin profesional.

2. Meningkatnya kondusifitas wilayah

Pada sasaran diatas terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu

- a. Konflik di Kota Bontang pada tahun 2024 mengalami penurunan jumlah kejadian. Pemerintah Kota Bontang berupaya untuk meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah bersama masyarakat dengan cara mengkombinasikan langkah-langkah preventif, reaktif, dan partisipatif sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perdamaian jangka panjang. Selain itu, juga dapat memanfaatkan media sosial untuk memantau isu-isu sensitif di media sosial untuk mengidentifikasi potensi konflik dan menangani narasi yang memicu ketegangan.
- b. Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum dapat diatasi dengan baik yang dibuktikan dengan terselesaikannya semua gangguan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Kota Bontang dapat menjaga kondusifitas wilayah dengan baik. Pemerintah Kota Bontang mengoptimalkan koordinasi antar instansi dan melibatkan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban wilayah. Hal tersebut dapat diiringi dengan pengembangan sistem respon cepat yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi penanganan kasus. Kolaborasi antara

aparatus penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha harus diperkuat melalui forum keamanan wilayah yang dapat menjadi wadah koordinasi dan sinergi. Selain itu, penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan bersama juga perlu terus dilakukan sebagai langkah proaktif untuk mengurangi potensi gangguan keamanan wilayah.

3. Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh

Pada sasaran diatas mempunyai indikator kinerja Indeks Kualitas Perkotaan yang merupakan rerata dari Indeks Kualitas Infrastruktur dan Indeks Ketahanan Daerah. Capaian Indeks Kualitas Perkotaan pada tahun 2024 adalah sebesar 68,47 meningkat 4,31 poin dari tahun sebelumnya. Walaupun terjadi peningkatan capaian di tahun 2024 dibandingkan dengan capaian di tahun 2023, akan tetapi capaian ini belum mampu mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD. Hal ini disebabkan karena dari 71 indikator Indeks Ketahanan Daerah belum mendapatkan hasil yang maksimal. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian pada Indeks Ketahanan Daerah adalah, menyiapkan beberapa eviden yang diminta dalam indikator tersebut secara bertahap. Mempertahankan capaian Indeks Kualitas Perkotaan memerlukan upaya strategi yang berfokus pada konsistensi kebijakan, perbaikan berkelanjutan (pemeliharaan infrastruktur perkotaan, optimalisasi sistem drainase, dan pengelolaan sampah berkelanjutan), dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Dilain pihak pembangunan dapat berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu menjadi tugas semua pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup ditengah berlangsungnya proses pembangunan. Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup, maka digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Kualitas lingkungan diukur melalui kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 adalah sebesar 67,71 meningkat 0,90 poin dari tahun sebelumnya. Untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Bontang, maka Pemerintah Kota Bontang telah melakukan upaya seperti pengendalian kualitas lingkungan berupa pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan RTRW dan RDTR, analisis jasa ekosistem penyediaan pangan dan air, penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pemunuran Emisi Gas Rumah Kaca,

optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau, peningkatan pengelolaan persampahan, dan apresiasi terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan.

5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan maka dapat digunakan ukuran pertumbuhan ekonomi non migas. Tingginya dominasi kegiatan Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang utamanya dimotori oleh aktivitas migas dan industri kimia, menyebabkan pengaruh lapangan usaha lain di dalam laju pertumbuhan perekonomian Kota Bontang kurang terlihat. Oleh sebab itu, maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas ditetapkan menjadi salah satu indikator sasaran Kota Bontang dimaksudkan untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian di lapangan usaha selain migas. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan juga meningkat, yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan yang semakin menurun. Pertumbuhan yang positif menunjukkan terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya penurunan produksi barang dan jasa.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas Kota Bontang pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari 4,41 menjadi 9,4. PDRB Per Kapita ADHB tahun 2024 mencapai 261,809 juta rupiah atau naik 10,34 persen di bandingkan tahun 2023. Sebaliknya pendapatan per kapita ADHB Kota Bontang tahun 2024 berkontraksi 0,84 persen atau 363,368 juta rupiah. Memperhatikan hal tersebut, ke depan Pemerintah akan berusaha untuk terus mendorong ekonomi inklusif yang dinamis dengan terus mendorong produksi pada ekonomi lokal yang potensial seperti perikanan dan pertanian, perdagangan dan jasa, serta pariwisata, penguatan UMKM dan wirausaha lokal, peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja serta melakukan kerjasama/kolaborasi yang baik dengan antar daerah atau pemerintah pusat.

6. Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

Pada sasaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu

a. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Pada dimensi pendidikan, pada tahun 2024 anak-anak di Kota Bontang yang berusia 7 tahun diharapkan dapat mengenyam pendidikan formal selama 13,73 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat

Diploma I. Angka ini meningkat 0,19 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,54 tahun. Mempertahankan capaian Angka Harapan Lama Sekolah yang sudah tercapai memerlukan strategi berkelanjutan agar hasil yang telah diraih tetap konsisten dan bahkan dapat ditingkatkan dengan upaya peningkatan akses pendidikan (sarana prasarana pendidikan yang terus berkembang, program beasiswa atau subsidi pendidikan, pengembangan pendidikan non formal), dan pencegahan terjadinya putus sekolah dengan cara memberikan intervensi melalui bantuan sosial atau konseling.

b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Pada tahun 2024 capaian rata-rata lama sekolah pada angka 10,97 ini artinya masih setara pada jenjang SMA. Ini artinya penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Bontang berada hanya mampu menamatkan pendidikan sampai dengan kelas XI pada jenjang SLTA . Hal ini masih berada dibawah wajib belajar 12 tahun bagi penduduk usia 15 tahun ke atas. Capaian pada tahun 2024 ini telah meningkat dari realisasi pada tahun 2023 sebesar 0,05 poin tetapi masih perlu upaya lebih untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bontang. Kedepannya, lama wajib belajar akan menjadi 13 tahun yang dihitung mulai dari PAUD hingga SMA/ sederajat. Mempertahankan capaian Rata-rata Lama Sekolah memerlukan strategi keberlanjutan. Selain peningkatan sarana prasarana yang berkualitas dan pencegahan terjadinya putus sekolah, yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan kepada masyarakat.

c. Umur Harapan Hidup (UHH)

Pada dimensi kesehatan diukur melalui Umur Harapan Hidup saat bayi di Kota Bontang yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,03 tahun, lebih lama 0,18 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk. Meningkatnya pelayanan kesehatan, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Dengan demikian keberhasilan program kesehatan terutama dalam pencapaian indeks kesehatan dan usia harapan

hidup bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Memperkuat akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui program promotif, preventif, dan kuratif, terutama bagi kelompok rentan. Pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dengan menyediakan tenaga medis yang memadai, memperluas ketersediaan obat-obatan, serta memastikan cakupan pelayanan imunisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin yang lebih luas. Dapat juga menyelenggarakan kampanye kesehatan masyarakat, seperti pola hidup sehat dan pencegahan penyakit menular harus terus digalakkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan mendukung peningkatan usia harapan hidup secara berkelanjutan.

7. Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing

Salah satu ukuran daya saing SDM dapat dilihat dari TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dimana pengukurnya adalah proporsi penduduk yang menganggur dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2023 angka TPT di Kota Bontang adalah sebesar 7,74 persen menjadi 7,06 persen pada tahun 2024 dengan jumlah pengangguran sebesar 7.110 orang. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka ini mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan tingkat kesempatan kerja di Kota Bontang dan peningkatan kompetensi bagi calon tenaga kerja serta kualitas pendidikan yang semakin baik akan meningkatkan keterampilan dan kompetensi penduduk, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi. Penanganan pengangguran memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja hingga memperluas pelatihan yang berbasis keterampilan. Pemerintah perlu mendorong investasi di sektor-sektor strategis yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Program magang dan kemitraan dengan dunia usaha juga dapat menjadi sarana efektif untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja, terutama bagi lulusan baru.

8. Meningkatnya pemberdayaan sosial

Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan Kota Bontang relatif mengalami penurunan, sebesar 0,36 poin menjadi 3,74 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk di Kota Bontang yang hidup di atas garis kemiskinan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tingkat kesempatan kerja di Kota Bontang

sehingga penduduk yang sebelumnya berada di bawah kemiskinan dapat terangkat ke atas garis kemiskinan. Upaya strategis untuk mempertahankan agar angka kemiskinan tetap turun sampai dengan memenuhi target adalah penyempurnaan program pemberdayaan ekonomi (peningkatan akses terhadap lapangan kerja, program pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, inovasi ekonomi lokal), penguatan jaminan sosial (peningkatan akses terhadap program perlindungan sosial, asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, subsidi pendidikan), dan peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar (akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi umum).

3.2 Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintah wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, terdiri dari pendidikan dasar, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan dan perpustakaan. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan sesuai dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan industri.

Adapun urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pembagian Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	PENDIDIKAN
2	KESEHATAN

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
6	SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	TENAGA KERJA
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	PANGAN
4	PERTANAHAN
5	LINGKUNGAN HIDUP
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9	PERHUBUNGAN
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
12	PENANAMAN MODAL
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
14	STATISTIK
15	PERSANDIAN
16	KEBUDAYAAN
17	PERPUSTAKAAN
18	KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	PARIWISATA
3	PERTANIAN
4	PERDAGANGAN
5	PERINDUSTRIAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
1	SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRETARIAT DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
1	PERENCANAAN
2	KEUANGAN
3	KEPEGAWAIAN
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
	INSPEKTORAT DAERAH
UNSUR KEWILAYAHAN	
	KECAMATAN
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Berikut ini diuraikan secara ringkas upaya pencapaian masing-masing melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut:

3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 merupakan pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mencakup penyelenggaraan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial, serta ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan yang wajib diterima oleh setiap orang sebagai warga negara, dimana di dalamnya telah diatur Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dasar di Kota Bontang, dijabarkan kedalam 6 urusan yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan beserta RSUD Taman Husada Kota Bontang
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan serta Satuan Polisi Pamong Praja
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri 6 urusan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Tabel 3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1) Perda Kota Bontang No. 6 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 2) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 19 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 3) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2024	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadministrasikan	75 unit	75 unit			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	1 laporan	1 laporan			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum	1 laporan	1 laporan			
			Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	14 unit	14 unit			
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	4 laporan	4 laporan			

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	250 unit	250 unit			
		4) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 3 tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	104,25	105,20			
		5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 13 tahun 2024 tentang Perubahan Indikator dan Besaran Insentif Bagi		APK SMP	103,46	105,18			
				APK PAUD	83,49	77,46	1. Nilai APK dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah anak yg bersekolah pada tahun 2024 angka anak usia sekolah lebih tinggi dari jumlah anak bersekolah sehingga nilai APK tidak mencapai target 2. Belum adanya legalitas terkait Pendidikan Usia Dini dari pusat 3. Masih rendahnya	1. Melakukan seminar parenting untuk orang tua terkait pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini 2. Melakukan sosialisasi terkait Pendidikan Usia Dini melalui bunda PAUD di kelurahan, kecamatan dan tingkat Kota	

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta dan Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri					tingkat pemahaman dan kesadaran orang tua akan pentingnya sekolah PAUD sebagai persiapan masuk SD		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	56 sekolah	56 sekolah			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang dikelola	27 sekolah	27 sekolah			
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan PAUD yang dikelola	149 lembaga	149 lembaga			
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidikan non Formal/Kesetaraan yang dikelola	50 sekolah	50 sekolah			
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	20%	100%			
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah kurikulum muatan lokal Pendidikan	2 kurikulum	2 kurikulum			

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Dasar yang ditetapkan					
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD dan PNF yang ditetapkan	1 kurikulum	1 kurikulum			
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru murid	513,2	567,0			
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	51,32	56,70			
				Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	84,14	92,25%			
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidikan dasar, PAUD dan Non Formal yang memiliki izin	100%	100%			
			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin Operasional Satuan PAUD PNF yang terbit	16 dokumen	16 dokumen			

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Tabel 3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1	Kesehatan	Angka Kematian Ibu	Peningkatan SDM IBI dalam Upaya Menurunkan AKI/AKB dan Kelahiran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	0	122	Saat ini belum semua RS melakukan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) secara internal terkait kasus kematian	1. Tetap melakukan AMP-SR untuk mencegah kasus berulang kematian ibu dan anak	
								2. Melakukan skrining layak hamil dan Edukasi PUS resti kehamilan	
								3. Pemberian layanan ANC standar	
								4. Kerjasama dengan TPK pemantauan ibu hamil	
								5. Edukasi melalui media	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
								promkes terkait layanan ANC	
2	Kesehatan	Angka Kematian Bayi		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10	15.9	Penyebab dari Angka Kematian Bayi (AKB) disebabkan oleh Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, penyakit bawaan (kelainan kongenital), pneumonia, dan lain-lain.	Peningkatan kesadaran ibu hamil, keluarga dan masyarakat terhadap resiko kematian bayi serta pemenuhan sarana prasarana kegawatdaruratan neonatal yang sampai saat ini hanya terdapat di RSUD Taman Husada dan Rumah Sakit Pupuk Kaltim yang memiliki ruang perawatan Neonatal Intensive Care Unit (NICU).	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
3	Kesehatan	Angka Kesembuhan TB		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	94%	50%	1. Pasien yang telah rutin pengobatan, sebagian besar kesulitan atau tidak dapat dapat lagi mengeluarkan dahak untuk follow up pengobatan. Sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi bakteriologis dengan pemeriksaan mikroskopis.	Menguatkan monitoring kasus bakteriologis ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan(fasyankes) dan memberdayakan kader untuk melacak kasus-kasus pindahan antar fasyankes.	
							2. Selain itu yang menjadi penyebab lainnya adalah pasien yang pindah pengobatan dari Rumah Sakit ke Puskesmas atau ke luar wilayah Kota Bontang, hilang atau tidak kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) untuk melanjutkan pengobatan.		
4	Kesehatan	Prevalensi HIV		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	0.16%	0.99%	Bukan hanya warga bontang saja yg dilakukan skring tetapi juga terdapat masyarakat dari luar bontang. Selain itu skrining yang dilakukan secara masif	1. Melakukan penguatan tim konselor melalui refrehing keilmuan bagi tenaga konselor	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							sehingga banyak ditemukan pasien ODHIV diantaranya pada calon pengantin (catin), pelanggan pekerja seks, pasangan ODHIV dan masyarakat umum.	2. Melakukan VCT mobile rutin ke kelompok populasi kunci diantara lapas, salon,	
								3. Pertemuan dengan LSM peduli HIV untuk meningkatkan dukungan kelompok sebaya dalam pengobatan ODHIV	
								4. Melakukan pertemuan rutin dengan petugas layanan PDP dalam validasi data HIV/IMS	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
5.	Kesehatan	IR DBD		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	210	154	Bontang merupakan wilayah endemis dbd, faktor lingkungan yg cocok utk berkembang biaknya nyamuk Ae aegypti diperparah dengan masih kurangnya perilaku masyarakat utk Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) sehingga masih banyak sampah2 bekas yang menjadi tempat perindukan nyamuk aedes aegypti.	1. Edukasi pencegahan dan penanggulangan DBD dengan perilaku PSN, Abatesasi dan Fogging jika ada kasus terus digalakkan. 2. Menyediakan logistik abate dan bahan aktif fogging 3. Menganggarkan petugas survei jentik 4. Menyediakan logistik reagen deteksi dini penyakit dbd sebagai bentuk kewaspadaan dini	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
								5. Melakukan pertemuan dengan petugas surveilans puskesmas untuk melakukan validasi data kasus DBD bulanan	
6.	Kesehatan	Prevalensi Hipertensi		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	9	9.23	1. Belum semua Fasilitas Kesehatan (faskes) swasta melaporkan data layanan hipertensi	Koordinasi lintas program, lebih ditingkatkan lagi utamanya pada promosi kesehatan	
							2. Kesadaran masyarakat yg masih kurang terhadap penyakit hipertensi	tentang Hipertensi kepada seluruh warga	
7.	Kesehatan	Cakupan Kepesertaan JKN		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	101	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
8.	Kesehatan	Prevalensi Balita Gizi Kurang (Wasting)/(BB/TB)		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	6	19.6	Balita mengalami penyakit infeksi berulang sehingga BB tidak bisa bertambah sesuai KBM dan TB mengalami hambatan. Dikarenakan faktor lingkungan yang buruk (keluarga ada yang merokok, keluarga ada yang sakit infeksi (TB, HIV, dll), sanitasi buruk, air bersih yang kurang memadai (air minum, air untuk memasak), balita tidak diimunisasi lengkap, orangtua masih tinggal bersama dengan keluarga lain (mertua), orangtua/ pengasuh kurang pemahaman pemberian makan yang benar / PMBA , dll.	Temuan balita wasting diberikan PMT Lokal, maupun tatalaksana gizi buruk oleh Tim	
9.	Kesehatan	Prevalensi Baduta Pendek (Stunting)/(TB/U)		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	17	21.55	1. Data yang digunakan adalah data surveilans (bulanan) sehingga akan terjadi kenaikan dan penurunan sesuai dengan D/S posyandu.	Temuan balita stunting dilakukan rujukan dan tatalaksana stunting .	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							2. Masih ada balita yang tidak mengakses posyandu, sehingga tidak diketahui status gizinya.		
							3. Ada balita yang tidak memiliki NIK sehingga tidak tercatat di aplikasi.		
10.	Kesehatan	Prevalensi Balita Gizi Kurus (BB Kurang/Underweight)/(BB/U)		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	11	15.7	Masih ada balita dengan masalah gizi yang tidak mengakses pelayanan kesehatan, faktor lingkungan yang buruk (keluarga ada yang merokok, keluarga ada yang sakit infeksi (TB, HIV, dll), sanitasi buruk, air bersih yang kurang memadai (air minum, air untuk memasak), balita tidak diimunisasi lengkap, orangtua masih tinggal bersama dengan keluarga lain (mertua), orangtua/ pengasuh kurang pemahaman pemberian makan yang benar / PMBA , dll.	Temuan balita underweight diberikan PMT Lokal, PMT Stimulan, PMT Pemulihan (CSR, Baznas, dll)	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
11.	Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Berizin		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	-	-	
12.	Kesehatan	Jumlah FKTP dengan SDM sesuai Standar (jumlah, jenis dan kompetensi)		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	6	6	-	-	
13	Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit dengan SDM sesuai Standar		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	6	5	Penyebabnya adalah dikarenakan masih terdapat 1 Rumah Sakit (RS tipe D) yang masih dalam proses pemenuhan syarakat kelayakan.	Telah dilaksanakan beberapa syarat kelayakan dinataranya adalah pemenuhan lahan parkir dan alur lalulintas di Tahun 2024 dan selanjutnya akan diupayakan syarat lainnya di Tahun anggaran 2025 yaitu	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan		Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
									pembangunan gedung parkir	
14	Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mendapat Pelatihan sesuai Standar	1. Peningkatan SDM tentang Kegawatdaruratan Pra Hospital PSC 119	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	125	264			-	
			2. Peningkatan SDM Pegawai PKM Bontang Selatan 1							
			3. Peningkatan SDM Aparatur Pegawai Puskesmas Bontang Barat dalam memberikan Pelayanan yang							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Prima bagi Masyarakat						
			4. Peningkatan SDM Tata Kelola layanan Laboratorium pada Labkesda						
			5. Peningkatan SDM Program Kesehatan Kerja Olahraga (Kesjaor)						
			6. Peningkatan SDM terkait Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan		Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
15	Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Peningkatan Pendidikan	1. Peningkatan SDM terkait Service Excellent	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	30	65			-	
			2. Pelatihan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak							
16	Kesehatan	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) persatuan penduduk		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1:16.000	4:16.000			-	
17	Kesehatan	Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100			-	
18	Kesehatan	Terbangunnya Sistem informasi kesehatan daerah (SikDa) terpadu	1. Pengadaan Aplikasi Monitoring Layanan Puskesmas Bontang Utara I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100			-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			2. Pengadaan Digital Signage						
19	Kesehatan	Ketersediaan Obat Esensial		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	-	-	
20	Kesehatan	Persentase sarana Produksi Obat, Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Berizin		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100	100	-	-	
21	Kesehatan	SPM RSUD		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	129 (84,8%)	114% (88,4%)	1. Kepatuhan Petugas masih kurang dalam hal	1. Kepatuhan Petugas	
							2. Keterbatasan SDM	2. Pemenuhan SDM	
							3. Sistem yang kurang mendukung	3. Evaluasi Sistem	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							4. Perubahan Panduan Praktik Klinik	4. Penyediaan Sarana dan Prasarana	
								5. penyediaan Anggaran	
22.	Kesehatan	Status Akreditasi RSUD		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Paripurna	Paripurna	-	-	
23.	Kesehatan	Kinerja Keuangan RSUD		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	21	20	1. Target pendapatan tidak tercapai dikarenakan adanya renovasi ruangan perawatan yang menyebabkan berkurangnya kunjungan pasien rawat inap. 2. Adanya aturan BPJS yang terbaru sehingga mempengaruhi kunjungan jumlah pasien.	1. Menyiapkan sarana dan prasarana ruangan perawatan yang sesuai standar BPJS. 2. Melengkapi persyaratan yang ditetapkan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							3. Target pendapatan yang tidak tercapai sehingga berpengaruh pada kinerja keuangan.	3.Membuat inovasi pelayanan yang mempermudah pasien untuk datang ke RSUD.	
24.	Kesehatan	Penerapan/pelaksanaan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Senam Jantung Sehat untuk Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	45	100	-	-	

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan aparatur	100%	100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan aparatur	100%	100%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan aparatur	100%	100%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pelayanan aparatur	100%	100%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%			
			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase kapasitas unit air tanah / air baku	87,00%	79,85%	Penyediaan air baku belum mampu mencukupi kebutuhan	Peningkatan penyediaan air baku dengan	

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			SUMBER DAYA AIR (SDA)				air baku yang diperlukan	pembangunan sumur dalam untuk jangka pendek dan memanfaatkan sumber air permukaan untuk jangka menengah-panjang	
				Persentase kapasitas aliran sungai	69,00%	75,11%			
				Persentase daya tampung danau / folder / kolam retensi	87,36%	87,06%	Pelaksanaan normalisasi selama ini dikerjakan oleh BWS Kalimantan IV	Melakukan koordinasi dan mendorong BWS Kalimantan IV untuk dapat meningkatkan pelaksanaan normalisasi danau Kanaan	
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang turap dan tanggul yang telah dibangun/ panjang keseluruhan sungai	250 meter	3.511,57 meter	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Bontang di RT. 14 Kelurahan Api - Api, Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai RT. 34 Kelurahan Api - Api (Bankeu Prov Kaltim) tidak dapat selesai di tahun 2024	Diberikan kesempatan perpanjangan waktu hingga Tahun 2025	
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran irigasi	100 meter	4 meter	Rencana awal adalah memperbaiki saluran irigasi yang retak-retak atau rusak minor yang menyebabkan air terbuang tetapi di lapangan yang perlu diperbaiki adalah bangunan pembagi	Meningkatkan kualitas dalam merencanakan suatu kegiatan	

Ururan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							sepanjang 4 meter yang rusak berat		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum layak	83,99%	88,39%	Kontinuitas distribusi air minum belum mampu dilakukan sesuai SPM (24 jam)	Meningkatkan ketersediaan air baku	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase rumah tangga berakses air bersih	83,99%	88,39%	Pembangunan IPA IKK Kanaan Kapasitas 50 L/dtk Kecamatan Bontang Barat (Lanjutan) tidak dapat selesai di tahun 2024	Diberikan kesempatan perpanjangan waktu hingga tahun 2025	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kapasitas TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS	38%	34,24%	Volume sampah yang masuk TPA masih cukup tinggi	Menyiapkan tambahan landfill baru TPA dan mengurangi jumlah sampah yang masuk TPA dengan membangun TPS-3R	
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang terlayani persampahannya	200 rumah tangga	200 rumah tangga			
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96,5%	96,26%	Masih terdapatnya rumah tangga yang tidak memiliki akses air limbah domestik	Optimalisasi terhadap SPAL-SPAL komunal eksisting dan penyediaan SPAL individual	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah untuk rumah tangga	200 rumah tangga	90 rumah tangga	Pemasangan sambungan rumah belum memenuhi target. Anggaran diprioritaskan untuk memperbaiki <i>Rotating Biological Contactor</i>	Melakukan pemasangan jaringan pipa air limbah dan sambungan rumah (SR), serta melakukan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan air limbah dan IPAL	

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							(RBC) IPAL yang tidak berfungsi/rusak		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	95%	98,48%			
			Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara	3300 meter	38091 meter			
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi persyaratan teknis	60,81%	61,64%			
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah penyelenggaraan gedung negara	19 Unit	55 Unit			
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase sempadan sungai yang tertata	15,46%	18,78%			
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Sempadan Sungai yang tertata	1 kawasan	1 kawasan			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	90,02%	90,55%	Pembangunan Pembangunan Jembatan Balai Benih Udang (BBI),	Diberikan kesempatan perpanjangan waktu hingga tahun 2025	

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							Pembangunan Jembatan SMP 7 Kel. Api-api, dan Rehabilitasi Trotoar Jalan Ahmad Yani tidak dapat selesai di tahun 2024		
				Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	92,82%	94,68%			
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	1000 meter	20444 meter			
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	86,78%	83,12%			
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga kerja terampil konstruksi yang telah tersertifikasi	1431 orang	2128 orang			
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data dan Informasi SIPJAKI	100%	100%			
			Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah izin usaha	20 badan usaha	93 badan usaha			
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan	100%	78%			

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang	89,20%	94,17%			
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi	100%	100%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang Diterbitkan	100 KKPR	144 KKPR			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pemanfaatan ruang	5 dokumen	5 dokumen			

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2024 tentang erubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana	25%	100%			
				Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	33,50%	100%			
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis data rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi rumah program pemerintah	1 dokumen	1 dokumen	Rencana untuk relokasi 19 rumah di sekitar Pelabuhan Loktuan tidak dilaksanakan karena dokumen Rencana Induk Pelabuhan masih dalam tahap revisi		
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Jumlah unit rumah rehabilitasi	12 unit rumah	5 unit			
		2. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024							
		3. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32							

Ururan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	korban bencana atau relokasi program pemerintah yang dibangun					
		4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah RT, KK dan jiwa penghuni rumah susun umum dan rumah khusus yg dibina	406 Jiwa	298 Jiwa	Penurunan jumlah penghuni UPT. Rusunawa pada tahun 2024 disebabkan oleh adanya penertiban yang dilakukan oleh pihak UPT. Rusunawa kepada penghuni yang melanggar aturan administrasi dan fasilitas hunian		
		5. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	72,06%	56,82%			
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah izin pembangunan dan pengembangan kawasan	1 dokumen	1 dokumen			

Ururan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				permukiman yg diterbitkan					
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha	2 dokumen	2 dokumen			
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah unit peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha	1,13 Ha	3,20 Ha			
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh	2.59%	0.36%			
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yg ditangani	30 unit rumah	30 unit			
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	94.89%	96,60%			

Ururan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	93.63%	95,02%			
				Persentase ketersediaan sarana prasarana TPU	66%	60,90%			
			Ururan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah sarana dan prasarana TPU	2000 meter	9.980 meter			
				Panjang Drainase yang dibangun/ direhab	1000 meter	6.480 meter			
				Panjang jalan yang dibangun/ direhab	33 jenis	30,45 jenis			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	100%			

Ururan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah	100%	100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100%	100%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan layanan administrasi umum yang disediakan	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	100%			

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 3.7 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	SatPol PP	1) Perda Kota Bontang No. 6 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	100%			
		2) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 19 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana	Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten Kota	Persentase Peningkatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah /Kota	100%	100%	masih terbatasnya kualitas SDM Satpol PP	Pelaksanaan Diklat Dasar untuk satuan Polisi Pamong Praja	
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	100%	100%			

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 3) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 4) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 3 tahun 2024 tentang Pedoman	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS kab/kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100%	0%	karena belum ada surat dari Kemendagri terkait pelaksanaan Diklat PPNS	melakukan koordinasi ke Kemendagri baik kunjungan langsung maupun melalui telpon	
			PROGRAM PEUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (Satpol PP)	100%	100%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah 5)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
		Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 13 tahun 2024 tentang Perubahan Indikator dan Besaran Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta dan Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil pada	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Sekolah Negeri							

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Tabel 3.8 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Capaian Program dan Kegiatan pada Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35	35			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110	110			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75	75			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16	16			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	2			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	1			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39	39			

No	Ururan Pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55	55			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	2	2			
2	Ururan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12	12	Tidak terlaksananya Kegiatan Sosialisasi UGB dan PUB kepada pihak yang menyelenggarakan UGB dan PUB, dikarenakan adanya peralihan Tusi Dari Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ke Bidang	Akan dilakukan Kegiatan Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang kepada pihak penyelenggara UGB dan PUB di Kota Bontang pada tahun 2025	

No	Urusan Pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin		
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30	30	Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bontang belum mendapatkan Pelatihan ilmu Pekerja Sosial Dasar yang bersertifikat	Mengadakan Pelatihan Ilmu Pekerja Sosial Dasar bersertifikat bagi PSM Kota Bontang pada tahun 2025	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	2	Belum mendapat pengganti kekosongan SDM Tenaga kesejahteraan	Berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Bontang Barat untuk mencari	

No	Urusan Pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							Sosial Kecamatan Bontang Barat	pengganti kekosonganTKSK Wilayah kecamatan Bontang Barat	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30	30	LKS belum mengerti terkait Manajemen Kelembagaan di LKS masing-masing	Melakukan Studi Tiru ke Daerah Lain, melakukan pendampingan dan pembinaan kemabli kepada LKS	
				Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	50	50	Terlalu banyak jumlah pengurus LK3 yang tidak sesuai dengan Tupoksi LK3, LK3 tidak membuat laporan, tidak diketahuinya jumlah data penanganan dari LK3	Merubah Struktur Organisasi SDM Pengurus LKS	
3	Urusan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					

No	Urusan Pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
				Penyediaan Permakanan	100	100	Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Program Rantang kasih sering terlambat dalam menyampaikan Laporan Bulanan	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pokmas Pelaksana Program Rantang Kasih	
				Penyediaan Sandang	50	44	Kendala dalam pengajuan Standar Harga Satuan (SSH)	Kerjasama dengan pihak ke Tiga (BAZNAS, CSR) untuk membantu penyediaan sandang	
				Penyediaan Alat Bantu	25	25	Kendala dalam pengajuan Standar Harga Satuan (SSH)	Kerjasama dengan TJSL untuk membantu penyediaan Alat Bantu	

No	Urusan Pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30	30	tidak memiliki fasilitas kendaraan untuk pengantaran orang terlantar khususnya di dalam daerah kota Bontang	Mengusulkan pengadaan mobil operasional yang peruntukannya untuk pengantaran orang terlantar ke pada keluarga dan untuk pelayanan PPKS lainnya	
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	330	225	kurangnya kesadaran oleh PPKS untuk mengikuti bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala	
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	400	395	kesulitan dalam koordinasi dengan daerah asal klien	Mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait	
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5	21	Klien tidak memiliki Identitas Kependudukan	Akan bekerjasama dengan Disdukcapil dan BPJS Kesehatan	

No	Urusan Pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20	20	Terbatasnya Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Melaksanakan Koordinasi dengan pihak terkait Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	5	810			
				Pemberian Layanan Kedaruratan	5	41			
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5	39			

No	Ururan Pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Pemberian Layanan Rujukan	20	20	Keterbatasan kapasitas panti sehingga pelayanan rujukan terkadang lambat khususnya di panti Jompo	melukan kerja sama dengan Panti Sosial yang ada di Kota Bontang	
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial					
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	20	20			
				Pemberian Layanan Kedaruratan	20	19			
				Penyediaan Permakanan	50	50			
				Penyediaan Sandang	50	50			
				Penyediaan Alat Bantu	5	5			

No	Urusan Pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	42	42			
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	5	5			
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	30	30			
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5	5			
				Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25	24			
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10	10			
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	26	24			
				Pemberian Layanan Rujukan	15	15			

No	Urusan Pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	12	12			
4	Urusan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	47102	47102	Minimnya SDM yang terlibat dalam verifikasi dan validasi lapangan	Menyiapkan insentif dan sarana pendukung bagi petugas lapangan	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1291	1291	Banyaknya KPM yang pindah domisili tanpa melaporkan ke pihak RT dan Pendamping PKH	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap Program Keluarga Harapan (PKH)	
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	500	500	Terkait kartu KPM yang terbawa keluar kota, dikarenakan KPM pindah	Mencari KPM pengganti	

No	Urusan Pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	250	250	Dari hasil monitoring dan Evaluasi ada KUBE yang tidak aktif	Kembali melakukan pendampingan kepada Kelompok KUBE	
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
				Penyediaan Makanan	1000	1157	Belum ada gudang logistik dan fasilitas pendukung pergudangan (Peralatan dan Perlengkapan)	Pembangunan gudang logistik dan penyediaan fasilitas pendukung pergudangan (Peralatan dan Perlengkapan)	
				Penyediaan Sandang	50	1157	Belum ada gudang logistik dan fasilitas pendukung pergudangan (Peralatan dan Perlengkapan)	Pembangunan gudang logistik dan penyediaan fasilitas pendukung pergudangan (Peralatan dan Perlengkapan)	
				Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	75	32			

No	Urusan Pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Pelayanan Dukungan Psikososial	50	63	Belum tersediannya SDM Layanan dukungan psikososial yang kompeten	Peningkatan jumlah SDM dan peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan layanan dukungan psikososial kegiatan penanggulangan bencana	
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1	1	pada tahun 2024 telah dilaksanakan perencanaan penancangan	akan dilaksanakan penancangan kampung siaga bencana	
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	30	58	Kurangnya SDM dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana	Peningkatan jumlah SDM dan peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana	

No	Ururan Pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
5	Ururan Pemberda yaan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	1	Banyaknya kepengurusan LKK yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Perlu penataan kelembagaan dan SDM LKK	

No	Urusan Pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2	2	Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LKK dan Lembaga adat kelurahan	Perlu diadakan pelatihan pengurus kelembagaan LKK, lembaga adat kelurahan dan penyusunan kurikulum pelatihan	
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4	4	Belum optimalnya pendataan sarana dan prasarana kelembagaan LKK dan lembaga adat kelurahan	Perlu diadakan pendataan sarana dan prasarana kelembagaan mitra kelurahan dan lembaga adat kelurahan	
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3	3	Belum optimalnya peran serta posyantek kelurahan dalam mendayagunak an potensi ekonomi masyarakat	Penguatan kelembagaan posyantek kelurahan melalui pengkoordinasian forum posyantek Kota Bontang	

No	Urusan Pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	1	Belum adanya jadwal yang jelas terkait pencanangan bulan bhakti gotong royong dan kesiapan kelurahan	Pemantapan penyusunan jadwal secara berjenjang mulai dari kelurahan sampai dengan tingkat provinsi dan perlunya dukungan anggaran pelaksanaan BBGRM tingkat kelurahan	
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6	6	Belum optimalnya kader PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Pendampingan kader PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	

3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 merupakan urusan pemerintahan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah selain dari urusan pemerintahan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial, serta ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri 18 urusan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Tabel 3.9 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Perm asala han	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomenda si DPRD
Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	1) Peraturan Daerah h Kota Bontang No. 6 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Penda patan dan Belanja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100%	100%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang	32 orang			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan	100%	100%			

Ururan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Daerah Tahun Anggaran 2024 2) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 19 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 3) Peraturan Wali		administrasi kepegawaian					
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	69 Paket	69 Paket			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	436 Orang	436 Orang			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100%	100%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			

Ururan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Kota Bontang Nomor 21 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Penda-patan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100%	100%			
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	3 unit			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	49 Unit	49 Unit			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			

Ururan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit			
			Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	39 Unit	39 Unit			
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang dilatih	4,82%	14,21%			

Ururan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi pada Tahun n	100%	100%			
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1207 Orang	1207 Orang			
			Pembinaan Lembaga Pendidikan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	100%	100%			
			Pembinaan Lembaga Pendidikan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	46 LPK	46 LPK			
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Terpenuhi Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			

Ururan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	20,5%	36,15%			
			Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten /Kota	Persentase tenaga kerja/pencari kerja yang mendapat pelayanan antar kerja di kabupaten/kota	100%	100%			
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	500 Orang			
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	100 Orang			
			Pengelolaan Informasi Pasar kerja	Persentase data dan informasi pasar kerja yang dikelola	100%	100%			
			Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	50 Orang	97 Orang			
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Tahun	5,32%	1,88%			

Ururan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Menyusun Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	97%			
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	30 Perusahaan	28 perusahaan	Kurangnya keadaran pengusaha melakukan pengesahan peraturan perusahaan	Melakukan pembinaan kepada pengusaha terkait pentingnya pemenuhan persyaratan kerja	

Ururan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan			
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten / Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	30 Perkara	47 Perkara			
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	19 Perkara	16 Perkara			

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			(satu) Daerah Kabupaten/ Kota						
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga			
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	36777 Orang	36777 Orang			

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.10 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
	Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	47.78 Persen	57.3	Sumber Data BKPSDM 2024 (peningkatan bisa jadi perekrutan CPNS, maupun adanya purna tugas beberapa pegawai pria sehingga menaikkan angka partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah)	Lebih Intens Koordinasi tentang partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah kepada lembaga yg bersangkutan	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	100 Persen	100			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Perangkat Daerah	31			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	34			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Layanan	269			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	70 Persen	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 Orang	25			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Layanan	34			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		100 Persen	100		
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nind Kategori	Nindya			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga	30			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	30			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100 Persen	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	120 Orang	120			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 Orang	86			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	6			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	3 Kegiatan	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	240 Orang	240			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	2 Dokumen	2			

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Tabel 3.11 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100			

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Ke giatan	Indikator	Target		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjutan Rekomendasi DPRD
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	60			

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan Rekomendasi DPRD
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100			
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	89	Nilai	86,5			

No	Ururan Pemerintan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Keb ijak an	Uraian Program/Ke giatan	Indikator	Target		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindalanjut Rekomenda si DPRD
				KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi dan Protein	AKE = 2.400 Poin dan AKP	63 AKE/AKP	2.384,75/100,75	Jumlah pangan yg tersedia di Kota Bontang tdk bisa langsung diintervensi oleh pemerintah krn sebagian besar bersumber dari pangan yg di pasok oleh masyarakat serta produksi pangan masih belum memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sehingga ketersediaan pangan sangat bergantung dari pasokan dari luar kota	Pemerintah Kota Bontang mengadakan cadangan pangan pemerintah berupa beras untuk menjamin ketersediaan pangan di kondisi-kondisi tertentu dan disalurkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutan Rekomendasi DPRD
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	5	Dokumen	5			
				Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	10	Ton	10			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
				Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tingkat ketercapaian target konsumsi energi dan protein per kapita	2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari	Kkal /kap/hari dan gram/kap/hari	AKE= 1.885,40kkal/kap/hari dan protein = 64,18gram/kap/hari	a. Capaian Angka Kecukupan energi (AKG) tingkat konsumsi belum mencapai standar nasional b. Pengetahuan dan Keterampilan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan Beragam,ber gizi seimbang dan aman (B2SA) belum maksimal	a. Peningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Petugas dalam analisis konsumsi pangan dan ketahanan pangan masyarakat b. Peningkatan promosi, sosialisasi, edukasi dan konsumsi pangan B2SA c. mempromosikan, sosialisasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi Pangan;	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
										d. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan petugas untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang sejak dini ; e. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan d. mengembangkan dan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	100	%	100			
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	100	%	100			
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100	%	100			
				Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fungsi Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	100	%	100			

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Tabel 3.12 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pertanahan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2024 tentang erubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 2. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 3. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 Tentang	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	100%	100%			
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan	8 dokumen	4 dokumen			
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah	75%	100%			
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen			

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024		oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					
		4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	30%	50,20%			
		5. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	100%	100%			
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase penyediaan tanah untuk masyarakat	75%	100%			
			Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah fasilitasi penerbitan izin membuka tanah	3 lokasi	3 lokasi			
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penyediaan tanah untuk fasilitas publik	10%	33,33%			
			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Peta Zona Nilai Tanah	1 dokumen	1 dokumen			

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Tabel 3.13 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup

Capaian Program dan Kegiatan pada Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Urusan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Dokumen	6 Dokumen			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%			
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		91%	100%			
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		95%	95%			
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMANHAYATI (KEHATI)		76%	76%			

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		49,56 Ha	49,56 Ha			
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		100%	100%			
			Penyimpanan sementara Limbah B3		1 Laporan	1 Laporan			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		96%	81%			
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%			
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		60%	100%			
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2 jenis	2 jenis			

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		100%	100%			
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4 jenis	4 jenis			
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		100%	100%			
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		100%	100%			
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		28%	99,68%			
			Pengelolaan Sampah		11.797 Ton	27.710,07 Ton			

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 3.14 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Program dan Kegiatan pada Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	100%	100%	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman KTP elektronik	1. Rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media online tentang pentingnya administrasi kependudukan	
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase terlaksananya kegiatan pendaftaran kependudukan	100%	100%	2. Masih adanya data warga wajib KTP yang belum melakukan perekaman tetapi sudah tidak berdomisili di Bontang 3. Alat perekaman yang tidak berfungsi dengan baik 4. . Kurangnya SDM yang bisa dan memahami dalam mengoperasikan aplikasi SIAK	2. Rutin melakukan layanan jemput bola, misalnya ke sekolah-sekolah, koordinasi/kolaborasi dengan pihak kecamatan, kelurahan dan RT berkenaan dengan domisili keberadaan warga yang belum melakukan	

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							khususnya perekaman KTP elektronik	perekaman dan masih belum terdata dalam data base Disdukcapil 3. Mengajukan usulan perbaikan atau pembelian alat perekaman 4. Peningkatan kompetensi SDM operator berkenaan dengan pengoperasian aplikasi SIAK	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Rasio bayi berakte kelahiran 2. Rasio pasangan berakte nikah 3. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	1. 1 2. 0,73 3. 99	1. 1 2. 0,73 3. 99	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kepemilikan akta perkawinan dan masih adanya penduduk yang melakukan perkawinan secara agama atau adat saja tetapi tidak	1. Pencatatan Perkawinan melalui Kecamatan di Kota Bontang 2. Layanan jemput bola ke Rumah Sakit dan Klinik Bersalin setiap Bulan 3. Layanan jemput bola ke kelurahan-kelurahan	
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	100%			

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							tercatat secara administrasi kependudukan sehingga perkawinan belum diakui secara hukum negara 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan pencatatan sipil lainnya	setiap 3 Bulan sekali	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan informasi Adminduk	100%	100%			
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	100%			
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi	100%	100%			

Ururan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi Kependudukan					
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase penyampaian data profil kependudukan	100%	100%			
			Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	100%	100%			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1. Harga box arsip pada SSH jauh di atas harga box arsip di pasar. Hal ini menyebabkan akumulasi SILPA yang signifikan	Pengajuan SSH baru untuk box arsip	

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100%	100%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			

Urutan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 3.15 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
	Urusan Pemberdayaan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	1	1	Banyaknya kepengurusan LKK yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Perlu penataan kelembagaan dan SDM LKK	

				Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2	2	Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LKK dan Lembaga adat kelurahan	Perlu diadakan pelatihan pengurus kelembagaan LKK, lembaga adat kelurahan dan penyusunan kurikulum pelatihan	
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4	4	Belum optimalnya pendataan sarana dan prasarana kelembagaan LKK dan lembaga adat kelurahan	Perlu diadakan pendataan sarana dan prasarana kelembagaan mitra kelurahan dan lembaga adat kelurahan	
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3	3	Belum optimalnya peran serta posyantek kelurahan dalam mendayagunakan potensi ekonomi masyarakat	Penguatan kelembagaan posyantek kelurahan melalui pengkoordinasian forum posyantek Kota Bontang	

				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	1	Belum adanya jadwal yang jelas terkait pencaanangan bulan bhakti gotong royong dan kesiapan kelurahan	Pemantapan penyusunan jadwal secara berjenjang mulai dari kelurahan sampai dengan tingkat provinsi dan perlunya dukungan anggaran pelaksanaan BBGRM tingkat kelurahan	
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6	6	Belum optimalnya kader PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Pendampingan kader PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 3.16 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2	Rasio	0.95	Rata-Rata Jumlah Anak dalam Keluarga Rasionya Menurun Namun secara umum keluarga di bontang memiliki 1 anak dalam keluarga	Penggunaan indikator Rata Rata Jumlah Anak dalam Keluarga diganti menjadi Total Fertiliy Rate (TFR) yang mengacu pada tingkat fertilitas	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	60	Persen	60			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target		Realisasi	Permasalahan		Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	45	Pendidikan	45				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	12	Kegiatan	12				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	100				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	1	Dokumen	1				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target		Realisasi	Permasalahan		Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Keluarga Berencana									
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	Laporan	1				
n.		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2	Dokumen	2				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	15	Unit	15				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	1	Laporan	1				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	71	Persen	56.4	Mengalami Penurunan beberapa PUS yang sudah tidak dikategorikan PUS lagi (>59 Tahun dan/atau kenaikan Unmet Need)	Peningkatan penjangkaran akseptor MKJP oleh Petugas Lini Lapangan dengan strategi Sosialisasi dan KIE yang tepat sasaran dan Penambahan Tenaga Lini Lapangan PKB dan PLKB	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100	Persen	100			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pengendalian Program KKBPK	3	Laporan	3			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	3	Unit	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target		Realisasi	Permasalahan		Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	3	Laporan	3				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	3	Laporan	3				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4	Dokumen	4				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	2	Dokumen	2				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5	Organisasi	5				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	4	Kegiatan	4			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	60	Orang	60			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1	Laporan	1			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	Laporan	1			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	692	Orang	949	Mengalami Kenaikan Akseptor baru lebih condong memakai Kontrasepsi Modern, sejalan dengan Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern yang naik	Pembuatan data sasaran Unmet Need BNBA	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	5	Unit	5			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	Laporan	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target		Realisasi	Permasalahan		Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1	Laporan	1				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Peningkatan Kesertaan KB Pria	120	Orang	120				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	15	Orang	15				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	75	Orang	75				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	60	Persen	60				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target		Realisasi	Permasalahan		Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	Dokumen	1				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pembinaan Terpadu Kampung KB	2	Laporan	2				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	15	Kampung	15				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	75	Persen	100				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	Persen	100				

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target		Realisasi	Permasalahan		Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1	Laporan	1				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1	Laporan	1				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	5	Unit	5				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	241	Orang	241				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target		Realisasi	Permasalahan		Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2	Laporan	2				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	120	Kelompok	120				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target		Realisasi	Permasalahan		Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	80	Persen	100				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	Organisasi	1				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3	Laporan	3				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target		Realisasi	Permasalahan		Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	4	Laporan	4				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1	Laporan	1				
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1	Laporan	1				

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Tabel 3.17 Urusan Pemerintah Wajib Bidang Perhubungan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		100%	100%			
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		100%	100%			
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		100%	100%			

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		100%	100%			
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100%	100%			
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		100%	100%			
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang/dan atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%			
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		100%	100%			
			Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyebrangan dalam Daerah		100%	0%			
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		100%	100%			

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Tabel 3.18 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kab/Kota	48	48			
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi public yang dilaksanakan sesuai STRAKOM dan SOP yang telah ditetapkan	80%	80%			
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%			
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ruang public yang memiliki akses internet	83.87%	83.87%			

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 3.19 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Capaian Program dan Kegiatan pada Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	BIDANG KOPERASI	DKUMPP		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	20%	63,32%			
				Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Terdapat sebagian koperasi yang belum merespon upaya yang telah dilakukan DKUKMP baik melalui himbauan, peringatan dan penyampaian informasi secara berkala. Pemenuhan persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam yang masih berat dipenuhi oleh koperasi misalnya persyaratan Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi pengurus koperasi, modal minimal 500 juta surat dari pengadilan niaga serta surat dari OJK	Segera untuk melaksanakan upaya pendampingan serta bimbingan terkait kendala yang dihadapi dan memperbanyak ruang diskusi dengan pihak koperasi.	
				Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan	100%	100%	Terdapat sebagian koperasi yang belum merespon upaya yang telah dilakukan DKUKMP baik melalui himbauan, peringatan dan penyampaian informasi secara berkala. Pemenuhan persyaratan Izin	Segera untuk melaksanakan upaya pendampingan serta bimbingan terkait kendala yang dihadapi dan memperbanyak ruang	

No.	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				dalam Daerah Kabupaten/Kota			Usaha Simpan Pinjam yang masih berat dipenuhi oleh koperasi misalnya persyaratan Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi pengurus koperasi, modal minimal 500 juta surat dari pengadilan niaga serta surat dari OJK	diskusi dengan pihak koperasi.	
2				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	9%	100%			
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%			
3				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	54%	99,47%			

No.	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30%	30%	syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukan penilaian Kesehatan adalah koperasi telah melakukan RAT Tahun buku berjalan, dari 67 koperasi aktif hanya 37 koperasi yang melakukan RAT.	Akan dilakukan Koordinasi dengan koperasi yang tidak RAT, mendampingi, serta melakukan bimbingan terkait tata cara pelaksanaan RAT	
4				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	19%	100%			
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1%	100%			
5				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	8%	7,5%			
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	75%	100%			

No.	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
6				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	100%	100%			
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	Tidak sinkronnya data pemilik izin usaha dengan keberadaan usaha di lapangan	Akan dilakukan sinkronisasi data berdasarkan izin yang dimiliki dengan aktivitas usaha dilapangan	
7				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	5%	100%			
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	5%	5%			

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Tabel 3.20 Urusan Pemerintahan Wajib Penanaman Modal

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanlanjutan Rekomendasi DPRD
I			Peningkatan SDM Pelayanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8	8	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa	1	1	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	-	-	-
II			Peningkatan Promosi Investasi Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor	2	-	-	-	-
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Gambaran Kawasan Industri Kota Bontang belum diperbaharui, termasuk Kawasan Industri Bontang Lestari yang baru dimulai	Menyusun dokumen master plan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukkan Industri Kota Bontang	-
III			Peningkatan Promosi Investasi Daerah	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor	2	-	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Adanya keterlambatan dalam pelaporan LKPM online yang disampaikan oleh pihak Investor kepada BKPM. Keterlambatan penyampaian LKPM, dalam hal pemberian sanksi masih menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	Pemerintah Pusat (BKPM) dapat memberikan Kewenangan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah (DPMPTSP), mengenai sanksi yang diberikan dan untuk selanjutnya akan dilakukan proses validasi data	-
IV			Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM	89.30.00	92.01.00	-	-	-
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100	100	-	-	-
V			Peningkatan Promosi Investasi Daerah	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Aturan Penanaman Modal	57	40	-	-	-
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupten/Kota						

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
VI			Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Perizinan	100	227	-	-	-
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data perizinan dan non perizinan yang diolah/disajikan	560	1.269	Masih ada masyarakat / pemohon yang belum sepenuhnya mengerti untuk mengisi formulir izin usaha-Nya melalui aplikasi OSS-RBA	Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi di setiap Kelurahan dan Kecamatan	

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 3.21 Urusan Pemerintahan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No .	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutan Rekomendasi DPRD
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMUDA OLAHRAGA	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan daerah	100	%	100			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen OPD	4	dokumen	4			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100	%	99			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Perangkat Daerah yang Terpenuhi	12	bulan	12			

No .	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Untuk Menunjang Pelayanan Perangkat Daerah	12	bulan	12			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Sarana dan Prasarana OPD Untuk Menunjang Pelayanan Perangkat Daerah	16	laporan	22			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang yang dipelihara Oleh Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37	unit	37			

No .	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing kepemudaan	Presentase pembinaan dan pengembangan kapasitas daya saing organisasi kepemudaan (OKP)	100	%	97,5	Dari beberapa kategori perlombaan yang dilombaka terdapat satu kategori yang minim/tidak ada pesertanya		
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Berprestasi	80	orang	99			

No .	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemberdayaan dan Pembangunan Operasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	Orang	100			
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing keolahragaan	Persentase Atlit yangn Berpestasi	47	%	54			
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	%	100			
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan		5	unit	100%			

No .	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
				Daerah Kabupaten/Kota							
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang Memperoleh Medali	50	medali	72			
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		100	%	100			
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		2	Organisasi	4			
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		7	kegiatan	17			

No .	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	100	%	100			
				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat		2840	orang	5689			

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Tabel 3.22 Urusan Statistik

Capaian Program dan Kegiatan pada Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi Pembangunan daerah	100%	100%			
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase data statistic sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	100%	100%	SDM pengelolaan statistik sektoral masih terbatas	Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan statistik sektoral	

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Tabel 3.23 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Persandian

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0,62	0,62			
			Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan untuk informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase penyelenggaraa n persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah Kab/Kota	100%	100%	1. Infrastruktur keamanan informasi masih terbatas; 2. SDM keamanan informasi masih terbatas	3. Peningkatan Infrastruktur Dan Pengelolaan Aset Keamanan Informasi; 4. Peningkatan kapasitas SDM Keamanan Informasi	

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Tabel 3.24 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kebudayaan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1) Perda Kota Bontang No. 6 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 2) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 19 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian budaya	100%	100%			
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan masyarakat Kota Bontang yang dikelola	2 kebudayaan	2 kebudayaan			
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	20 kesenian	23 kesenian			
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Adat yang dibina	2 lembaga	2 lembaga			
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan kesenian	100%	100%			

Ururan pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan an	Upaya Mengatasi Permasalahan an	Tinjut Rekomenda si DPRD
		Kerja Pemerinta h Daerah Tahun 2024 3) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapata n dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah yang dibina	3 kesenian	3 kesenian			

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Tabel 3.25 Urusan Pemerintahan Wajib Perpustakaan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Urusan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1) Peraturan Daerah Kota Bontang No. 6 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pemustaka perpustakaan	42.350 Orang	79.462 Orang			
		2) Peraturan Daerah Kota Bontang No. 3 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah duta baca tingkat daerah kab/kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	3 Orang	4 Orang	Rendahnya minat baca masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya membaca, keterbatasan waktu	Peningkatan bahan bacaan melalui pengembangan perpustakaan keliling, pojok baca di ruang publik, dan penyediaan bahan bacaan digital yang dapat diakses secara daring serta penambahan koleksi buku	
		3) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 19 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	11 Bahan Pustaka	11 Bahan Pustaka	Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, tenaga pengelola, maupun sarana dan prasarana, koleksi yang	Peningkatan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan, termasuk penambahan koleksi bahan bacaan,	

Urusan pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan an	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomenda si DPRD
		4) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024					belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.	modernisasi sarana dan prasarana, serta pengadaan perangkat teknologi informasi untuk mendukung layanan digital	
								Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga pengelola perpustakaan	
								Promosi aktif melalui berbagai media, penyelenggaraan acara literasi seperti festival buku, peluncuran layanan perpustakaan keliling, serta pengembangan perpustakaan digital yang memungkinkan akses mudah kapan	

Urusan pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan an	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomenda si DPRD
								saja dan di mana saja.	
								Peningkatan kolaborasi lintas sektor, baik dengan instansi pendidikan, komunitas literasi, maupun pihak swasta, juga terus diperkuat. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan program-program inovatif yang mampu menjadikan perpustakaan sebagai pusat aktivitas masyarakat.	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase pemenuhan layanan	100 Persen	100 Persen			

Ururan pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	penunjang urusan pemerintahan daerah					
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100 Persen	100 Persen			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	100 Persen	100 Persen			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan	100 Persen	100 Persen			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			

Ururan pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan an	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomenda si DPRD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Persen	100 Persen			

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Tabel 3.26 Urusan Pemerintahan Wajib Kearsipan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Urusan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1) Peraturan Daerah Kota Bontang No. 6 tahun 2024	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik	75 Persen	80 Persen			
		tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah			
		2) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 19 tahun	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lumbago kearsipan daerah kabupaten/kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah			

Urusan pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 3) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	Tidak semua perangkat daerah memperhatikan JRAny sehingga menghambat kegiatan penyusutan arsipnya (pemusnahan arsip, penyerahan/akuisi arsip statis)	Setiap OPD harus memperhatikan Jadwal Retensi Arsip (JRA)-nya sehingga pemindahan arsip dari UP ke UK dapat berjalan lancar dan kegiatan penyusutan (pemusnahan, akuisisi atau penyerahan) arsip di OPD tersebut dapat berjalan lancar	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	50 Persen	20 Persen			
			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah	Jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan	1 Berkas	2 Berkas	Tidak semua OPD sudah melakukan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	Setiap OPD harus memperhatikan Jadwal Retensi Arsip (JRA)-nya sehingga pemindahan arsip dari UP	

Ururan pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomenda si DPRD
			10 (sepuluh) Tahun					ke UK dapat berjalan lancar dan kegiatan penyusutan (pemusnahan , akuisisi atau penyerahan) arsip di OPD tersebut dapat berjalan lancar	
			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip yang dilakukan pendataan penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat daerah	3 Arsip	3 Arsip			
			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan	3 Arsip	3 Arsip			

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Daftar arsip dan SOP arsip	20 Persen	20 Persen			
			Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah daftar Arsip hasil penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	2 Arsip	2 Arsip			

3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 merupakan pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri 5 (lima) urusan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Tabel 3.27 Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	21.709,00	Ton	22.143,3			
				Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Tangkap	21.709	Ton	22143,3			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	3.300,00	Ton	3609,65			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
				Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Operasional Balai Benih Ikan	3300	Ton	3609,65	a. Hasil monitoring ke pembudidaya dikeluhkan untuk harga pakan mahal sehingga keuntungan yang didapatkan kecil b. Keterampilan dan pengetahuan pembudidaya masih rendah sehingga hasil yang dicapai belum optimal c. Masih kurangnya pelatihan pengembangan perikanan budidaya yang diikuti oleh pelaku usaha budidaya ikan d. Masih kurangnya	a. Memberikan saran untuk membuat pakan alternatif dari bahan-bahan murah (limbah ikan, ampas tahu, ampas kelapa dll) b. Melakukan pembinaan dan monitoring ke pembudidaya ikan secara rutin c. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) menyelenggarakan pelatihan pengembangan perikanan budidaya d. Pemenuhan sarana dan prasarana di UPTD BBI e. Melakukan bimtek/pemagangan di tempat pembenihan yang maju	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
									Sarana dan Prasarana di UPTD BBI e. Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan SDM di UPTD BBI terkait pembenihan ikan f. Masih sulitnya pemasaran hasil produksi	f. Melakukan promosi kepada masyarakat secara langsung dan melalui media sosial	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
				Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang Disediakan	3300	Ton	3609,65	b. Pembinaan : Masih kurangnya pembinaan ke kelompok baru usaha budidaya ikan a. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan budidaya di Kota Bontang	a. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) melaksanakan pembinaan ke kelompok baru usaha budidaya ikan b. Perlu penambahan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana perikanan budidaya guna meningkatkan produksi di Kota Bontang	
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produktifitas Pengelolaan Hasil Perikanan	33	%	33			
				Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	10	Unit	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Produktifitas Pengelolaan Hasil Perikanan	33	%	33			

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Tabel 3.28 Urusan Pemerintahan Pemilihan Pariwisata
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindakanjutan Rekomendasi DPRD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase objek daya tarik wisata yang representatif	88	%	94,32			
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan Strategis yang d kelola oleh kab / kota	1	odtw	1			
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi yang Dikelola Kabupaten / Kota	4	odtw	4			
			Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	386.686	orang	294.531	Adanya penutupan beberapa Objek Daya Tarik	Peningkatan kualitas eksisting Objek Daya	

								Pariwisata (Mangrove BSD, Lembah Hijau)	Tarik Pariwisata	
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kot a	Jumlah Kunjungan Wisatawan	386. 686	orang	294.53 1	Adanya penutupan beberapa Objek Destinasi Pariwisata (Mangrove BSD, Lembah Hijau)	Peningkata n kualitas Objek Destinasi Pariwisata	
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Hak Intelektual	Persentase pengembanga n dan perlindungan pelaku ekonomi kreatif	40	%	32,50	Banyaknya Kekurangan Berkas Administrasi HAKI dan Kurangunya Kesadaran Pelaku Ekraf untuk MengHaKika n Karyanya	Dilakukan upaya sosialisasi kepada pelaku Ekraf	
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pengembanga n Ekosistem Ekonomi Kratif	1	Dokume n	1			

			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase Sumber daya pariwisata yang di kembangkan	70	%	100			
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang di tingkatkan kapasitasnya	398	Orang	1281			

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Tabel 3.29 Urusan Pertanian

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan dan Rekomendasi DPRD
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	100	%	100			
				Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100	%	100	a. Kurangnya pengetahuan dalam penggunaan sarana pertanian b. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh petani	a. Diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan kepada petugas dan petani cara penggunaan sarana pertanian yang tepat b. Perlunya pengadaan sarana dan prasarana pertanian	

No .	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan dan Rekomendasi DPRD
				Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok	20	Kelompok	20	Bantuan pakan, mineral dan vitamin ternak yg diberikan masih terbatas.	Perlu penambahan anggaran sehingga bantuan yg diberikan lebih banyak sasaran/kelompok yg menerima.	
				Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penambahan Jumlah Populasi Ternak di Kelompok	996	Ekor	996	Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan peternak.	perlunya peningkatan keterampilan sdm baik petani maupun petugas melalui pelatihan dan studi tiru	
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian Unit Pelayanan	100	%	100			
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pemenuhan Prasarana Pertanian dan Peternakan Unit Pelayanan	100	%	100			

No .	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan dan Rekomendasi DPRD
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Wilayah Pengendalian Kesehatan Hewan	100	%	100			
					Cakupan Pembinaan Pelaku Usaha Olahan Peternakan	80	%	80			
				Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedianya Obat-Obatan Ternak, Tersedianya Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan, Jumlah Ternak yang Sudah Tervaksin dan Terobati	100	%	100	1. kegiatan gerakan makan telur dan minum susu belum maksimal 2. cakupan vaksinasi belum optimal	1. Diperlukan item uraian tersendiri dalam penganggaran dalam mendukung gerakan bontang bebas stunting (gerakan makan telur dan minum susu) dan cakupan lebih luas lagi 2. perlu adanya KIE	
				Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Olahan Produk Peternakan Pangan dan Non Pangan	100	%	100	1. Perlunya bantuan sarana dan prasarana produksi untuk pelaku usaha olahan	1. Perlu penambahan anggaran untuk mengakomodir bantuan sarana dan prasarana produksi untuk pelaku usaha olahan	

No .	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan dan Rekomendasi DPRD
									peternakan pangan	peternakan pangan	
									2. Minimnya pelaku usaha olahan peternakan pangan yang memiliki rumah produksi yang sesuai dengan syarat sertifikat NKV dan izin edar	2. Perlu adanya bimbingan lebih lanjut mengenai penerapan hygiene dan sanitasi serta penerapan rancang bangun rumah produksi bagi pelaku usaha olahan peternakan pangan sesuai sertifikat NKV dan izin edar	
									3. Masih ada pelaku usaha peternakan pangan yang belum memiliki sertifikat halal	3. Perlu adanya pendampingan dan fasilitasi bagi pelaku usaha olahan peternakan pangan yang belum bersertifikat halal	

No .	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan dan Rekomendasi DPRD
									4. Perlunya peningkatan pemahaman terkait penerapan hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan bagi pemotong ayam, takmir mesjid, dan juru sembelih hewan	4. Perlu adanya tambahan bantuan/pinjaman permodalan bagi pelaku usaha	
										5. Diperlukan pelatihan kepada pihak-pihak yang terkait proses pemotongan hewan (pemotong ayam, takmir mesjid dan juru sembelih) terkait penerapan hygiene sanitasi dan penerapan kesejahteraan hewan yang baik	

No .	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan dan Rekomendasi DPRD
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskesmas, Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan	100	%	100	Operasional pelayanan kesehatan hewan belum optimal	prasarana operasional perlu ditambah	
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan Wilayah yang Terkendali dari Bencana Pertanian	100	%	100			
				Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan an Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100	%	100	1. Minim alat dan bahan pengendalian OPT	1. Pengadaan alat dan bahan pengendali OPT (perangkap hama, pestisida, agens hayati, mist blower, bor dan injeksi tanaman) dan sarana penunjang hasil pengamatan OPT (bahan alat pengamatan OPT di lapangan)	

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan dan Rekomendasi DPRD
									2. Petani masih menerapkan pengendalian OPT menggunakan pestisida kimia	2. bimtek petani dan petugas dalam penerapan pengendalian OPT ramah lingkungan	
									3. Kompetensi petugas pengamat masih kurang	3. perlu magang, bimtek maupun pelatihan terkait pengamatan, pengendalian OPT	
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian	100	%	100			
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100	%	100	a. Perlunya update data kelompok tani dan anggota kelompok yang masih aktif	a. Monitoring dan pembinaan kepada petani	
									b. Kurangnya Sarana dan Prasarana di Balai Penyuluh Pertanian	b. Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Balai Penyuluhan Pertanian	

No .	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan dan Rekomendasi DPRD
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	21.71	Ton	22.143,3			
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100	%	100	Belum terlaksananya perjanjian kerjasama pinjam pakai aset antara pihak provinsi kalimantan timur dan Kota Bontang, dikarenakan masih ada klausul dalam perjanjian yang belum disepakati (menunggu addendum) antara kedua belah pihak, Sehingga proses penganggaran untuk pengadaan , pembangunan dan pemeliharaan	Percepatan pembahasan klausul kesepakatan Pinjam Pakai Aset antara Pemprov Kaltim dengan Pemkot Bontang	

No .	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan dan Rekomendasi DPRD
									an di TPI tidak dapat terlaksana.		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian Unit Pelayanan	100	%	100			

No .	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan dan Rekomendasi DPRD
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pemenuhan Prasarana Pertanian dan Peternakan Unit Pelayanan	100	%	100	persiapan sertifikasi NKV 2027, di UPT RPH belum adanya penyelia halal internal	pada tahun 2025, pengadaan bimtek serkom keur master	

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Tabel 3.30 Urusan Perdagangan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
	PERDAGANGAN								
1		DKUMPP		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	38%	37%			
				Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	100%	100%			
2				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	100%	100%			
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 unit	3 unit	Pembebasan Lahan Parkir Pasar Taman Citra Loktuan.	Meminta adanya anggaran pembebasan lahan di tahun 2025	Adanya usulan anggaran tersebut senilai Rp 2.152.000.000 dengan No Rek DPA 5.2.01.01..03.0002

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	20 orang	20 orang			
3				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100%	100%			
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	12 Laporan	12 Laporan			
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	23 Jenis	23 Jenis			
4				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	100%	100%			

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 usaha	2 usaha			
5				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	64%	64%			
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	64%	64%			
6				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	100%	100%			
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	5 Produk	5 Produk			

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Tabel 3.31 Urusan Perindustrian

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
	PERINDUSTRIAN	DKUMPP							
1				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	100%	100%			
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kurangnya data dan informasi yang akurat, perubahan regulasi yang tidak terprediksi	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi serta regulasi yang ada pada instansi terkait.	
2				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	2%	100%			
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	2%	100%	Belum optimalnya sinergitas, integrasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan perizinan (Keterbatasan kemampuan teknis Aparat, adanya perubahan regulasi/kewenangan, Penegakkan hukum)	Optimalisasi sinergitas, integrasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan perizinan melalui kegiatan Koordinasi pada OPD dan Instansi terkait	

No.	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
3				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3%	2,97%	Masih banyaknya Pengusaha Industri Kecil Menengah yang belum masuk ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memberikan sosialisasi dan pendampingan tata cara masuk ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	5 IKM	5 IKM	Masih banyaknya Pengusaha Industri Kecil Menengah yang belum masuk ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memberikan sosialisasi dan pendampingan tata cara masuk ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	

3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan tugas unsur pendukung urusan Pemerintah dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah, meningkatnya harmonisasi penataan produk hukum daerah, meningkatnya harmonisasi kebijakan perekonomian daerah, terwujudnya pelayanan administrasi pengadaan barang dan jasa. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sebagai unsur pendukung urusan Pemerintah, Sekretariat Daerah berupaya meningkatkan kinerja secara terus menerus dengan menggali potensi sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan terbaik dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Potensi tersebut perlu dikaji dan dikembangkan secara optimal sehingga menjadi modal dasar bagi Pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sedangkan tugas dari Sekretariat DPRD adalah meningkatkan kualitas pelayanan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Tabel 3.32 Urusan Pemerintahan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	1) Perda Kota Bontang No. 9 tahun 2024	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan	100%	100%			

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		tentang PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda)	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Tata Pemerintahan	1 Kebijakan	1 Kebijakan			
		2) Perda Kota Bontang No. 10 tahun 2024	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5 Kebijakan	5 Kebijakan			
		tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kebijakan produk hukum yang diharmonisasi	40 Kebijakan	40 Kebijakan			
		3) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 tahun 2024 tentang SOTK Perangkat Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerjasama daerah	10 MoU	10 MoU			
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomian 2. Presentase implementasi kebijakan	100% 3 Kebijakan	100% 3 Kebijakan			

Ururan pemerintah n	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan n	Upaya Mengatasi Permasalahan n	Tinjut Rekomenda si DPRD
		4) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 12 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah		bidang pembangunan					
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan dan dilaksanakan	16 Laporan	16 Laporan			
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Implementasi Program Prioritas Pembangunan	16 Program Prioritas	16 Program Prioritas			
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa	100%	100%			
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa	3 Kebijakan n	3 Kebijakan n			
		5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 17 tahun 2024	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai IKM Perangkat Daerah	A (87,00) 100%	A (87,00) 100%			

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bontang Kreatif	KABUPATEN/KOTA	2. Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
		6) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 24 tahun 2024	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan	3 Laporan	3 Laporan			
		tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	125 Orang	125 Orang			
		7) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 tahun 2024 tentang	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	114 Orang	114 Orang			

Ururan pemerintah n	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan n	Upaya Mengatasi Permasalahan n	Tinjut Rekomenda si DPRD
		Penyelengga raan Sistem Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah 8) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 27 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	50 Layanan	50 Layanan			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan Barang Milik Daerah	11 Jenis	11 Jenis			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Jenis	8 Jenis			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	60 Jenis	60 Jenis			
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH/WKDH yang mendapatkan layanan	2 Orang	2 Orang			

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Pemerintah Daerah		administrasi keuangan					
		9) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 34 tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	30 Jenis	30 Jenis			
			Penataan Organisasi	Jumlah kegiatan penataan organisasi	11 Kegiatan	11 Kegiatan			
		10) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 35 tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	791 Kegiatan	791 Kegiatan			

Ururan pemerintah n	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomenda si DPRD
		Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Sekretariat Daerah Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan							
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1) Perda Kota Bontang No. 7 tahun 2024 tentang Mitigasi Bencana Banjir	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1) Cakupan layanan tugas fungsi anggaran 2) Cakupan layanan Tugas fungsi legislasi	100% 100% 100%	100% 100% 100%			

Ururan pemerintah n	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomenda si DPRD
		2) Perda Kota Bontang No. 8 tahun 2024 tentang Pengembangan Wakaf Produktif di Daerah		3) Cakupan layanan tugas fungsi pengawasan					
		3) Perda Kota Bontang No. 11 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	100%	100%			
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran yang dibahas	100%	100%			
		4) Perda Kota Bontang No.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terpenuhinya fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%			

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		12 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas DPRD	100%	100%			
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terpenuhinya fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	100%			
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100%	100%			
			Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terpenuhinya fasilitasi pembahasan kerja sama daerah	100%	100%			

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Fasilitasi Tugas DPRD	Terpenuhinya tugas DPRD yang difasilitasi	100%	100%			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Dengan Tahapan dan Waktu	100%	100%			

Ururan pemerintah n	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100%	100%			

Ururan pemerintah n	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomenda si DPRD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100%	100%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%			
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tingkat pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	100%			
			Layanan Administrasi DPRD	Terpenuhinya layanan administrasi DPRD	100%	100%			

3.2.5 Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kota Bontang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi pelaksanaan fungsi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur penunjang pemerintahan dilaksanakan melalui:

1. Bidang perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
2. Bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah
3. Bidang kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia
5. Bidang penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di Kota Bontang pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditentukan. Pencapaian pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan Kota Bontang tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

Tabel 3.33 Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

N o	Urusan Pemerintahan	Organisasi	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Targ et	Realis asi	Permasala han	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomen dasi DPRD
I.	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun	1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persen	86	98,68			
			Anggaran 2024 2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2024	a	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	4	4			
			3) Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Satu Data Kota Bontang 4) Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penganggaran,	b	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan yang disediakan	data	3200	3200	Keterbatasan SMD dalam manajemen Data	1) pengadaan PPPK atau CPNS untuk pengolah dan pengelola data 2) Memaksimalkan SDM yang ada dengan meningkatkan kompetensi manajemen data	
				c	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi	dokumen	4	4			

N o	Urusan Pemerintahan	Organisasi	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Targ et	Realis asi	Permasala han	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomen dasi DPRD
			Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan PertanggungJawaban serta			Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							
			Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial										
			5) Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	2		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	Persen	94	88,62	1. Kurangnya koordinasi antar instansi;2. Keterbatasan waktu dan jadwal yang padat;3. Pengawasan yang lemah	1. Meningkatkan FGD baik bersifat internal pada Jafung Perencana maupun dengan stakeholder terkait dengan Indikator Kinerja.2. Mengevaluasi jadwal kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, dan membuat skala prioritas kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan	
			6) Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024										
			7) Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penajbaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan										

N o	Urusan Pemerintahan	Organisasi	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Targ et	Realis asi	Permasala han	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomen dasi DPRD
			Belanja Daerah Tahun 2024 8) Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025								Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan mengacu target kinerja yang telah ditetapkan.	
				a .	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	Dokumen	2	2			

N o	Urusan Pemerintahan	Organisasi	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Targ et	Realis asi	Permasala han	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomen dasi DPRD
				b .	Koordinasi Perencana an Bidang Perekonom ian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pembanguna n daerah Bidang Perekonomia n dan SDA yang disusun	dokem en	2	2			
				c .	Koordinasi Perencana an Bidang Infrastrukt ur dan Kewilayah an	Jumlah dokumen perencanaan pembanguna n daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	dokem en	2	2			
				3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah an daerah	persen	100	100			
				a .	Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100			

N o	Urusan Pemerintah an	Organisasi	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan			Indikator Program/Kegi atan	Satuan	Targ et	Realis asi	Permasala han	Upaya Mengatasi permasalahan	Tinjut Rekomen dasi DPRD
				b .	Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah		Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	Persen	100	100			
				c .	Administra si Umum Perangkat Daerah		Terpenuhiny a pegawai yang mendapatka n layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100			
				d .	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah		Tingkat Pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	Persen	100	100			
				e .	Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah		Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	Persen	100	100			
				g .	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah		Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	100			

2. Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Tabel 3.34 Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan (BAPENDA)

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	1) Peraturan Daerah Kota Bontang No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2) Peraturan Daerah Kota Bontang No. 6 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 3) Peraturan Wali Kota Bontang	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			1. Penetapan Pajak Daerah Tahun 2023 berdasarkan realisasi Tahun 2021 (Tahun N-1). 2. Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 , memutuskan bahwa Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tidak boleh dipungut setelah 12 Desember 2021. 3. Realisasi Tahun 2021 dipengaruhi dengan adanya
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	6 Dokumen			
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	3 Dokumen	6 Dokumen			

Ururan pemerintah an	Organisa si Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomenda si DPRD
		Nomor 19 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%			Pandemi Covid-19, sehingga berpengaruh pada target Pajak Daerah Tahun 2023. 4. Penetapan Target Tahun 2024 berdasarkan realisasi tahun 2022, dengan memperhatikan potensi dan pertumbuhan ekonomi. 5. Penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 17 Januari 2024.
		4) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%			
		5) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 32 tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Mebelair	100%	100%			
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%			
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	76%	Tidak akan dilaksanakan pemeliharaan gedung kantor	Mengurangi anggaran sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Urusan pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		Daerah 6) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 36 tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 7) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 37 tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 8) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 39 tahun 2024	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100%	100%			
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	Ada beberapa sub kegiatan yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga kesulitan melengkapi dokumen pertanggungjawaban	Selalu berkoordinasi dengan pihak ketiga agar dokumen yang diperlukan segera dilengkapi	

Urusan pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah							

Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan (BPKAD)

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
I	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
I.1			2) Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi belanja tidak terduga	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
I.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
I.3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%			
I.4			3) Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
I.5			4) Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
I.6				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			

I.7			5) Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
I.8			6) Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas peraturan wali kota nomor 16 tahun 2023 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
II			7) Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan wali kota nomor 56 tahun 2024 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 8) Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%			
					31 OPD	31 OPD			
II.1				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen			
II.2				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	31 OPD	31 OPD			
II.3				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	31 OPD	31 OPD			
II.4				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
II.4				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	3 Dokumen	3 Dokumen			

				Daerah Lingkup Keuangan Daerah					
III				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%			
III.1				Pengelolaan Barang Milik Daerah	31 OPD	31 OPD			

3. Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian

Tabel 3.35 Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1.	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100 persen	100 persen	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100%			

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkatan pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	50 org/bulan	100%			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumn	1 dokume n	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100 persen	100 persen	100%			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 paket	6 paket	100%			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	53 orang	53 orang	100%			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	98 orang	98 orang	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan	100 persen	100 persen	100%			

					layanan administrasi perkantoran						
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	5 paket	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4 paket	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	100%			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 unit	3 unit	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	80 unit	79 unit	99%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung	208 unit	163 unit	78%			

				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kantor atau bangunan lainnya yang disediakan						
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100 persen	100 persen	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	22 unit	100%			

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 unit	28 unit	100%			
				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	1 unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%			
2	Urusan Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang	-	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAEARH	Persentase Kinerja Layanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	100%			
					Persentase ASN Berkinerja minimal bernilai baik	97 peren	99 persen	100%			
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN	5 layanan	5 layanan	100%			
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk	1 dokumen	1 dokumen	100%			

				Pelaksanaan Pengadaan ASN	pelaksanaan pengadaan						
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	1 dokumen	100%			
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	1 dokumen	1 dokumen	100%			
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	1 lembaga	100%			
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	100%			
				Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah layanan promosi dan mutasi ASN	3 layanan	3 layanan	100%			
				Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%			

				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	450 dokumen	706 dokumen	100%			
				Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 dokumen	2 dokumen	100%			
				Pengelolaan Kompetensi ASN	Jumlah pengembangan kompetensi ASN yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%			
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	20 orang	101 orang	100%			
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	315 orang	323 orang	100%			
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	5 kegiatan	5 kegiatan	100%			
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3361 dokumen	3361 dokumen	100%			
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 laporan	12 laporan	100%			

				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	110 orang	109 orang	99%			
				Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 orang	65 orang	100%			
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 laporan	1 laporan	100%			

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 3.36 Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1.	Urusan Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang	-	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kompetensi minimal 20 JP per tahun	30 persen	51 Persen	100%			
				Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah pengembangan kompetensi teknis ASN yang dilaksanakan	18 kegiatan	24 kegiatan	100%			
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1379 orang	1379 orang	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional pegawai	4 kegiatan	4 kegiatan	100%			
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 laporan	1 laporan	100%			

5. Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Tabel 3.37 Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

N o.	Urusan Pemerintahan	Organisasi	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Targ et	Realis asi	Perm asala han	Upaya Mengat asi permas alahan	Tinjud Rekom endasi DPRD
I.	PERENCAN AAN	Badan Perencanaa n Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2024 3) Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Satu Data Kota Bontang 4) Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan PertanggungJawab an serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 5) Peraturan Wali Kota Nomor 16	1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	Persen	78,57	78,6			
				a	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan	Kegiatan Kelitbang an	4	4			
				b	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian dan Rekomendasi bidang ekonomi dan Pembangunan	dokumen	1	1			
						Persentase keberlanjutan inovasi daerah	Persen	91,17	91,2			
				c	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah	inovasi	150	150			
				2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan program penunjang urusan	persen	100	100			

N o.	Urusan Pemerintahan	Organisasi	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Targ et	Realis asi	Perm asala han	Upaya Mengat asi permas alahan	Tinjut Rekom endasi DPRD
			Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025			pemerintahan daerah						
			6) Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100			
			7) Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penajbaran Perubahan Anggaran	b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	Persen	100	100			
			Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100			
			8) Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	Persen	100	100			
				e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	Persen	100	100			
				g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	100			

3.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjalankan unsur pengawasan urusan pemerintahan adalah Inspektorat dengan tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.

Tabel 3.38 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Inspektora t Daerah	1) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 29 tahun 2024 tentang Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan pengawasan penyelenggaraa n urusan pemerintahan daerah berbasis risiko	80%	100%			
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah penyelesaian pembinaan dan pengawasan internal perangkat daerah	275 laporan	310 laporan			
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kasus yang telah	5 kasus	5 kasus			

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
		2) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 30 tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan <i>Whistleblowing</i> System di Lingkungan Pemerintah Daerah		selesai ditindaklanjuti					
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kebijakan pembinaan dan pengawasan yang telah ditetapkan	100%	100%			
				Persentase Perangkat daerah yang telah dilakukan pendampingan	95%	100%			
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan pembinaan dan pengawasan	1 kebijakan	1 kebijakan			
			Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan pendampingan dan asistensi pembinaan dan pengawasan	20 kegiatan	21 kegiatan			
			PROGRAM PENUNJANG	Persentase pemenuhan	100%	100%			

Ururan pemerintah n	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomenda si DPRD
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	layanan penunjang urusan pemerintahan daerah					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100%	100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100%	100%			

Ururan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100%	100%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100%	100%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%			

3.2.7 Urusan Kewilayahan dan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dijelaskan bahwa kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten/kota dan kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan. Serta berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, untuk unsur kewilayahan ini meliputi kecamatan.

Tabel 3.39 Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
Kecamatan	Kecamatan Bontang Selatan	1) Perda Kota Bontang No. 6 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
		2) Peraturan Wali Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan	100 %	100 %			

Ururan pemerintah n	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomenda si DPRD
		Bontang Nomor 19 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 3) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024		Administrasi Kepegawaian					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa layanan Umum Perkantoran	100 %	100 %			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	100 %			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	97 %	100 %			
				Cakupan tugas penyelenggara	97%	100 %			

Ururan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				n pemerintahan yang dilaksanakan					
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Subjek Koordinasi	4 subyek	4 subyek			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3 urusan/ kegiatan	3 urusan/ kegiatan			
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah objek koordinasi	6 objek	6 objek			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	100%			

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 lembaga	3 lembaga			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100%			
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	2 Perda/Perkada	2 Perda/Perkada			

Ururan pemerintah n	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomenda si DPRD
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan			

Ururan pemerintah n	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomenda si DPRD
Kecamatan	Kecamatan Bontang Utara	1) Perda Kota Bontang No. 6 tahun 2024 tentang Perubahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			

Ururan pemerintah n	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomenda si DPRD
		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 2) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 19 tahun 2024	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	227 pegawai	122 pegawai	dikarenakan adanya kesalahan penginputan diawal dan berkurangnya jumlah pegawai karena pensiun dan meninggal	telah dilakukan penyesuaian jumlah pegawai	
		tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 3) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2024	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	227 pegawai	122 pegawai	dikarenakan adanya kesalahan penginputan diawal dan berkurangnya jumlah pegawai karena pensiun dan meninggal	telah dilakukan penyesuaian jumlah pegawai	
		tentang Penjabaran Perubahan Anggaran	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan	3 kegiatan	3 kegiatan			

Ururan pemerintah n	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomenda si DPRD
		Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024		Pemerintah Daerah					
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	2 laporan			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Dipelihara	5 jenis	5 jenis			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	7 layanan	7 layanan			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
				Cakupan tugas penyelenggaraa n pemerintahan yang dilaksanakan	98%	100 %			

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Subjek Koordinasi	3 koordinasi	3 koordinasi			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan	7 urusan	7 urusan			
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi	6 kali	6 kali			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	100%			

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 lembaga kemasyarakatan	3 lembaga kemasyarakatan			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100%			
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	1 kegiatan	1 kegiatan			

Urutan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan			

Ururan pemerintah n	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan n	Upaya Mengatasi Permasalahan n	Tinjut Rekomenda si DPRD
Kecamatan	Kecamatan Bontang Utara	1) Perda Kota Bontang No. 6 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 2) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 19 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 3) Peraturan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	227 pegawai	122 pegawai	dikarenakan adanya kesalahan penginputan diawal dan berkurangnya jumlah pegawai karena pensiun dan meninggal	telah dilakukan penyesuaian jumlah pegawai	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	227 pegawai	122 pegawai	dikarenakan adanya kesalahan penginputan diawal dan berkurangnya jumlah pegawai karena	telah dilakukan penyesuaian jumlah pegawai	

Ururan pemerintah n	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomenda si DPRD
		Wali Kota Bontang Nomor 21 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024					pensiun dan meninggal		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 kegiatan	3 kegiatan			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 laporan	2 laporan			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Dipelihara	5 jenis	5 jenis			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	7 layanan	7 layanan			

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	98%	100 %			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Subjek Koordinasi	3 koordinasi	3 koordinasi			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan	7 urusan	7 urusan			
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi	6 kali	6 kali			

Urusan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	100%			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 lembaga kemasyarakatan	3 lembaga kemasyarakatan			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100%			

Ururan pemerintah n	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	1 kegiatan	1 kegiatan			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan			

3.2.8 Unsur Pemerintahan Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, unsur pemerintahan umum mencakup urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum di Kota Bontang pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan, dan Urusan kesatuan bangsa dan politik diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bertujuan pada meningkatnya kondusifitas wilayah, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.40 Unsur Pemerintahan Umum
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pemerintahan Umum	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Satpol PP 3. BPBD	1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 2) Peraturan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	63%	63%	Program-program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang kurang dipromosikan secara efektif ke masyarakat. Beberapa pihak mungkin merasa kurang terlibat atau tidak memahami urgensi program tersebut dalam kehidupan mereka.	1. Mengadakan pelatihan atau seminar untuk kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok ibu rumah tangga, pekerja, atau pensiunan, untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Meningkatkan peran media sosial dan media	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
			Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 3) Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang					komunikasi yang lain guna menyebarluaskan informasi yang bermuatan penguatan idiologi pancasila	
			Penajbaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	72%	72%	Konflik internal dalam tubuh partai yang tidak segera diselesaikan sehingga mengganggu kinerja partai politik salah satunya ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan politik	Transparansi dalam Laporan, Sangat penting bagi partai politik berkomitmen pada akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana politik, serta dapat mengurangi potensi konflik internal yang muncul akibat kurangnya kepercayaan antar anggota	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	86%	86%	Data ormas yang terdaftar tidak terupdate dan dilaporkan secara berkala selanjutnya	1.Meningkatkan upaya sosialisasi & pembinaan kepada ormas tentang pentingnya	

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
							masih rendahnya kesadaran ormas untuk melegalkan organisasinya	melegalkan organisasi mereka melalui badan hukum atau pendirian badan usaha. 2. Memberikan sanksi tegas kepada Ormas berupa pembatasan gerak ormas bila tidak melegalkan organisasinya	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	93%	93%	Dengan masuknya unsur pengembangan ketahanan ekonomi program ini menjadi bias.	Ketahanan ekonomi disini lebih bisa difokuskan pada mitigasi bahaya perpecahan dan konflik yang dapat terjadi di masyarakat disebabkan oleh tidak stabilnya ketahanan ekonomi	
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100%	100%	Deteksi dini terhadap potensi konflik sosial dan ancaman terhadap kewaspadaan nasional terkadang tidak dilakukan dengan optimal. Kurangnya sistem yang efektif untuk mendeteksi ancaman atau ketegangan sosial bisa membuat	1.Membangun sistem deteksi dini yang berbasis teknologi untuk memantau potensi ancaman dan ketegangan sosial. 2.Menggunakan data dan analisis berbasis teknologi informasi, serta melibatkan masyarakat dalam pelaporan potensi konflik, dapat	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tindalanjut Rekomendasi DPRD
							upaya penanganan menjadi terlambat.	meningkatkan efektivitas deteksi dini dan respons cepat	

3.3 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bontang tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3.41
Kebijakan Strategis Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
1.	Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kepastian hukum penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
2.	Pengaturan tentang rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bontang sampai dengan 2036	Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bontang Tahun 2016-2036	memberikan kepastian hukum dalam penataan ruang, mengendalikan pemanfaatan ruang, serta mendorong investasi yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan
3.	Tumbuh kembangkan budaya gemar membaca	Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan masyarakat, pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan
4.	Pencegahan dan mitigasi bencana banjir	Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Mitigasi Bencana Banjir	diharapkan permasalahan terkait banjir, seperti kerugian harta benda, gangguan aktivitas masyarakat, dan kerusakan infrastruktur, dapat diminimalkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
5.	Pengembangan Wakaf Produktif di Daerah	Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Wakaf Produktif di Daerah	Pemberdayaan Ekonomi Umat
6.	Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	bertujuan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri, tanpa diskriminasi, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Perda ini mengatur berbagai aspek, termasuk aksesibilitas, pelayanan publik, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas
7.	Percepatan Penurunan Stunting	Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting	peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, serta optimalisasi program intervensi gizi spesifik dan sensitif

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Dalam penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2023 terdapat beberapa catatan strategis berupa rekomendasi untuk menyempurnakan penyelenggaraan pemerintah daerah, terdapat catatan dan rekomendasi tersebut telah ditindak lanjuti sebagai berikut :

Tabel 3.42**Tindak lanjut rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Pansus LKPJ meminta Pemerintah Kota Bontang agar seluruh kegiatan fisik segera dilaksanakan pada awal tahun, sehingga tidak menumpuk pada semester kedua khususnya menjelang perubahan APBD.	Pemerintah telah mengupayakan percepatan dalam proses lelang pengadaan/pembangunan kegiatan fisik pada tahun 2024	Proses lelang yang selama ini tidak dimulai diawal tahun
2	Pansus LKPJ meminta Pemerintah Kota Bontang segera mensosialisasikan peraturan daerah yang berdampak kepada masyarakat sehingga tidak terjadi gejolak atau permasalahan.	Pemerintah Kota Bontang telah melakukan sosialisasi peraturan melalui masing-masing Perangkat Daerah.	Sosialisasi peraturan yang berdampak kepada masyarakat
3	SKPD dilingkungan pemerintah kota Bontang segera menyusun Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) setiap tahun, dan selanjutnya dilakukan evaluasi dan penyempurnaan Anjab dan ABK pada tahun berkenaan sehingga perencanaan penempatan pegawai dapat terukur dengan baik dan tidak terjadi kekurangan pegawai pada satu perangkat daerah. Diantaranya Kesbangpol dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.	Bahwa Bagian Organisasi telah menyampaikan kepada Bakesbangpol dan DP3AKB untuk melakukan penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Berdasarkan peta jabatan yang disusun pada Bakesbangpol terdapat kekurangan pegawai sebanyak 29 orang dari kebutuhan 50 jabatan. Sedangkan pada DP3AKB terdapat kekurangan pegawai sebanyak 58 orang dari kebutuhan sebanyak 89 jabatan. Namun kekurangan tersebut sudah diisi oleh tenaga kontrak daerah yang di tahun 2025 akan mengikuti proses penataan Non ASN menjadi PPPK/PPPK Paruh Waktu.	Pemenuhan kebutuhan SDM.

No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
4	Pansus LKPJ meminta Pemerintah Kota Bontang untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang setiap tahunnya pagu anggaran tidak sesuai dengan beban kerja.	Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2024 memberikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan. Alokasi yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahun 2024 mengacu pada RPJMD dan Renstra PD pada pelaksanaan tahun 2024.	Pemenuhan kebutuhan anggaran DP3AKB
5	Pansus LKPJ meminta ketegasan Pemerintah Kota Bontang melalui DPMPTSP demi mewujudkan kota yang ramah investasi agar memudahkan proses perizinan khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk mewujudkan kota yang ramah investasi dan memberikan kemudahan pelayanan salah satunya dengan proses perijinan PBG. Beberapa kendala yang terjadi dalam proses perijinan PBG disebabkan oleh perubahan regulasi perijinan PBG itu sendiri dan mekanisme pengajuan ijin melalui OSS.	Mewujudkan kota Bontang yang ramah investasi
6	Sesuai prinsip pengelolaan keuangan yakni pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, memeriksa, dan mengawasi, maka pansus LKPJ meminta agar fungsi perencanaan tidak dirangkap oleh personel yang sama dalam hal ini seperti Bendahara	Perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap pembagian tugas dari atasan kepada bawahan menyesuaikan dengan jabatan yang diemban, sehingga tidak terjadi tumpang tindih terhadap tugas dan fungsi jabatan. Rangkap tugas/fungsi dalam penyelenggaraan perencanaan dan penatausahaan keuangan juga dapat terjadi karena belum terpenuhinya kebutuhan jabatan pada fungsi tersebut, untuk itu perlu dilakukan pemenuhan terhadap kekurangan jabatan agar tugas dan fungsi perencanaan dan penatausahaan keuangan dapat berjalan dengan baik.	Pemenuhan SDM yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan dan penatausahaan keuangan.

No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
7	Pansus LKPJ meminta kepada Pemerintah Kota Bontang segera melakukan pembangunan fisik gedung bagi perangkat daerah yang belum memiliki kantor sendiri.	Pemerintah Kota Bontang telah melaksanakan pembangunan beberapa kantor pada tahun 2024 yaitu : 1. Gedung kantor Satpol PP 2. Gedung uji KIR 3. Gedung Kelurahan Satimpo 4. Gedung UPT Perlindungan Perempuan dan Anak 5. Gedung Kelurahan Api-api	Pembangunan fisik bagi Perangkat Daerah yang belum memiliki kantor
8	Pemerintah Kota Bontang melalui bidang urusan sosial dan kemiskinan agar menyampaikan data secara akurat dan <i>update</i> sesuai <i>real time</i> , sehingga diharapkan tidak ada lagi data ganda kemiskinan atau data yang tidak tepat sasaran, seperti halnya nama seorang pejabat daerah yang terdata sebagai orang miskin penerima bantuan.	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat telah melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang hasilnya di tetapkan oleh Kementrian Sosial.	Penerima bantuan sosial tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sesuai Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
9	Pemerintah Kota Bontang dalam hal ini Wali Kota harus tetap berkoordinasi dan sinergi dengan DPRD Kota Bontang terkait penyusunan dan pembahasan APBD agar terhindar dari sanksi administrasi keuangan.	Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk bersinergi dengan DPRD Kota Bontang dalam proses penyusunan APBD dengan tetap memperhatikan petunjuk pelaksanaan sesuai dengan Permendagri yang mengatur tentang penyusunan APBD tahun berkenaan.	Tertib administrasi dalam penyusunan APBD

No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
10	Pemerintah Kota Bontang agar memberikan sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di lingkungan Pemerintah Kota Bontang tanpa membedakan antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tenaga Kontrak Daerah (TKD). Dalam beberapa kasus penyalahgunaan narkotika, Pemerintah Kota Bontang hanya bersikap tegas terhadap TKD.	Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari narkotika. Terhadap ASN dan TKD yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya telah diberikan pembinaan dan sanksi yang tegas.	Sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika
11	Dalam melaksanakan mutasi pegawai, Pemerintah Kota Bontang belum sepenuhnya menjalankan sistem merit dalam manajemen ASN. Hal itu terlihat dari penempatan beberapa pejabat masih terkesan memprioritaskan lulusan almamater tertentu. Melalui Tim Baperjakat perlu memberikan kesempatan pegawai ASN dalam rangka pembinaan karier pegawai, sehingga diharapkan kesempatan berkompetensi dapat berjalan secara terbuka, adil dan transparan.	Pemerintah Kota Bontang dalam melaksanakan manajemen ASN berkomitmen untuk menjalankan secara adil, objektif dan tanpa diskriminasi dengan memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai.	Penyelenggaraan manajemen ASN berbasis sistem merit
12	Rekomendasi pansus LKPJ tahun sebelumnya melalui Dinas Lingkungan Hidup terkait pembangunan laboratorium lingkungan yang belum terlaksana sehingga Pansus LKPJ Tahun Anggaran 2023 kembali menyarankan agar pembangunan tersebut segera ditindaklanjuti.	Pembangunan laboratorium sudah dianggarkan pada tahun 2025 dan saat ini tahap persiapan dokumen lelang	Pembangunan laboratorium lingkungan

No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
13	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pendidikan meminta secara berkelanjutan meningkatkan mutu Pendidikan dengan meningkatkan program kegiatan belajar dan mengajar, pembangunan, renovasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk sekolah-sekolah di kota Bontang khususnya di pulau – pulau dan pesisir. Program pemberian perlengkapan sekolah di tahun ajaran baru masuk sekolah, dan kegiatan lainnya yang mendukung program pendidikan agar disegerakan.	Pembangunan Ruang Sekolah Baru terdiri dari SDN 002 BB, SDN 004 BS, SDN 009 BU, SDN 010 BU, SMPN 2	Dalam rangka untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal agar peserta didik dapat belajar dengan baik.
		Renovasi Sarana dan prasarana hampir seluruh sekolah negeri sudah dilakukan mulai jenjang TK, SD sampai dengan SMP	Memberikan layanan yang baik terhadap peserta didik sehingga betah belajar dengan suasana yang nyaman, aman dan menyenangkan.
		Program Bimbingan Teknis untuk Guru mulai Guru PAUD, SD sampai dengan SMP dalam rangka untuk meningkatkan mutu pembelajaran	Dalam rangka untuk perbaikan cara pembajaran yang terjadi di sekolah sehingga memberikan yang terbaik untuk peserta didik sehingga mendapat pendidikan yang bermutu serta berpusat pada peserta didik.
		Perbaikan dan pembangun Ruang Guru/Kepala Sekolah untuk SDN 011 BU (Gusung), Perbaikan SDN 015 BS (Selangan), Perbaikan SDN 016 BS (Tihi-tihi)	Untuk memenuhi sarana dan prasarana serta memudahkan masyarakat pesisir untuk menerima akses pendidikan yang layak dan bermutu walaupun merek tinggal di daerah pesisir
		Sewa Transportasi (Kapal) untuk guru dan Siswa SD Tihi-tihi, Selangan dan Gusung	Memudahkan para guru untuk melaksanakan tugasnya sehingga tidak terjadi kekosongan guru di kelas yang berdampak proses pembelajaran
		Pengadaan Seragam dan Kelengkapan untuk Peserta Didik Baru atau Tahun Ajaran baru telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi DPRD	untuk meringkan beban ekonomi orang tua pada saat penerimaan siswa baru karena sudah terbantu perlengkapan anaknya sudah terpenuhi
14	Rumah Sakit Tipe D agar segera dimanfaatkan dan difungsikan sesuai dengan tujuan pembangunan Rumah Sakit tersebut.	Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk dapat menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Tipe D. Beberapa hal yang perlu dilakukan persiapan agar Rumah Sakit Tipe D dapat berfungsi dengan baik adalah : 1. Renovasi ruangan sesuai dengan standar rumah sakit 2. Pembebasan lahan parkir 3. Pembangunan sistem IPAL 4. Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit	Pemanfaatan rumah sakit tipe D di Kota Bontang

No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
15	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan RSUD perlu melaksanakan pengawasan dalam penanganan prevalensi stunting, gizi kurang dan gizi kurus bagi anak serta perbaikan pelayanan di RSUD untuk menarik klien lain di luar BPJS. Selain itu perlu meningkatkan pengelolaan Puskesmas menjadi BLUD sehingga dapat meningkatkan kinerja puskesmas.	Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk melakukan peningkatan pelayanan di RSUD untuk menarik klien lain selain BPJS seperti melakukan promosi layanan ke perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan RSUD, perbaikan kamar rawat inap dan akan membangun poliklinik estetika serta poli MCU. Sejak November 2024 seluruh pengelolaan puskesmas dan laboratorium kesehatan daerah telah menjadi BLUD. Pelaksanaan fungsi BLUD akan dilaksanakan pada tahun 2025.	Peningkatan pelayanan RSUD
16	Perlunya peningkatan sarana dan prasarana lahan parkir di RSUD Taman Husada untuk memenuhi standar rumah sakit tipe B.	Pada tahun 2024 telah dilakukan lahan parkir di depan RSUD	Peningkatan sarana dan prasarana lahan parkir RSUD
17	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Ketenagakerjaan diminta meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dengan membuka kursus, diklat, penyelenggaraan program magang yang memiliki sertifikasi yang diuji oleh Asesor BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) serta pemberian support belanja modal sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.	Telah dilaksanakan. Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan telah melatih sebanyak 1.237 orang pencari kerja dan yang bersertifikasi kompetensi BNSP sebanyak 1.037 orang atau 83.83 % dari jumlah seluruh pencari kerja yang dilatih. Untuk pemberian support belanja modal memang belum dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 menjelaskan bahwa pengadaan barang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas pada pencapaian	Tujuannya supaya pencari kerja yang dilatih mempunyai kemampuan atau skill yang mumpuni dan diakui karena sudah diuji oleh BNSP dan dapat berdaya saing di pasar kerja

No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Dan pemberian support belanja modal pada urusan tenaga kerja tidak tertuang di dalam RPJMD/RPD Kota Bontang.	
18	Pansus LKPJ meminta agar Pemerintah Kota Bontang melalui dinas ketenagakerjaan untuk mengatasi pengangguran di kota Bontang. Perlu adanya keterbukaan informasi lowongan pekerjaan melalui sistem informasi yang tersedia di pemerintah Kota Bontang.	Informasi lowongan kerja telah diinformasikan secara terbuka melalui media sosial Instagram dan facebook, serta papan pengumuman di Kantor Dinas Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk informasi melalui sistem informasi Pemerintah Kota Bontang telah dilakukan melalui website disnaker.bontangkota.go.id namun website tersebut sedang mengalami perbaikan, sehingga Dinas ketenagakerjaan menggunakan Lowongan Kerja Bontang (https://lowongankerjabontang.blogspot.com) sampai dengan perbaikan website disnaker.bontangkota.go.id selesai.	Tujuannya supaya informasi lowongan kerja tersebut dapat menyebarluas ke segala kalangan masyarakat, meskipun website resmi Dinas Ketenagakerjaan sedang dalam perbaikan.

No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
19	Dinas Ketenakerjaan perlu menginventarisir keluarga kurang mampu di kota Bontang untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) yang bersertifikat agar dapat dijadikan bekal untuk bekerja.	Dinas Ketenagakerjaan telah melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dalam rangka menginventarisir data keluarga kurang mampu di Kota Bontang. Pada tahun 2024, Dinas Ketenagakerjaan telah mengalokasikan anggaran pelatihan khusus keluarga kurang mampu sebesar Rp. 500.000.000.000,- dengan jenis pelatihan welder sebanyak 37 orang, namun pada pelaksanaannya hanya 3 orang dari keluarga kurang mampu yang mendaftar. Dinas Ketenagakerjaan juga melakukan kerjasama dengan kelurahan untuk penyebarluasan informasi pelatihan tersebut. Selain itu, hingga saat ini disetiap penyebarluasan informasi pelatihan Dinas Ketenagakerjaan mencantumkan di persyaratan bahwa diutamakan bagi keluarga kurang mampu.	Tujuannya supaya pencari kerja dari keluarga kurang mampu dapat memiliki skill atau keahlian sehingga dapat berdaya saing di pasar kerja serta mampu meningkatkan perekonomian keluarga.
20	Pansus LKPJ meminta kepada Pemerintah Kota Bontang agar meningkatkan nilai terkait pemberian insentif dan menyusun peraturan Wali Kota tentang tunjangan risiko pada pegawai yang melaksanakan tugas shift di Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Satpol PP dan rumah sakit.	Pemerintah Kota Bontang dalam pemberian TPP telah memperitungkan risiko yang diterima oleh pegawai dalam komponen dalam TPP berdasarkan kondisi kerja, yang mempertimbangkan besar/kecilnya risiko pekerjaan	Pemberian insentif/tunjangan tambahan bagi pegawai yang melaksanakan tugas shift

No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
21	Pansus LKPJ meminta kepada Pemerintah Kota Bontang untuk menambah sarana dan prasarana pemadam kebakaran berupa pengadaan fire ladder (mobil tangga), fire truck, pump truck, truck rescue, light fire tender (truck pemadam kebakaran ringan), dan penambahan pos pantau di Kelurahan Guntung dan Berbas Pantai.	Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Bontang telah menambah sarana dan prasarana pemadam kebakaran seperti fire truck, supply truck, fire jacket, selang, dan lain-lain. Penambahan pos pantau untuk kelurahan guntung dan berbas pantai telah dilaksanakan.	Pemenuhan sarana prasarana untuk Dinas Pemadam Kebakaran
22	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas atau Bagian Terkait segera melakukan langkah strategis yang terukur dan mempunyai target, agar BUMD melalui Perusda AUJ beserta anak usahanya dapat segera memberikan kontribusi nyata dalam bentuk setoran atau deviden kepada Pemerintah Kota Bontang.	• Melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan Dewan Pengawas AUJ. • Melakukan Koordinasi dan Studi Pembelajaran ke Pemerintah Kota Samarinda terkait Upaya Pengendalian Inflasi Daerah melalui Kerjasama dengan BUMD Varian Niaga. • Pelaksanaan beberapa Agenda Rapat untuk menelaah RKAP Perumda AUJ dengan bekerjasama dengan Inspektorat Daerah dan Pembahasan Permasalahan Perumda AUJ lainnya • Melaksanakan pelatihan Bimbingan Teknis pada seluruh BUMD beserta seluruh anak perusahaan	• Memilih Dewan Pengawas Perumda AUJ yang dapat melakukan pengawasan secara efektif terhadap kegiatan operasional Perumda AUJ. • Koordinasi ini diharapkan dapat memberikan peluang-peluang bisnis yang dapat dikelola oleh Perumda AUJ maupun memberikan gambaran untuk mengelola Perusahaan dengan baik. • RKAP tahun 2025 perlu disusun sesuai dengan kaidah penyusunan berdasarkan Peraturan yang berlaku, selain itu RKAP diharapkan dapat menjadi dasar rencana bisnis dalam meningkatkan efisiensi dan laba Perusahaan. • Pelatihan Bimbingan teknis pada seluruh BUMD dan anak perusahaan terkait Optimalisasi Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan sebagai upaya dari pemerintah untuk dapat meningkatkan kinerja dan dapat menjadi perusahaan yang lebih professional , profit dan berkelanjutan.
23	Pemerintah Kota Bontang diminta untuk menyelesaikan masalah internal/eksternal Perusda AUJ dan menindaklanjuti rekomendasi pansus LKPJ pada tahun sebelumnya.	• Bagian Perekonomian dan SDA Setda sebagai Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD secara rutin meminta pelaporan pada BUMD terkait rencana kerja , laporan kinerja dan keuangan serta daftar permasalahan untuk kemudian dilakukan	agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dapat menyusun dan menjalankan rencana kerja dan rencana bisnisnya secara jelas dan terukur.

No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		penelahaan • Melakukan penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pendirian Perumda Aneka Usaha dan Jasa dengan PP 54 Tahun 2017	
24	Pansus LKPJ meminta pemerintah Kota Bontang melalui dinas/bagian terkait segera menyusun peraturan Wali Kota Bontang mengenai tarif air bersih PDAM secara bertahap sesuai standar produksi sehingga tidak memberatkan masyarakat.	Persetujuan kenaikan tarif maksimal 10% telah disetujui KPM. Namun penyusunan Perwali Kenaikan Tarif masih belum dapat dilakukan, Karena pembaharuan Raperda PDAM perlu dilakukan terlebih dahulu , dan saat ini masih dalam proses penerbitan Perda PDAM di Bagian Hukum	Peraturan terkait tarif air bersih
25	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pendapatan agar lebih cermat dalam menentukan target pendapatan asli daerah di tahun 2024. Dalam penentuan target pendapatan pajak dan retribusi daerah Kota Bontang tahun 2023 jangan hanya memakai angka minimal, sementara masih banyak potensi pendapatan yang bisa dikembangkan untuk menambah PAD.	Dalam rangka penetapan target PAD tahun 2024, Bapenda dan Perangkat Daerah pemungut retribusi menyusun target tahun 2024 mengacu pada potensi riil baik pajak maupun retribusi daerah. Dalam rangka mengoptimalkan realisasinya pada tahun 2024, beberapa tindak lanjut yang ditempuh adalah sebagai berikut: Penetapan target pajak dan retribusi daerah telah melalui proses asistensi oleh TAPD; Melaksanakan dan mengimplementasikan Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pemungutan objek retribusi daerah yang baru yakni Retribusi Pemanfaatan Aset daerah pada sejumlah Perangkat Daerah. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi laporan realisasi Pajak dan Retribusi daerah pada setiap triwulan. Dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor PBB, Bapenda telah memulai melakukan validasi dan pendataan PBB	Penentuan target PAD tahun 2024

No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		yang akan mencakup seluruh wilayah Kota Bontang dan dilakukan secara bertahap melalui pemanfaatan Teknologi Pemetaan LiDAR. Melakukan koordinasi kepada Wajib Pajak Potensial terkait kewajiban pajak, khususnya Perusahaan di Kawasan Industri Pupuk Kaltim. Melaksanakan pelayanan PBB di kelurahan-kelurahan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; Membangun dan mengembangkan aplikasi layanan Pajak daerah secara online “Bapenda Etam” Memperluas media transaksi pembayaran non tunai dengan fasilitas QRIS, VA, Tokopedia, Indomaret, DG BankKatimTara, GOBIL, POS, dan LakuPandai. Menyelesaikan regulasi perpajakan dan retribusi daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan dan pemungutan pajak daerah:	
26	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas atau bagian terkait berkoordinasi untuk melakukan evaluasi Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Santunan Kematian bagi Penduduk Kota Bontang. Pansus LKPJ meminta agar persyaratan santunan kematian lebih disederhanakan lagi.	a. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sudah membuat surat Edaran Wali Kota nomor: 100.3.4.3/1887/DSPM tentang pedoman penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam pemberian santunan kematian bagi penduduk kota Bontang sebagai pedoman bahwa ahli waris penerima Santunan kematian harus masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). b. Pemohon tidak di persyaratkan pengandaan berkas. c. Pemohon tidak dibebankan materai untuk kuitansi pencairan	a. Penerima Santunan kematian tepat sasaran dan sesuai rekomendasi BPK bahwa ahli waris penerima santunan kematian harus masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) b. Pemohon lebih mudah dan tidak dibebankan biaya apapun dalam mengurus administrasi santunan kematian.

No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan		
27	Terkait aset pemerintah kota Bontang yang masih berada di pemerintah Kutai atau perusahaan, pansus LKPJ meminta agar segera dilakukan inventarisasi dan sertifikasi.	Pemerintah Kota Bontang secara rutin melakukan rekonsiliasi aset untuk mengidentifikasi aset daerah untuk meningkatkan tata kelola BMD. Pemerintah Kota Bontang juga telah melakukan inventarisir untuk aset yang berada di Kukar dan telah mengambil alih surat-surat aset dan dalam proses pengajuan sertifikat.	Inventarisasi dan sertifikasi aset Kota Bontang yang berada di Kutai Kartanegara		
28	Pansus LKPJ meminta kepada pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan agar segera melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi melakukan kerja sama dalam bentuk MoU tentang pengelolaan wilayah laut dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana nelayan kecil yang ada di kota Bontang.	Telah di lakukan koordinasi dengan DKP provinsi terkait untuk mendapatkan bantuan ke pada masyarakat	PA' RISTAN	Badan Perahu 6 m	12 unit
			NURANI	Mesin Ketinting 14 PK	5 unit
			TRAKULU BERSINAR 01	Mesin Ketinting 14 PK	10 unit
			TRAKULU BERSINAR 02	Mesin Ketinting 14 PK	10 unit
			MULA MENRE	Mesin Ketinting 14 PK	10 unit
			MACCOLLI LOLOE	Mesin Ketinting 14 PK	8 unit
			NYERAKAT MAJU	Mesin Ketinting 14 PK	12 unit
			HIDUP BERSAMA	Mesin Diesel 24 PK	13 unit
			BERKAH USAHA	Mesin Diesel 24 PK	11 unit
			USAHA MAJU	Mesin Ketinting 18 PK	10 unit

No	Uraian Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
29	Pansus LKPJ meminta ke Pemerintah Kota Bontang memfasilitasi kebutuhan petani mendapatkan bantuan sarana dan prasarana yang menggarap lahan di kawasan hutan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No 28 Tahun 2023 dan PermenLHK No. 4 Tahun 2023.	Akan memfasilitasi permohonan bantuan di Kawasan hutan sosial	Melengkapi dengan surat permohonan dan proposal kelompok
30	Pansus LKPJ meminta Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas terkait dalam menetapkan pemenang lelang tidak hanya melihat nilai tawar terendah agar pembangunan fisik di kota Bontang lebih berkualitas dan dapat terlaksana sesuai jadwal.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan Evaluasi berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 serta Peraturan Turunannya yaitu Peraturan LKPP.	Penetapan Pemenang Tender atau Pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan bukan hanya berdasarkan harga penawaran terendah, Namun tetap melaksanakan tahapan evaluasi yaitu Evaluasi Administrasi, Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Teknis, dan tahapan akhir adalah Evaluasi Harga/Biaya, serta dilakukan klarifikasi atas dokumen penawaran dari peserta pemilihan

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bontang tahun 2024 diukur dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta dari pencapaian kinerja masing-masing kegiatan pada setiap urusan.



4.1 Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan

4.1.1 Identifikasi Tugas Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Daerah Atasnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, lalu ke pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintahan melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada daerah (gubernur/bupati/wali kota) atas beban APBN. Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2024 tidak mendapatkan anggaran tugas pembantuan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi

4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan PemerintXtahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintah Di Bawahnya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagai realisasi dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Bahwa wilayah Kota Bontang memiliki 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan dan tidak memiliki Desa, sehingga Pemerintah Kota Bontang tidak melaksanakan tugas pembantuan kepada tingkat pemerintah dibawahnya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bahwa Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah danan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa.

4.1.3 Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Upaya Penyelesaian

Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2024 tidak mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan baik dari Pemeirintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi serta tidak melaksanakan tugas pembantuan kepada tingkat pemerintahan dibawahnya.

4.2 Pelaksanaan Kegiatan Oleh Provinsi dan Pusat Di Kota Bontang

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Bontang menerima beberapa kegiatan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat Nomor: 600.1/Bid-SDA/2336/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024, perihal: pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Sumber Daya Air di Kota Bontang.

Tabel 4.1 Pelaksanaan Kegiatan dari Provinsi Kalimantan Timur

No.	Nama Kegiatan	Lokasi	Nilai Pagu Kegiatan
I.	Kegiatan Fisik		
1.	Pembangunan Sumur Dalam Jl. Selat Makassar	Kota Bontang	Rp 3.215.020.300
2.	Pembangunan Sumur Dalam Jl.Bhayangkara	Kota Bontang	Rp 4.602.211.800
3.	Pembangunan Sumur Dalam Gudang Tanjung Laut Indah	Kota Bontang	Rp 3.508.778.500
4.	Penyediaan Air Baku	Kota Bontang	Rp15.013.349.424
5.	Lanjutan Pengendalian Banjir Sistem Sungai Bontang (Swakelola Tipe II)	Kota Bontang	Rp10.002.299.200
II.	Kegiatan Supervisi		
1.	Supervisi Pembangunan Sumur Dalam Jl. Selat Makassar	Kota Bontang	Rp 376.600.000
2.	Supervisi Pembangunan Sumur Dalam Jl. Bhayangkara	Kota Bontang	Rp 376.600.000
3.	Supervisi Pembangunan Sumur Dalam Gudang Tanjung Laut Indah	Kota Bontang	Rp 376.600.000
4.	Supervisi Penyediaan Air Baku Kota Bontang	Kota Bontang	Rp 533.400.000
III.	Kegiatan Perencanaan		
1.	Studi Perencanaan Bangunan Konservasi Air di Kota Bontang	Kota Bontang	Rp 495.507.000
2.	UKL/UPL Normalisasi Sungai Bontang Kota Bontang	Kota Bontang	Rp 404.689.000
3.	UKL/UPL Bendung Sungai Bontang Kota Bontang	Kota Bontang	Rp 404.689.000

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, 2024

Selain kegiatan diatas juga terdapat pembangunan unit distribusi SPAM Regional Indominco Arah Bontang (Segmen 2) dengan nilai Kontrak Rp10.056.248.990 untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi HDPE Diameter 450 mm sepanjang 2.350 m beserta Instalasi Water Meter Induk Offtaker Teliha dengan sumber dana dari APBD TA 2024 Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur. Output pekerjaan ini adalah Jalur Pipa Distribusi SPAM Regional Indominco untuk Layanan Air Minum Curah 200 L/d Kota Bontang.

4.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah. DAK digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Adapun Dana Alokasi Khusus yang diterima Kota Bontang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Bontang Tahun 2024

No	Sub Bidang / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pagu
1	2	3	4
1	01.01 - PAUD		
	01.01.01 - Revitalisasi PAUD		
	01.01.01.04 - Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang - (TK NEGERI 1)	TK NEGERI 1 BONTANG	174.356.000
	01.01.01.09 - Pengadaan alat permainan edukatif (APE) dan alat pembelajaran (TK NEGERI 1)	TK NEGERI 1 BONTANG	41.347.000
	01.01.01.09 - Pengadaan alat permainan edukatif (APE) dan alat pembelajaran (TK NEGERI 2)	TK NEGERI 2 BONTANG	41.347.000
	Kegiatan Penunjang		
	01.01.00800 - Desain Perencanaan untuk kegiatan kontraktual (penugasan)		4.588.000
	01.01.01100 - Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan)		4.588.000
Sub Total			266.226.000
2	01.02 - SD		
	01.02.01 - Revitalisasi SD		
	01.02.01.02 - Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang beserta perabotannya (SD NEGERI 001 BONTANG BARAT)	SD NEGERI 001 BONTANG BARAT	1.437.408.000
	01.02.01.13 - Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotannya	SD NEGERI 010 BONTANG UTARA	298.372.000
	01.02.01.14 - Pembangunan ruang guru beserta perabotannya	SD NEGERI 010 BONTANG UTARA	285.400.000

No	Sub Bidang / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pagu
1	2	3	4
	01.02.01.18 - Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)	SD NEGERI 007 BONTANG UTARA	100.000.000
	01.02.01.18 - Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)	SD NEGERI 006 BONTANG UTARA	100.000.000
	01.02.01.18 - Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)	SD NEGERI 001 BONTANG BARAT	100.000.000
	01.02.01.18 - Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)	SD NEGERI 009 BONTANG UTARA	100.000.000
	Kegiatan Penunjang		
	01.02.01000 - Jasa pendamping/fasilitator non ASN kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Penugasan)		87.500.000
	01.02.01200 - Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (penugasan)		10.000.000
	01.02.01300 - Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan (penugasan)		3.000.000
	Sub Total		2.521.680.000
3	01.03 - SMP		
	01.03.01 - Revitalisasi SMP		
	01.03.01.01 - Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotannya	SMP NEGERI 4 BONTANG	1.630.000.000
		SMP NEGERI 5 BONTANG	489.000.000
	01.03.01.02 - Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotannya	SMP NEGERI 4 BONTANG	216.610.000
		SMP NEGERI 5 BONTANG	268.535.000
	01.03.01.04 - Rehabilitasi Ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minmal sedang beserta perabotannya	SMP NEGERI 4 BONTANG	69.044.500
		SMP NEGERI 5 BONTANG	69.044.500
	01.03.01.09 - Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	SMP NEGERI 4 BONTANG	108.068.000
		SMP NEGERI 5 BONTANG	108.068.000
	01.03.01.17 - Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotannya	SMP NEGERI 4 BONTANG	361.208.000
	01.03.01.21 - Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA)	SMP NEGERI 4 BONTANG	60.925.000
		SMP NEGERI 5 BONTANG	60.000.000
		SMP NEGERI 9 BONTANG	61.000.000

No	Sub Bidang / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Kegiatan Penunjang		
	01.03.01000 - Jasa pendamping/fasilitator non ASN kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Penugasan)		126.000.000
	01.03.01200 - Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (penugasan)		20.000.000
	01.03.01300 - perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan (penugasan)		5.000.000
	Sub Total		3.652.503.000
4	01.08 - Perpustakaan		
	01.08.01 - Pengembangan layanan perpustakaan daerah		
	01.08.01.02 - Perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota	BONTANG SELATAN	4.500.000.000
	01.08.01.04 - Pengadaan perabotan layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota	BONTANG SELATAN	500.000.000
	01.08.01.05 - Pengadaan TIK layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota	BONTANG SELATAN	300.000.000
	01.08.01.06 - Pengadaan bahan perpustakaan (cetak dan/atau digital)	BONTANG SELATAN	199.920.000
Sub Total			5.499.920.000
5	02.01 - Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting		
	02.01.02 Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap		
	02.01.02.02 - Temperatur Longger	BONTANG LESTARI	5.136.166
		BONTANG SELATAN I	5.136.166
		BONTANG SELATAN II	5.136.166
		BONTANG UTARA I	5.136.166
		BONTANG UTARA II	5.136.166
		BONTANG BARAT	5.136.166
Sub Total			30.816.996
6	02.02 - Penguatan Sistem Kesehatan		
	02.02.08 - Penyediaan Sarana dan Prasarana instalasi farmasi kabupaten/kota		
	02.02.08.03 - Kendararaan distribusi (kendaraan roda 2)	BONTANG UTARA	50.000.000
Sub Total			50.000.000

No	Sub Bidang / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pagu
1	2	3	4
7	03.01 - Jalan		
	03.01 - Penanganan Jalan (Kota)		
	03.01.05.01 - Penanganan long segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekontruksi)	Jl. Letjen Urif Sumoharjo	4.750.000.000
	Kegiatan Penunjang		
	03.01.01100 - Jasa konsultasi pengawas kegiatan kontraktual (penugasan)		245.000.000
Sub Total			4.995.000.000
TOTAL			17.016.145.996

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, 2024

4.1 Bantuan Keuangan (Bankeu)

Bantuan Keuangan adalah Bantuan berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah.

Tabel 4.3 Bantuan Keuangan (Bankeu) Kota Bontang Tahun 2024

NO	BIDANG	PAGU(RP)
Non Spesifik		
1.	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Guntung Kelurahan Guntung	26.500.000.000
2.	Rekonstruksi Jalan Soekarno-Hatta	10.000.000.000
3.	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kelurahan Gunung Elai	14.000.000.000
4.	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai RT 19 Kelurahan Gn Telihan dan RT 06 Kelurahan Kanaan	13.500.000.000
5.	Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota, Jalan Brokoli	2.100.000.000
6.	Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota Jalan Urip Soemeharjo Bontang Lestari	28.000.000.000
7.	Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota Jalan Moh. Roem	10.000.000.000
8.	Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota Jalan Satya Lencana	5.500.000.000
9.	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai RT.34 Kelurahan Api-api	20.000.000.000
TOTAL Non Spesifik		129.600.000.000
Spesifik		
1.	Bantuan keuangan untuk penyuluh pertanian	150.000.000
2.	Bantuan keuangan untuk pengawasan kepada inspektorat Bontang	350.000.000
3.	Bantuan keuangan untuk Tenaga terampil konstruksi	2.800.000.000
4.	Bantuan keuangan untuk penyuluh kesehatan (stunting)	82.740.000
Total spesifik		3.382.740.000
Grand total		132.982.740.000

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Bontang, 2024

BAB V

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA DAN PRESTASI/ PENGHARGAAN

Dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sangat diperlukan adanya dukungan dan partisipasi semua pihak karena pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan tanggung jawab bersama



5.1 Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pemerintah Kota Bontang sebagai penyelenggara pembangunan daerah menyadari sepenuhnya bahwa diperlukan adanya sinergi dan kerjasama yang baik dengan pihak swasta dan komponen stakeholder lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu sejak dibentuknya Kota Bontang menjadi daerah otonomi, kerjasama dan sinergi pelaksanaan pembangunan Kota Bontang terus mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sangat diperlukan adanya dukungan dan partisipasi semua pihak karena pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan tanggung jawab bersama. Dalam menjamin agar proses partisipasi tersebut dapat berjalan efektif, pemerintah Kota Bontang telah mengembangkan kerja sama program yang lebih optimal dan efektif untuk secara bersama-sama bersinergi memecahkan permasalahan pembangunan daerah.

Tabel berikut menunjukkan kerjasama antara Pemerintah Kota Bontang dengan pihak ketiga maupun kerjasama dalam bentuk *corporate social responsility* (CSR) tahun 2024 dan kerjasamaa Pemerintah Kota Bontang dengan mitra-mitra kerja, dapat kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Kerjasama Pemerintah Kota Bontang

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama / Ruang Lingkup Kerja sama
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengendalian Banjir di Kota Bontang
2	Kementerian Keuangan	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH DI KOTA BONTANG
3	Kementerian Keuangan	Penempatan Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN di Luar Kementerian Keuangan
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam Mendukung Transformasi Digital di Pemerintah Kota Bontang
5	BPIP	PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama / Ruang Lingkup Kerja sama
6	BNN	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI WILAYAH KOTA BONTANG
7	Kementerian Kesehatan	PENYELENGGARAAN PILOT PROJECT PENANGGULANGAN DENGUE DENGAN METODE WOLBACHIA
8	Provinsi Kaltim - Bontang - Kutim dan IMM	PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL SISTEM VOID INDOMINCO
9	Pemkot Bontang - Ombusment RI	PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
10	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN PEMERINTAH KOTA BONTANG	SINERGI PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN JARINGAN PERALATAN DAN STASIUN PEMANTAU KUALITAS UDARA AMBIEN (SPKUA)
11	Pemkot Bontang - LAN	PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH KOTA BONTANG MELALUI PENYELENGGARAAN ANALISIS KEBIJAKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI, SERTA PENDIDIKAN TINGGI TERAPAN
12	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Kerja Sama Pembangunan Daerah
13	Kabupaten Kutai Timur	Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama / Ruang Lingkup Kerja sama
14	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah
15	Pemkot Samarinda	Kerja Sama Jaringan Lintas Perkotaan
16	Pemkot Balikpapan	Kerja Sama Jaringan Lintas Perkotaan
17	KAB. BARRU ; KAB KOTABARU ; KAB MAUJU ; KOTA BONTANG ; KAB PASANGKAYU ; KOTA BALIKPAPAN	PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI PEMANFAATAN TRANSPORTASI LAUT ANTAR PELABUHAN
18	KOTA BALIKPAPAN ; KOTA BANJARBARU ; KOTA BANJARMASIN ; KOTA BONTANG ; KOTA PALANGKA RAYA ; KOTA PONTIANAK ; KOTA SAMARINDA ; KOTA SINGKAWANG ; KOTA TARAkan	KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH
19	BPJS KESEHATAN	Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
20	BPJS KETENAGAKERJAAN	Fasilitasi dan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
21	PERTAMINA GAS	Pengelolaan Limbah Air domestik
22	PT. Kaltim Methanol Industri (KMI)	Pengelolaan Limbah Air domestik
23	PT. Kaltim Daya Mandiri (KDM)	Pengelolaan Limbah Air domestik
24	PT. Kaltim Industrial Estate (KIE)	Pengelolaan Limbah Air domestik
25	PT. Kaltim Nitrat Indomesia (KNI)	Pengelolaan Limbah Air domestik
26	PT. Pos Indonesia (Persero)	Jasa Layanan PT. Pos Indonesia

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama / Ruang Lingkup Kerja sama
27	Bank Kaltimtara	Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara non Tunai
28	Bank Kaltimtara	Kerja Sama Bidang Perbankan
29	Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)	Jasa Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
30	PT. TOWER BERSAMA	SEWA MENYEWA BARANG MILIK DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN, PENEMPATAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
31	PT. PLN PERSERO UNIT INDUK WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA UPPP BONTANG	PERJANJIAN KERJASAMA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
32	PT. SELAT MUTIARA	KERJASAMA PEMANFAATAN KAWASAN TANAH DAN BANGUNAN WISMA ATLIT BONTANG
33	Pegadaian	Kerja Sama Kerja Sama Produk Layanan Bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Bontang
34	IKATAN AHLI PERANCANAAN	Kerja Sama Penyelenggaraan Penataan Ruang, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
35	PT. Pupuk Kaltim	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
36	PT. Badak	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama / Ruang Lingkup Kerja sama
37	PT. Indominco Mandiri	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
38	PT.KMI	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
39	PT. KNI	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
40	PT. KPI	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
41	PT. KDM	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
42	PT. KIE	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
43	PT. KNE	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
44	PT.KJS	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
45	PT. YUM	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
46	BLKI BONTANG	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
47	LPK BORNEO SKILL SINERGY	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
48	LPK SASANA WIDYA	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama / Ruang Lingkup Kerja sama
49	LPK SUVI TRAINING	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
50	LPK GLOBAL	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
51	LPK ADJIE RADJA	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
52	LPK BBEC	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
53	LPK ALIFCOM INSTITUTE	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
54	LPK APTEKOM	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
55	LPK INKUBASI BISNIS PERMATA BUNDA	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
56	LPK AYULIA	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pemagangan bagi Pencari Kerja
57	Kanwil Kemenkum dan HAM Kaltim	Fasilitasi Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Pelayanan Hukum
58	Kantor UKK Keimigrasian	Pembukaan UKK Keimigrasian
59	Kantor Kementerian Agama Kota Bontang	Pelayanan Khusus Kartu Keluarga dan KTP El bagi pasangan pengantin
60	Pengadilan Agama Kota Bontang	Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama / Ruang Lingkup Kerja sama
61	Kantor Pertanahan Kota Bontang	PERJANJIAN KERJASAMA KEGIATAN PEMETAAN, PENSERTIPIKATAN, FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH ASET PEMERINTAH DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS PERTANAHAN
62	Kejari Kota Bontang	Bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang hukum perdata dan tata usaha negara
63	Perumda AUJ	Kerja Sama Pengembangan dan Pemanfaatan Pelabuhan Loktuan Bontang
64	Institut Teknologi Bandung	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
65	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
66	Universitas Brawijaya	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
67	Universitas Diponegoro	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
68	Universitas Gadjah Mada	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
69	Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
70	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
71	Universitas Mulawarman	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
72	Universitas Hasanuddin	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
73	Politeknik Negeri Samarinda	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
74	Universitas Terbuka Kalimantan Timur	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama / Ruang Lingkup Kerja sama
75	Sekolah Tinggi Teknologi Bontang	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
76	Institut Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
77	Politeknik Negeri Balikpapan	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
78	Institut Teknologi Kalimantan	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
79	Universitas Indonesia Timur	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
80	PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR	PEMANFAATAN PRODUK DAN LAYANAN PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
81	Pengadilan Agama	Pencegahan Perkawinan Usia Anak
82	Kementerian Agama	Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Remaja
83	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO	KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
84	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
85	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
86	Sekolah Tinggi Agama Islam DDI	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
87	Pengadilan Negeri Kota Bontang Kelas II	Kerja Sama Pelaksanaan Fungsi Peradilan
88	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bontang	Peningkatan sumber daya manusia
89	RSIB	PEMBANGUNAN TAMAN KESEHATAN

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama / Ruang Lingkup Kerja sama
90	PT. Inti Griya Prima Sakti (Ramayana)	Addendum Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Plasa Taman Bontang
91	POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA	KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
92	UNIVERSITAS BOSOWA	KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
93	PT INSAN MITRA TEKNOLOGI	KERJA SAMA PENGEMBANGAN KOTA CERDAS (SMART CITY)
94	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI MELALUI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI PEMERINTAH KOTA BONTANG
95	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BONTANG	SINERGI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT KOTA BONTANG
96	PT. KNI	PROGRAM PENINGKATAN MINAT BACA DI KOTA BONTANG
97	PT. IMM	PROGRAM PENINGKATAN MINAT BACA DI KOTA BONTANG
98	PT. KIE	Pemanfaatan Lahan Milik PT, Kaltim Industrial Estate
99	Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Bontang	Pelayanan Kepada Masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik
100	BPJS Kesehatan	Pelayanan Kepada Masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik
101	Bank Dhanarta Dwi Prima	Pelayanan Kepada Masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik
102	PT. Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera	Pelayanan Kepada Masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik
103	Samator	Pengelolaan Limbah domestik

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama / Ruang Lingkup Kerja sama
104	UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA	KERJA SAMA LEMBAGA, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
105	STPN Yogyakarta	KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
106	POLITEKNIK NEGERI KEMENTERIAN KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR	KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
107	PT KALTIM PARNA INDUSTRI (PT. KPI)	Pengelolaan Limbah domestik
108	UNIVERSITAS ISLAM MALANG (UNISMA)	KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
109	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA	PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
110	PT. KALTIM PARNA INDUSTRI	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU HUTAN KOTA WANA KHATULISTIWA
111	BPJS KETENAGAKERJAAN	PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN
112	STIT-SYAM	KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
113	UNIVERSITAS NGUDI WALUYO SEMARANG	KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
114	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Tbk)	PEMANFAATAN PRODUK JASA PERBANKAN
115	Pengadilan Negeri Kota Bontang Kelas II	Kerja Sama Pelaksanaan Fungsi Peradilan

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama / Ruang Lingkup Kerja sama
116	Pengadilan Agama Bontang Kelas II	Sinergitas dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka Pelayanan Prima kepada Masyarakat
117	Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda	Peningkatan sumber Daya manusia dan Pelaksanaan Tri Darma Perguruan tinggi
118	Asosiasi Pelatih Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (APPAUDI) Prov. Kaltim	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) Kota Bontang
119	Kejaksaan Negeri Bontang	Bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang hukum perdata dan tata usaha negara
120	UNIVERSITAS GUNADARMA	Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
121	PT. BLACK BEAR RESOURCE INDONESIA	Pengelolaan Air Limbah Domestik
122	KEMENTERIAN AGAMA KOTA BONTANG	GERAKAN KELUARGA SAKINAH
123	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	PROGRAM BENWITH (BONTANG HEBAT DENGAN WIFI AMAN DAN INTERNET SEHAT) DI KOTA BONTANG
124	PT. PLN ICON PLUS	PROGRAM BENWITH (BONTANG HEBAT DENGAN WIFI AMAN DAN INTERNET SEHAT) DI KOTA BONTANG
125	PT. COMTELINDO	PROGRAM BENWITH (BONTANG HEBAT DENGAN WIFI AMAN DAN INTERNET SEHAT) DI KOTA BONTANG
126	Pemkot - Polres	SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI PADA PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KOTA BONTANG
127	Pemkot Bontang - (PERUM) BULOG	PEMBANGUNAN KOMPLEK PERGUDANGAN PERUM BULOG DI KOTA BONTANG

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama / Ruang Lingkup Kerja sama
128	Pemkot - Kaltimtara	Kerja Sama Pelaksanaan Program Kredit Bontang Kreatif (Kredibel, Adil, Transparan, dan Inovatif) untuk Pelaku Usaha Mikro di Kota Bontang
129	Pemkot Bontang - PT. Pupuk Kaltim	KERJA SAMA PEMBANGUNAN KOTA BONTANG
130	Pemprov Kaltim - Pemkot Bontang	Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen
131	BAPPENAS - BONTANG	PKS - PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA REGISTRASI SOSIAL EKONOMI
132	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR - DKP3 Bontang	KERJA SAMA PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) TANJUNG LIMAU DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) TANJUNG LIMAU KOTA BONTANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG
133	BANK KALTIMTARA - SEKRETARIAT DAERAH	PENYALURAN DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI YANG MELIPUTI BEASISWA STIMULAN DAN BEASISWA TUNTAS KEPADA MAHASISWA KOTA BONTANG
134	BANK MANDIRI - SEKRETARIAT DAERAH	PENYALURAN DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI YANG MELIPUTI BEASISWA STIMULAN DAN BEASISWA TUNTAS KEPADA MAHASISWA KOTA BONTANG
135	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR - DISHUB Bontang	KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TERMINAL TIPE B BONTANG

Tabel 5.2 Bantuan Perusahaan dalam Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun 2024

No.	Nama Perusahaan	Realisasi Program CSR Tahun 2024
1.	PT. Pupuk Kaltim	Pemberdayaan dan pembinaan UMK (Pendanaan UMK, Pelatihan UMK, Hibah sarana dan Alat produksi, Pembinaan Pemasaran dan promosi UMK, PKT UMKM festival)
		Pertanian (program pembinaan pertanian, bantuan sarana dan prasarana)
		Keagamaan (PKT proaktif sembakao ramadhan, mudik gratis, posko mudik, bantuan sosial kemasyarakatan)
		Bantuan korban bencana alam
		Pendidikan masyarakat berkaitan dengan pilar hukum dan tata kelola
		Konservasi mangrove, konservasi terumbu, TPS3R
		Beasiswa PKTPP
		Pengendalian dan Pencegahan Stunting
2.	PT. Black bear Resources Indonesia	Keagamaan
		Pendidikan dan Kebudayaan
		Olahraga
		Lingkungan
		Umum dan Sosial
3.	PT. Kaltim Parna Industri (KPI)	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Tes kebugaran, Pemberian PMT remaja putri anemia, Pemberian PMT catin, penyuluhan dan edukasi stunting, jamban sehat, pelatihan tenaga kesehatan dan kader, gerakan makan ikan dan sayur, pemeriksaan Hb, gerakan serentak sebar abate)
		Peduli pendidikan (sekolah adiwiyata, sekolah sehat, KPI peduli pendidikan, sekolah berwawasan lingkungan)
		Peduli lingkungan (Pengembangan Hutan sebagai area konservasi (terbuka hijau) dan perlindungan keanekaragaman hayati terpadu yang berkelanjutan, Mengembangkan Sekolah Berwawasan Lingkungan, Kampung Minim Sampah (KAMIS), Penanaman Pohon,

No.	Nama Perusahaan	Realisasi Program CSR Tahun 2024
		Penanganan Bencana Banjir, Kemitraan dengan Taman Nasional Kutai) Sosial Budaya dan Perekonomian (Pembinaan UMKM, Program Pengolahan Kompos, Bantuan untuk Kelompok Tani, Bantuan untuk Kelompok Nelayan, Bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, Perayaan HUT RI Bersama warga, Pengembangan Pariwisata, Safari Ramadhan 8' IduI Adha / Qurban, Bantuan warga terdampak banjir, Bantuan Event Kota Bontang Bantuan tunai bagi masyarakat ISDA AWARD (Indonesian Sustainable Development Award)
4.	PT. Kaltim Methanol Industri	Lingkungan (Penyetoran dan pemilihan sampah, urban farming, bank sampah buncis unik, taman methanol) Pendidikan (english fun camp dan gerakan literasi insentif) Kesehatan (posyandu remaja kelurahan guntung, kesehatan gigi untuk ABK) Ekonomi (UMKM jahe instan dan inseminasi buatan) Sosial (Sponsorship routine) Infrastruktur (Tugu equator)
5.	PT. Indominco Mandiri	Pendidikan (Beasiswa, Pelatihan pendidikan dan keahlian, adiwiyata, indominco mengajar, fasilitas penunjang proses pendidikan) Kesehatan (sanitasi, berbasis masyarakat, pencegahan stunting USG dan pemeriksaan kandungan dan pencegahan stunting, perilaku hidup bersih dan sehat) Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan (padi sawah, pengembangan sapi, Pengembangan serta penguatan kelompok nelayan petani rumput laut dan Fasilitas alat pertanian, perkebunan, perikanan dan lainnya) Kemandirian ekonomi (pengembangan UMKM olahan makanan) Sosial dan budaya (Pengembangan Tahfiz, TPA, TPQ, Pelestarian Budaya Lokal, Seni & Olahraga, Perayaan Hari

No.	Nama Perusahaan	Realisasi Program CSR Tahun 2024
		Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan dan Bantuan Fasilitas Pendukung Kegiatan Sosial, Budaya dan Keagamaan di Masyarakat) Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang penguatan lembaga Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM
6.	PT. Pamapersada Nusantara	Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kesehatan dan Gizi Masyarakat (Program Promotive (Penyuluhan/Pembinaan Kesehatan), Program Preventive (Pencegahan Penyakit) dan Program Kurative (Pengobatan Penyakit)) Manajemen Pengelolaan Lingkungan (Mitra Taman Nasional Kutai, Program Kampung Iklim (ProKlim) dan Penanaman Pohon Penghijauan) Pendidikan, Peningkatan Keterampilan dan Kursus (Beasiswa Prestasi, Program Software (Pembinaan Kurikulum/Pendampingan Ekstrakurikuler), Program Brainware (Pelatihan Peningkatan Kualitas Guru/Siswa), Program Hardware (Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan) dan Kegiatan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) Sosial, Budaya, Agama dan Sarana Sosial (Santunan Yatim/Piatu/Yatim Piatu dan Dhuafa, Hari Raya Keagamaan, Hari Raya Qurban dan kegiatan sosial, budaya dan keagamaan)
7.	PT. Kaltim Nitrate Indonesia	Program MAHIRA (Rumah Ibadah Ramah Anak) Batch IV Program Kampung GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) Program Perahu Kertas (Perlindungan, Pemenuhan dan Kreativitas Anak Penyandang Disabilitas)

No.	Nama Perusahaan	Realisasi Program CSR Tahun 2024
		Program SATRIA (Saatnya Terhubung Ramah dan Informatif untuk Anak)
		Program Beras Basah (Betah, Kerasan dan Bahagia di Sekolah)
		Program Bontang Creative Hub (BCH)
		Program pemberdayaan masyarakat pesisir KELOMPOK PEMBATIK SAMPOANG
		Capacity building (program gerakan cinta tanah air dan program pendidikan dual track)
		Program Bantuan Kebencanaan (emergency response) Kota Bontang
		Charity (Program bantuan sosial untuk masyarakat bontang, safari Ramadhan 1445 H, Idul Qurban 1445 H)
8.	PT KDM	Kesehatan (Program Lansian Sehat Mandiri Bahagia (Lahan Basah) bersama KDM)
		Pendidikan (PAUD Inspiratif, Beasiswa KDM Peduli Pendidikan dan Program KDM Mengajar)
		Program Koservasi Lingkungan
		Peningkatan Ekonomi Masyarakat (UMKM Mitra Binaan KDM)
		Bantuan Sosial Kemasyarakatan (Pemberian bantuan proposal dari Pihak Ketiga)
9.	PT. Energi Unggul Persada	Pendidikan (Ruangan untuk SMPN 6 Bontang Lestari dan Bantuan Perlengkapan Sekolah untuk Pesantren Mambaul Falah Segendis)
		Keagamaan (Bedah/renovasi tempat ibadah, Bantuan hewan qurban untuk RT. 11 dan Santan Ilir, Buka Bersama masy. Di Buffer Zone, Bantuan kegiatan natal)
		Kesehatan (Pemeriksaan Kesehatan gratis bekerjasama dengan RS. Amalia Bontang, penanganan stunting, donor darah)

No.	Nama Perusahaan	Realisasi Program CSR Tahun 2024
		Kemasyarakatan (Bantuan peralatan kerja kelompok Tani, Kegiatan bakti social Bulanan, Support Event Lomba balap Perahu, Bantuan kegiatan social, budaya dan kemasyarakatan, Pembangunan Keramba Apung di Selangan dan Tihi2)
		UMKM (Bantuan sarana untuk usaha amplang atau keripik pisang)
		Infrastruktur (Perbaikan jalan di daerah bufferzone yang rusak)
10.	PT. PDAM	Pelayanan (Bantuan Pengadaan Jaringan Pipa Induk bagi masyarakat tidak mampu dan Bantuan Rehabilitasi Jaringan Pipa Persil Sambungan Rumah bagi masyarakat yang terkena musibah kebakaran)
		Hubungan masyarakat (sumbangan kegiatan sosial)
		Keagamaan (bantuan hewan kurban pada lingkungan sekitar)
		Sosial Masyarakat (pemberian bantuan kepada pekerja rentan di Kota Bontang melalui BPJS)
11.	PT. United Tractors	Pendidikan

5.2 Penghargaan/Prestasi Kota Bontang Tahun 2024

Pada tahun 2024 Kota Bontang memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala nasional maupun regional. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain, sebagai berikut:

NO	NAMA PENGHARGAAN	DESKRIPSI	DOKUMENTASI
1	Penghargaan Panji Keberhasilan Bidang Pembangunan Pemprov Kaltim (9 Januari 2024)	HUT Ke-67 Provinsi Kaltim Tahun 2024 , Bontang Raih 5 Panji Keberhasilan Pembangunan : Panji Keberhasilan : 1.Bidang Hilirasi Peternakan, 2.Bidang Lingkungan Hidup, 3.Bidang Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Masyarakat, 4.Bidang Penanganan Anak Disabilitas, 5.Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Kategori Kota.	

NO	NAMA PENGHARGAAN	DESKRIPSI	DOKUMENTASI
2	Penghargaan Adipura Kencana Tahun 2023 (5 Maret 2023)	Kota Bontang kembali menunjukkan prestasinya di bidang lingkungan dan kebersihan. Penghargaan Adipura Kencana disematkan lagi kepada Kota Bontang, sehingga Bontang meraih Piala Adipura Kencana secara berturut-turut pada 2022 dan 2023. Penghargaan Anugerah Adipura Kencana diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Soebroto Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024) pagi.	 
3	Penghargaan Terbaik 3 Bidang Pembangunan Daerah Tahun 2024 (2 Mei 2023)	Kota Bontang meraih Penghargaan Terbaik 3 kategori Kota Penghargaan Pembangunan Daerah 2024 yang di terima Langsung oleh Sekda Bontang Aji Erlynawati yang di berikan Langsung Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam kegiatan Musrenbang Daerah Provinsi Tahun 2024 dalam rangka RPJPD Provinsi Kaltim tahun 2025 - 2045 dan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2025 di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (02/05/2024)	 

NO	NAMA PENGHARGAAN	DESKRIPSI	DOKUMENTASI
4	Penghargaan Nasional dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia dengan meraih capaian Terbaik III dalam kategori Implementasi Audit Kasus Stunting untuk 5 PASTI (Aksi Pasti) seri I dan II Tahun 2024. (26 Juni 2024)	Wakil Wali Kota Bontang Najirah selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting (TPPS) Kota Bontang menerima Penghargaan Nasional dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia dengan meraih capaian Terbaik III dalam kategori Implementasi Audit Kasus Stunting untuk 5 PASTI (Aksi Pasti) seri I dan II Tahun 2024. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia, Dokter Hasto pada acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-31 yang berlangsung di Ballroom Hotel PO Kota Semarang, Rabu (26/6/2024)	 
5	Penganugerahan Manggala Karya Kencana Tahun 2024 (28 JUNI 2024).	Wali Kota Bontang Basri Rase S.Ip, M.Si menerima Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia. Penghargaan diberikan langsung oleh Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K) dalam Gala Dinner Hari Keluarga Nasional yang ke-31, di Merapi Grand Ballroom-PRPP Semarang, jumat (28 JUNI 2024).	 

NO	NAMA PENGHARGAAN	DESKRIPSI	DOKUMENTASI
6.	Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2024 (8 AGUSTUS 2024)	Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024, Kota Bontang berhasil meraih predikat sebagai salah satu kota dengan cakupan layanan kesehatan universal terbaik di Indonesia. Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Wakil Wali Kota Bontang, Najirah, oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti. (Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2024, yang dilaksanakan di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta , 8 Agustus 2024 . Sebagai apresiasi atas dukungan terhadap program strategis nasional ini, Pemerintah memberikan penghargaan UHC Awards kepada pemerintah daerah yang 95 persen lebih penduduknya telah terdaftar sebagai peserta JKN.	 
7.	Penghargaan Indonesian Smart Nation Award (ISNA) 2024 (8 AGUSTUS 2024)	Kota Bontang, kembali menorehkan prestasi. Dalam ajang Indonesian Smart Nation Award (ISNA) 2024, Bontang berhasil meraih penghargaan Apresiasi Daerah Utama. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemkot Bontang dalam mengembangkan konsep kota cerdas dan menjalankan setiap siklus transformasi pembangunan. Apresiasi yang diberikan itu berdasarkan framework tiap daerah yang menjalankan elemen-elemen atau indikator pembangunan dalam smart city. Mulai dari smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment. Pemberian 'ISNA 2024' kategori Apresiasi Daerah Utama tersebut diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang Najirah oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuarty Daud, Restuarty Daud dan Ketua IKAL Lemhanas, Sylviana Murni, di ICE BSD, Tangerang, (8 AGUSTUS 2024) malam.	 

NO	NAMA PENGHARGAAN	DESKRIPSI	DOKUMENTASI
8.	PENGHARGAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) (09 AGUSTUS 2024).	Wali Kota Bontang, Basri Rase menerima Penghargaan Program Kampung Iklim (ProKlim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diserahkan langsung dari oleh Menteri LHK Siti Nurbaya di puncak Festival LIKE 2, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (09 AGUSTUS 2024).	 
9.	PENGHARGAAN PARITRANA AWARDS TAHUN 2023 (09 AGUSTUS 2024)	Wakil Walikota Bontang Najirah menerima penghargaan Paritrana Awards Tahun 2023 Kota Bontang sebagai Juara 2, yang diberikan langsung oleh Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik di Ballroom Hotel Bumi Senyur, Samarinda, Jumat (09 AGUSTUS 2024). Prestasi ini membuktikan komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Najirah berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus mengoptimalkan perlindungan pekerja di Kota Bontang.	 
10.	Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 2024 (3 SEPTEMBER 2024)	Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlynawati, mewakili Wali Kota Bontang Basri Rase, menerima penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani, dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Penerapan Aplikasi Srikandi di Rinjani Ballroom, Lombok Raya Hotel, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa (3 SEPTEMBER 2024).	

NO	NAMA PENGHARGAAN	DESKRIPSI	DOKUMENTASI
		Apresiasi Srikandi diberikan atas dukungan kepala daerah komitmen implementasi, inovasi, dan konsistensi dalam mengimplementasikan aplikasi Srikandi. “Penghargaan ini merupakan apresiasi ANRI kepada 13 pemerintah daerah, yang terdiri dari 5 provinsi, 5 kabupaten, dan 3 kota yang secara aktif mengimplementasikan Aplikasi Srikandi	 
11.	Penghargaan “Apresiasi Tokoh Indonesia 2024”. (10 SEPTEMBER 2024)	Prestasi membanggakan diraih oleh Wali Kota Bontang, Basri Rase, yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang nasional bergengsi “Penghargaan Apresiasi Tokoh Indonesia 2024”. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Meiky Sofyansah dari PT Tempo Inti Harian, disaksikan oleh Dirjen Kementerian Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi Drs. Toms Balaw, M.Si, serta Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk, Arif Zulkifli. Acara ini bertempat di Ruang Flores, Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa malam, (10/9/ 2024). Penghargaan dari TEMPO Media Group ini merupakan bentuk apresiasi terhadap tokoh-tokoh yang berkontribusi signifikan dalam pembangunan di daerah masing-masing maupun di tingkat nasional. Dari tujuh tokoh yang dipilih se-Indonesia, Basri Rase termasuk sebagai penerima penghargaan dalam kategori Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana.	 
12.	Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2023 (18 SEPTEMBER 2024)	Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya di Auditorium Dr. Ir. Soejarwo , Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).	

NO	NAMA PENGHARGAAN	DESKRIPSI	DOKUMENTASI
13.	PENGHARGAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024 Kategori "BB" (2 OKTOBER 2024)	Pemerintah Kota Bontang menerima penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI. Pemerintah Kota Bontang meraih penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dengan Predikat Nilai BB. Prestasi tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati di Grand Ballroom Birawa Hotel Bidakara Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024).	 
14.	PENGHARGAAN TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024 8 OKTOBER 2024	Pemerintah Kota Bontang kembali mengharumkan nama Kalimantan Timur di kancah nasional. Dalam ajang Gebyar Pelayanan Publik 2024, mewakili Pjs. Walikota Bontang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang, Dasuki, menerima penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik untuk kategori realisasi Tahun 2024. Penghargaan bergengsi ini diberikan langsung oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, atas inovasi unggulan Kota Bontang, yaitu Program Rantang Kasih. Penghargaan yang diberikan dalam acara Gebyar Pelayanan Publik yang diselenggarakan di Ballroom 1 Hotel Sheraton, Jakarta pada Selasa (8/10/2024) tersebut juga dihadiri Asisten Administrasi Umum Akhmad Suharto, Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat, drg. Toetoe Pribadi Ekowati, Kabag Organisasi Setda, Natalia Trisnawati.	 
15.	PENGHARGAAN BHUMANDALA 2024 4 NOVEMBER 2024	Pemerintah Kota Bontang kembali berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi, yakni Bhumandala Award dalam Kategori Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Terbaik. Penganugerahan penghargaan yang diberikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) itu, digelar pada Senin (04/11/2024) malam di Grand Studio Metro TV, Jakarta.	

NO	NAMA PENGHARGAAN	DESKRIPSI	DOKUMENTASI
16.	PENGHARGAAN IGA AWARD 2024 5 DESEMBER 2024 -	Kota Bontang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Kota Sangat Inovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan tersebut diterima oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H. Lukman, di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, (5/12/2024).	
17.	PENGHARGAAN OMBUDSMAN (Penyerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024) 10 DESEMBER 2024	Pemerintah Kota Bontang kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan menerima Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dari Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diterima oleh Asisten Administrasi Umum Pemkot Bontang, Ahmad Suharto, dalam acara resmi yang digelar di Hotel Harris Samarinda, Selasa (10/12/2024).	
18.	PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 18 DESEMBER 2024	Peringkat 1 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kaltim 2024, predikat "Informatif" dengan skor 98,00 untuk kategori Pemerintah Kota/Kabupaten. Acara penghargaan berlangsung pada Rabu (18/12/2024) di Ballroom Hotel Aston Samarinda, dihadiri rombongan Pemkot Bontang yang dipimpin Asisten Administrasi Umum, Akhmad Suharto. Keberhasilan ini juga diraih sejumlah badan publik di bawah Diskominfo Bontang, seperti BKPSDM dengan nilai sempurna (peringkat pertama) dan Dinas Perpustakaan dengan skor 94 (peringkat kelima).	

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 yang disusun sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah, mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bontang Tahun 2024. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program / kegiatan tahun anggaran 2024 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Selain melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama tahun anggaran 2024 yang disampaikan oleh Wali Kota Bontang kepada DPRD Kota Bontang secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2024.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di Tingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan, serta Legislatif (DPRD) dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah Kota Bontang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Kota Bontang yang mendukung situasi dan kondisi sehingga tetap terjaga kondusif dan penyelenggaraan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kota Bontang membuka selebar - lebarnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian LKPJ Wali Kota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2024 ini, diiringi harapan semoga di tahun - tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kota Bontang. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.



LKPJ TA 2024

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 disampaikan kepada DPRD Kota Bontang sebagai wujud akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan. LKPJ ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 dan merupakan hasil kinerja pelaksanaan APBD Kota Bontang tahun 2024, yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Bontang periode 2021-2026.

Keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras semua pihak terkait. Meskipun menghadapi tantangan, pemerintah berupaya maksimal mengatasi permasalahan. LKPJ ini diharapkan menjadi dasar bagi pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan pembangunan Kota Bontang yang lebih baik dan menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah di masa depan.

